

BANGSA BAHARI

Tangkaplah ikan, bukan carilah ikan!

Penyunting:
Bambang Budi Utomo



DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN

Direktorat
Kebudayaan

BANGSA BAHARI

Tangkaplah ikan, bukan carilah ikan!

Penyunting:
Bambang Budi Utomo



DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN



BANGSA BAHARI

Tangkaplah ikan, bukan carilah ikan!

Buku ini merupakan kumpulan beberapa makalah Seminar Hari Nusantara 2012.
Diterbitkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Tidak untuk diperjual-belikan.

623.8
BAM
b

DAFTAR ISI

•	DAFTAR ISI	iii
•	DAFTAR FOTO	iv
•	DAFTAR PETA DAN SKETSA	v
•	PENGANTAR SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN	vii
•	PENGANTAR PENYUNTING	ix
•	BAGIAN I – BUDAYA BAHARI	1
▪	Pendekatan Holistik Bagi Pelembagaan Budaya Bahari – <i>Bambang Rudito</i>	3
▪	Mitologi tentang Dunia (Laut) dan Memahami Nilai-nilai Pengikat Ke-Nusântara-an – <i>I Ketut Ardhana</i>	11
▪	Jejak Bawah Tanah dan Percik Bawah Air: Cikal Tua Bangsa Bahari – <i>Bambang Budi Utomo</i>	27
•	BAGIAN II – DINAMIKA BAHARI	39
▪	Melayu dan Kebaharian di Nusântara dalam Konteks Negara Kepulauan – <i>Bambang Budi Utomo</i>	41
▪	Akulturası Budaya Suku Bajo dengan Budaya Sekitar – <i>Tasrifin Tahara</i>	51
▪	Menjahit Laut: Sulawesi dan Lombok dalam Lintas Sejarah Maritim – <i>Andi Ima Kesuma</i>	63
•	BAGIAN III – SUMBERDAYA dan PEMANFAATAN KEBAHARIAN	79
▪	Kota Makassar dalam Sejarah Maritim Indonesia – <i>Edward L. Poelinggomang</i>	81
▪	Fungsi Pelabuhan dan Pelayaran di Indonesia – <i>Wahyono Bimarso</i>	91
▪	Pengembangan Sumberdaya Manusia Berbasis Maritim – <i>Sahala Hutabarat</i>	109
•	BAGIAN IV – PESAN dari NUSANTARA	121
•	DAFTAR PUSTAKA	130

DAFTAR FOTO

• Foto ilustrasi nelayan menjaring ikan (dok. Istimewa)	ii
• BAGIAN I	
▪ Perkampungan Suku Bajo di Wangi-wangi (dok. Komaruddin Azis)	3
▪ Kampung nelayan di Sulawesi (beritadaerah.com)	4
▪ Kampung nelayan di muara sungai Cilamaya, Karawang (dok. BBU)	6
▪ Foto ilustrasi gelombang samudera (dok. Istimewa)	10
▪ Tradisi Buang Jong (dok. Istimewa)	11
▪ Penguburan masyarakat Baliaga di Trunyan, Bali (beautifulbali.blogspot.com)	18
▪ Tanah Lot, Bali (baliliburanku.com)	23
▪ Membajak sawah (enidajohnson.worldpress.com)	33
▪ Relief membajak pada adegan ceritera Lalitawistara Candi Borobudur (dok. BBU)	33
▪ Lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara (dok. Puslitarkenas)	35
▪ Relief kapal pada relief ceritera Lalitawistara Candi Borobudur (dok. Brandes)	37
• BAGIAN II	
▪ Berburu paus di Lembata, Flores Timur (disbudparlembata.blogspot.com)	45
▪ Suku Bajo di Rinca, Manggarai Barat, Flores (dok. Hari Suroto)	47
▪ Perkampungan Suku Bajo (dok. Istimewa)	51
▪ Kampung Bajo (dok. Dimas)	52
▪ Masyarakat Bajo di Wakatobi, Sulawesi Tenggara (dok. Seto Ariyadi)	56
▪ Orang Bajo membuat perahu di Wangi-wangi (wendiken.blogspot.com)	57
▪ Pelabuhan Ampenan tempo dulu (dok. KITLV)	65
▪ Suku Laut dalam perahu (dok. Oji)	74
▪ Setelah melaut, nelayan merapat di pelabuhan Tanjung Luar, Lombok (lombok.panduanwisata.com)	77

- BAGIAN III

- Pelabuhan Paotere Makassar (dok. Istimewa) 81
- Pelabuhan Bahtera Jaya, Ancol (dok. Nurman Sahid) 91
- Foto ilustrasi pulau Indonesia (sumber: Wid Waitt Institute) 108
- Foto ilustrasi kepulauan Nusantara (dok. Istmewa) 109
- Tempat pelelangan ikan di Tanjung Luar, Lombok (dok. lombok.panduanwisata.com) 113

- BAGIAN IV

- Bagang nelayan di Kepulauan Seribu (dok. Nurman Sahid) 136

DAFTAR PETA dan SKETSA

- BAGIAN I
 - Sketsa pelayaran Nusantara (sumber: *Early Indonesian Views*) 27
 - Wilayah rumpun penutur bahasa Austronesia (dok. Belwood) 28

- BAGIAN II
 - Penyebaran penutur rumpun bahasa Austronesia di Nusāntara (dok. BBU) 41
 - Segitiga karang dunia dan pemukiman Suku Bajo (dok. Google-BBU) 54
 - Peta pelayaran Nusantara (sumber: Istimewa) 63
 - Sebaran pelabuhan-pelabuhan kuno di Lombok (dok. Google-BBU) 69
 - Nusāntara pada masa kejayaan Majapahit abad ke-14-15 (dok. BBU) 71

- BAGIAN III
 - Sketsa Makassar dan Somba Opu abad ke-17 Masehi 83

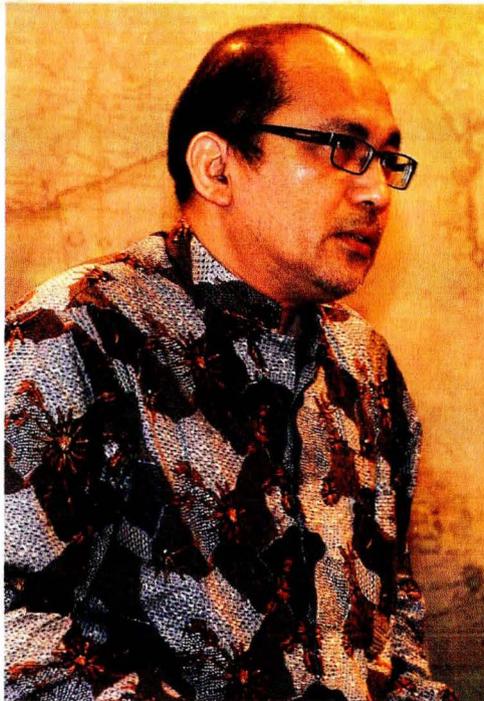
- BAGIAN IV
 - Peta kuno Indonesia 1801 (sumber: *John Cary Maps*) 123

PENGANTAR SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Dalam sejarahnya, peringatan Hari Nusāntara setiap tanggal 13 Desember, mulai diperingati sejak 1999 ketika masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Namun, peringatan itu secara resmi baru ditetapkan melalui Keppres No.126/2001 tanggal 11 Desember 2001 ketika masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan itu merujuk pada peristiwa sejarah yang dikenal dengan nama Deklarasi Djuanda, sebuah pernyataan politik yang menyangkut batas-batas teritorial negara Republik Indonesia di mana laut di antara pulau diakui sebagai wilayah Indonesia.

Deklarasi Djuanda sekaligus mengingatkan pada bangsa Indonesia bahwa bangsa ini adalah Bangsa Bahari yang mendiami pulau-pulau. Secara politis pulau-pulau itu tidak dipisahkan oleh laut, karena di lautlah anak bangsa bahari berinteraksi dan bermatapencaharian dengan memanfaatkan sumberdaya laut. Dengan deklarasi ini, orang-orang asing tidak dapat berlalu-lalang sesukanya dan mengambil sumberdaya yang terkandung di laut milik Indonesia. Karena itulah sumberdaya laut harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bangsa ini.

Sejak tahun 1999 kita sudah tigabelas kali memperingati Hari Nusāntara. Berbagai kegiatan yang secara resmi dibuka oleh Presiden seperti pameran dan seminar telah dilakukan, namun pemaknaannya belum terasa di masyarakat. Pada peringatan Hari Nusāntara kali ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan kegiatan pameran, seminar, dan lomba pentas seni yang seluruhnya bernuansa bahari. Pelaksanaan kegiatan dipusatkan di Lombok, Nusa Tenggara Barat; dengan kegiatan pendukung sebelumnya yang diselenggarakan di Denpasar, Bali, dan Makassar, Sulawesi Selatan.



Seminar yang diikuti oleh para akademisi dan praktisi diadakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan kesatuan wilayah laut Republik Indonesia. Jika pada peringatan Hari Nusāntara yang lalu hasil-hasil seminar tidak dibukukan, kali ini makalah-makalah tersebut diterbitkan dalam bentuk buku yang disertai dengan gambar-gambar ilustrasi. Diharapkan melalui buku yang berjudul *Bangsa Bahari: Tangkaplah ikan, bukan carilah ikan* ini pengetahuan kebaharian dapat disebarluaskan pada masyarakat melalui institusi pendidikan.

Akhirnya, buku yang ada di tangan Anda ini tentu ada kekurangannya. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dan menjadi ladang amal untuk memperbaikinya. Meskipun demikian saya mengucapkan terimakasih kepada para penulis dan penyunting buku ini. Tanpa kerja mereka buku ini tidak akan pernah ada.

**Sekretaris,
Drs. Gatot Ghautama M.A**

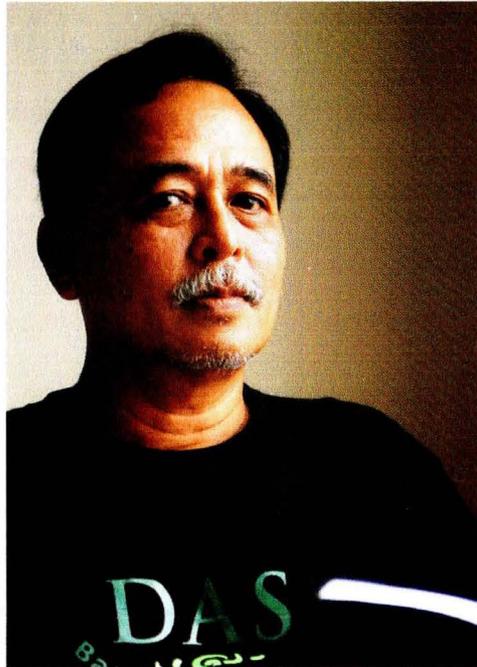
PENGANTAR PENYUNTING

Indonesia merupakan negara kepulauan (*Archipelagic state*) yang memiliki sumberdaya potensi yang besar. Sumberdaya tersebut tersebar di wilayah pulau dan laut dengan wilayah udara di atasnya. Namun, perlu disadari bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola dengan maksimal. Di perairan laut Indonesia masih banyak menghadapi pencurian sumberdaya laut dan peninggalannya. Hal ini, perlu mendapat perhatian khusus.

Dalam sejarahnya, peringatan Hari Nusāntara setiap tanggal 13 Desember, mulai dicanangkan pada tahun 1999, yaitu ketika pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Megawati melalui Keppres No. 126/2001 ditetapkan sebagai Hari Nusāntara dan dirayakan secara nasional. Penetapan tanggal Hari Nusāntara merujuk pada pernyataan Perdana Menteri Ir. H Djoeanda tanggal 13 Desember 1957, yang selanjutnya dikenal dengan nama Deklarasi Djoeanda.

Deklarasi Djoeanda merupakan dasar bagi Indonesia menjadi negara kepulauan (*Archipelagic State*) guna mewujudkan konsep Wawasan Nusāntara NKRI. Peringatan Hari Nusāntara harus menjadi semangat untuk mencegah disintegrasi bangsa dan negara serta membangun NKRI menjadi lebih baik. Peringatan ini dilakukan setiap tahun dan digilir dari kawasan Indonesia barat ke kawasan timur. Peringatan Hari Nusāntara umumnya dimeriahkan dengan seni pertunjukan, pameran, seminar, dan perlombaan yang semuanya bernuansa kebaharian.

Untuk memperingati Hari Nusāntara, Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan pameran dan seminar tentang budaya bahari.



Pameran tentang budaya bahari diadakan guna menambah wawasan dan kecintaan masyarakat akan kebudayaan Indonesia yang pada hakekatnya berbudaya bahari. Sedangkan seminar diadakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan kesatuan wilayah laut NKRI. Seminar tentang kebaharian diadakan di tiga tempat di wilayah Indonesia bagian tengah, yaitu di Makassar, Denpasar, dan Mataram. Di masing-masing tempat tersebut dibincangkan topik-topik yang berbeda, yaitu “Dinamika Aktual Masyarakat Bahari Indonesia” di Makassar (Sulawesi Selatan), “Membangkitkan Wawasan Budaya Melalui Peningkatan Peran SDM dan Iptek” di Denpasar (Bali), dan “Pelebagaan Budaya Bahari” di Mataram (Nusa Tenggara Barat).

Buku yang berjudul *Bangsa Bahari: Tangkaplah ikan, bukan carilah ikan* ini diterbitkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Purbakala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tulisan atau makalah yang diterbitkan dalam buku ini ditulis oleh para peneliti, pengajar, dan praktisi yang telah lama berkecimpung dalam “nuansa kebaharian”, yang berangkat dan berjalan di atas minat, wawasan, dan cara masing-masing, namun menuju arah yang sama, menuju ke laut. Kesamaan arah yang dituju itu, memunculkan adanya kesamaan “sumber ilham dan sumber tulisan” (referensi). Oleh karena itu, agar tidak melakukan pengulangan dalam menuliskan satu sumber buku yang dipakai oleh beberapa penulis dalam masing-masing tulisannya, semua “sumber ilham dan sumber tulisan” disatukan di bagian belakang buku ini dalam halaman Daftar Pustaka.

Selama seminar yang dilangsungkan di tiga tempat tersebut, makalah yang dipresentasikan seluruhnya berjumlah 13 buah yang rinciannya 4 makalah di Makassar, 5 makalah di Denpasar, dan 4 makalah di Mataram. Namun tidak seluruh makalah dihimpun dalam buku ini karena 4 pemrasaran hanya membuat dalam bentuk *power point*. Dengan alasan itulah makalah yang diterbitkan dalam buku ini hanya 9 makalah yang sistematikanya dibagi dalam tiga bagian berdasarkan topik Budaya Bahari, Dinamika Bahari, dan Sumberdaya dan Pemanfaatan Kebaharian. Topik-topik ini berbeda dengan topik-topik yang diajukan dalam seminar.

Buku yang berisi tentang hasil diskusi ilmiah di tiga lokasi Makassar, Denpasar, dan Lombok ini diharapkan menjadi sebuah buku yang dapat dibaca oleh masyarakat luas sehingga dapat menggugah dan menyadarkan akan sisi kebaharian yang pada dasarnya telah lama dimiliki. Melalui buku ini diharapkan pendidikan kebaharian sejak usia dini --tentunya tidak secara langsung—dapat disampaikan kepada masyarakat bahari. “Laut bukan pemisah Nusāntara, tetapi laut adalah pemersatu Nusāntara” dan tidak sepatutnya nelayan mencari ikan karena laut sudah menyediakannya.

**Penyunting,
Bambang Budi Utomo**

The background of the page is a photograph of a traditional Indonesian wooden boat with a thatched roof, likely a Pinisi, on a body of water. The boat is positioned diagonally, with its bow towards the bottom left. The water is a deep blue, and the sky is a pale, hazy blue. In the bottom left corner, there is a circular compass rose with the letters 'N', 'E', 'S', and 'W' visible. The overall tone is warm and historical.

BAGIAN I
BUDAYA BAHARI



pilih batu pahat aksara
batu purba terpahat mandat
tamadun bahari kaya budaya
tinggi budaya bangsa beradat

PENDEKATAN HOLISTIK BAGI PELEMBAGAAN BUDAYA BAHARI*

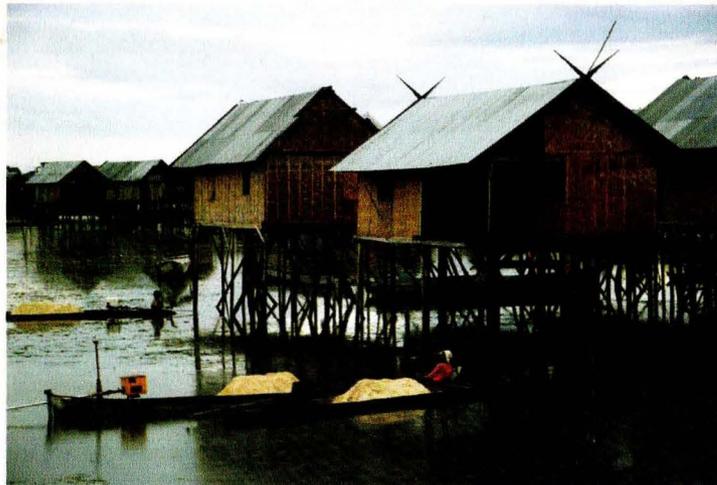
Dr. Bambang Rudito

Latar Belakang

Masyarakat Indonesia yang tersebar dalam bentuk kesukubangsaan memang sudah menjadi ikon sebagai masyarakat yang majemuk (*plural*). Keberagaman kesukubangsaan ini tentunya sebagian besarnya mempunyai kebudayaan yang berbeda dalam hal mata pencaharian.

Seperti layaknya masyarakat yang tinggal di kepulauan, tentunya terdapat kelompok-kelompok orang yang berdiam di pinggir pantai sebagai sebuah masyarakat nelayan dan menggunakan lingkungan pantai dan lautnya sebagai sumber mata pencaharian. Sehingga dengan adanya kehidupan masyarakat dengan mata pencaharian yang mengandalkan laut dan pantai juga menjadi ikon bangsa dalam konteks kebudayaan sehingga menjadi kebudayaan bahari.

Dari dua ikon yang berbeda tersebut dapat dipahami bahwa masing-masing sukubangsa sebagian besar mempunyai kebudayaan bahari, dan ini tentunya bagi sukubangsa yang mempunyai wilayah kesukubangsaan meliputi daerah pantai dan laut. Model-model sifat dan karakteristik dalam proses pemahaman terhadap lingkungannya yang mengarah pada model mata pencaharian kelautan tentu melibatkan ciri dan karakteristik kesukubangsaan tertentu.



* Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Hari Nusantara dengan tema "Pelebagaan Budaya Bahari" yang diselenggarakan di Mataram, Lombok, 13 Desember 2012.

Akhirnya memang model dan cara pemahaman kelautan bagi masyarakat yang berkebudayaan pantai akan melibatkan ciri dari model dari kesukubangsaan yang menjadi identitas kelompok yang bersangkutan. Model-model keorganisasian sosial masing-masing kelompok masyarakat pantai dengan dasar kesukubangsaan tertentu akan mencirikan keperbedaan yang bisa dibandingkan satu dengan lainnya, misalnya cara-cara membuat perahu, cara memperoleh ikan sampai kepada penghargaan terhadap mahluk-mahluk supra natural yang terkait dengan model kesukubangsaan yang menjadi identitasnya.

Penggunaan Konsep Kesukubangsaan dan Kebudayaan

Dua ikon masyarakat Indonesia (sukubangsa dan kebudayaan) akan menjadi bahasan dalam tulisan ini, khususnya adanya perbedaan kebudayaan pantai atau bahari dari masing-masing daerah di Indonesia.

Sukubangsa dalam tulisan ini dimaknai sebagai sebuah golongan sosial yang diikat oleh adanya rasa kesatuan dalam konteks mitologi yang sama sebagai dasar adat istiadat dan identitas dari golongan sosial yang ada. Golongan sosial yang bersifat askriptif, sebuah kumpulan orang dengan identitasnya sendiri yang diperoleh dari generasi sebelumnya yang mendiami suatu wilayah tertentu sehingga menjadikannya identitas serta asal muasal golongan sosial tersebut.

Sukubangsa pada umumnya mempunyai bahasa sendiri sebagai model dalam memberikan simbol terhadap lingkungannya, bahasa ini ada yang terwujud dalam rangkaian aksara dan ada juga yang lisan. Sehingga ada sukubangsa-sukubangsa yang mengenal aksara dan ada yang lisan. Tetapi kedua sifat bahasa ini tetap diwariskan (disosialisasikan) dari generasi ke generasi dari golongan sosial yang bersangkutan.



Identitas sukubangsa pada gilirannya tidak dapat berubah sebagai konsekuensi dari sifat askriptif (*ascribed*) tersebut, misalnya antara anak dan orang tua; perbedaan jenis kelamin, usia dan seterusnya yang secara fisiologi tidak bisa dipertukarkan karena mempunyai fungsi-fungsi yang melekat secara erat. Identitas sukubangsa pada prinsipnya diperlukan bagi anggota masyarakat pendukung identitas tersebut untuk berinteraksi sosial dengan golongan sosial lain (sukubangsa lain). Hal ini dapat dijelaskan karena dalam perwujudannya sebagai tindakan dan tingkah laku masing-masing orang dengan latar belakang golongan sosial tertentu akan membawa tradisinya sendiri-sendiri yang diperoleh melalui sosialisasi budaya, sehingga memunculkan anggapan, prasangka dari golongan sosial yang berbeda tersebut dalam bertindak.

Penggolongan atau pengkategorisasian dilakukan seseorang atas dasar ciri-ciri utama yang menonjol dari gejala yang digolongkan dan ini diperlukan untuk menciptakan strategi guna mengatur interaksi sosial yang terjadi. Berdasarkan ciri-ciri tersebut gejala-gejala yang ada akan dipilah-pilah dan dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama. Pemilihan ciri-ciri utama yang menonjol dari suatu gejala didasarkan atas pengetahuan yang ada dalam kebudayaan seseorang yang akan melakukan penggolongan tersebut. Dari proses pengkategorisasian tersebut muncullah golongan-golongan atau kategori-kategori yang terwujud dalam suatu konsep dimana didalam konsep tersebut terdapat ciri-ciri yang menonjol dari gejala tersebut dan akan dikaitkan dengan konteks sosialnya.

Lazimnya penggolongan ini dilakukan oleh seseorang untuk maksud-maksud tertentu, seperti meniadakan kekacauan atau kemudahan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya pembagian jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan atau penggolongan sosial yang menghasilkan golongan-golongan sosial yang ada dalam masyarakat, seperti golongan masyarakat miskin, golongan masyarakat terasing dan lain sebagainya, serta pengkategorisasian antar strata sosial dalam masyarakat, kelas atas, menengah dan kelas bawah yang masing-masing kriteria tergantung pada kebudayaan yang dipedomani oleh masyarakat yang bersangkutan.

Sudah tentu dalam melakukan interaksi sosial, manusia akan menampakkan identitasnya atau jatidirinya sebagai seorang anggota kelompok sosial tertentu, sehingga dengan adanya jatidiri tersebut orang yang berinteraksi tersebut dapat dengan mudah untuk beradaptasi serta memberikan gambaran apa yang akan diutarakan dalam interaksi yang bersangkutan. Salah satu jatidiri dari kelompok sosial adalah adanya mitologi yang menyelimuti dirinya, dan dari mitologi dipakai sebagai usaha untuk mencari jatidiri asal muasal dari kelompok sosial yang bersangkutan. Jatidiri kelompok sosial dipengaruhi oleh adanya mitos-mitos yang ada di kelompok tersebut. Akan tetapi tidak hanya memberikan sejarah asal mula kelompok sosial mitos tersebut digunakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang ada. Sehingga dengan adanya mitologi akan memberi makna tersendiri bagi sebuah adat istiadat suatu kelompok sosial.

Misalnya saja ketika seorang dari sukubangsa Batak dan seorang dari sukubangsa Jawa berinteraksi. Kedua orang tersebut mempunyai status yang sama dalam konteks nasional sebagai pengajar, maka otomatis kedua orang tersebut menggunakan aturan nasional dalam mewujudkan tindakannya, seperti mengajar, member nilai, menguji dan seterusnya sesuai dengan aturan nasional apabila seseorang mempunyai status sebagai pengajar. Misalnya saja kedua orang tersebut kebetulan mengajar mata pelajaran yang sama.

Dalam proses mewujudkan tindakannya mengajar, maka akan tampak perbedaan gaya bicara, gaya tubuh, cara berpakaian dan juga logat bicara, walaupun sama-sama menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sama (bahasa Indonesia). Gaya bicara, logat bahasa Indonesianya bisa menjadi ciri dari gaya orang dari golongan sosial tertentu misalnya yang dari Jawa akan *medok*, atau yang dari Batak akan berciri lantang dan seterusnya. Perbedaan ini menjadi ciri khas dari masing-masing golongan sosial sehingga bisa menjadi stereotip. Stereotip dalam konteks ini dimaknai sebagai anggapan seseorang dari kelompok tertentu terhadap seseorang dari kelompok lain dalam interaksi sosial yang didasari dari tingkah laku yang diwujudkan atau terwujud dalam interaksi.



Kebudayaan dalam tulisan ini dimaknai sebagai sebuah perangkat nilai, pengetahuan, norma dan aturan yang digunakan oleh manusia untuk menanggapi lingkungannya dan digunakan untuk mendorong terwujudnya tingkah laku serta menciptakan benda-benda yang digunakan sehari-hari. Pengetahuan ini disosialisasikan ke generasi berikutnya dan bahkan ke golongan sosial lain.

Di sini dapat digambarkan bahwa kebudayaan dapat dibagi menjadi tiga wujud: wujud pengetahuan, wujud tingkah laku dan wujud benda-benda. Dalam proses kebudayaan, tentunya dari konsep yang digunakan ini pengaruh lingkungan memegang peranan penting dan ini terlihat bagaimana kelompok orang tertentu memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai kebutuhan biologi, kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologi. Ketiga kebutuhan tersebut pada dasarnya sudah merupakan kebutuhan kodrati sebagai manusia. Pemenuhan kebutuhan hidup ini akan mengalami perbedaan ketika cara mengatasi ketiga kebutuhan ini serta lingkungan yang dihadapinya menggunakan kebudayaannya sebagai ciri yang kontekstual.

Dalam tulisan ini digambarkan sebuah masyarakat dengan kebudayaan bahari yang melingkupinya. Disini masyarakat nelayan dimaknai sebagai komunitas nelayan dengan tempat tinggal yang menetap sehingga terlihat jelas penguasaan wilayah tempat tinggal serta teritorial areal penangkapan ikan, segala pranata sosial lainnya seperti keyakinan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya akan terkait dengan model dari pola mata pencaharian nelayan seperti keyakinan-keyakinan akan makhluk supranatural yang berkaitan dengan laut, teknologi laut dan sistem kekerabatan dalam pengelolaan bahari (siapa yang bertanggung jawab dalam organisasi sosial masyarakatnya), simbol-simbol bahasa dalam menunjuk benda-benda yang ada di lingkungannya, serta bentuk-bentuk kesenian yang muncul. Semua masyarakat dengan kebudayaan baharinya tentu akan menanggapi lingkungan baharinya sesuai dengan kebudayaan yang didukungnya seperti bahasa, keyakinan, sistem organisasi sosialnya, teknologi, bentuk mata pencaharian serta kekerabatan.

Seperti halnya masyarakat kebudayaan lainnya, akibat dari adanya interaksi sosial dengan budaya lainnya dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya yang ada. Adanya interaksi sosial berarti terjadinya tukar-menukar pengetahuan masyarakat khususnya kebudayaan yang mengatur tingkah lakunya. Perubahan kebudayaan berarti adanya perubahan pengetahuan, norma, aturan dan nilai yang ada yang kemudian akan terwujud pada perubahan sosial atau perubahan tingkah laku. Aspek apa yang paling mudah untuk berubah menyebabkan perubahan fungsi pada aspek lainnya dalam sistem kebudayaan.

Pembahasan Masyarakat Bahari

Di Indonesia, seperti yang telah disebutkan di atas, beberapa sukubangsa mempunyai wilayah bahari dan juga wilayah pegunungan serta bentuk wilayah lainnya (kota, rawa, padang rumput dst). Sehingga secara analitik antara sukubangsa dan kebudayaan serta wilayah hunian akan tampak adanya perbedaan-perbedaan yang mencolok, misalnya antara nelayan Sunda dan nelayan Ambon. Atau pola hidup yang berkaitan dengan kebudayaan dengan kesukubangsaan. Satu sukubangsa bisa saja mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda ketika wilayah sukubangsa tersebut mencakup lingkungan yang berbeda, misalnya satu sukubangsa tertentu mempunyai wilayah pegunungan dan bahari (pantai) sehingga bisa terdapat bentuk masyarakat yang petani dan bahari, walaupun kedua masyarakat tersebut berada dalam kelompok sukubangsa yang sama.

Banyak sukubangsa yang mempunyai kewilayahan berada di lingkungan bahari. Walaupun secara umum mempunyai satu kesamaan ketergantungan dengan lingkungan bahari, akan tetapi tradisi kebahariannya akan berbeda-beda, dan ini sangat bergantung pada latar belakang sukubangsa apa. Misalnya antara nelayan sukubangsa Jawa dengan nelayan sukubangsa Sunda, dan juga Bugis, Melayu dan seterusnya.

Pada umumnya, kehidupan sosial ekonomi masyarakat bahari dapat dikatakan sangatlah sederhana dan bahkan cenderung mengarah kepada miskin. Orientasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat bahari pada masa sekarang lebih banyak didominasi oleh adanya permintaan dari masyarakat industri barang jasa atau masyarakat perkotaan, sehingga lambat laun atau cepat tradisi masyarakat bahari akan mengalami perubahan. Proses perubahan tradisi bahari ini memang tidak akan lepas dari pengaruh masyarakat dari luar.

Budaya bahari pada dasarnya akan mengalami perubahan dari kondisi tradisional menuju ke kondisi “modern” dengan usaha lebih ke arah modernisasi. Masing-masing masyarakat bahari tentunya mempunyai sistem sosial yang sangat spesifik berdasar pada sukubangsa tertentu. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat lain (kota) maka bisa membuat hilangnya tradisi yang didasarkan pada sukubangsa tertentu berganti dengan modernisasi guna memenuhi permintaan pasar.

Tradisi bahari masyarakat sukubangsa tentunya akan mengarah pada fungsi-fungsi dari kebudayaan secara keseluruhan, seperti adanya sistem religi, ekonomi, pengetahuan, bahasa, seni, kekerabatan dan teknologi tertentu. Dengan adanya desakan kepentingan ekonomi lainnya dari luar maka fungsi-fungsi dalam tradisi bahari akan mengalami pergeseran dan bahkan perubahan yang sangat berarti.

Di samping itu masing-masing masyarakat bahari mempunyai perjalanan sejarah pengaruh budaya tertentu sehingga menjadi sebuah tradisi yang ada sekarang. Perjalanan sejarah dari budaya bahari di suatu wilayah tidak lepas dari pengaruh-pengaruh budaya lainnya yang pernah datang dan hidup di masyarakat tertentu. Kebudayaan lain yang pernah singgah di masyarakat menjadi aspek yang penting dalam perjalanan budaya bahari suatu masyarakat. Oleh karena itu kajian budaya bahari tidak bisa lepas dari aspek sejarah.

Pengkajian budaya bahari akhirnya memerlukan kajian yang bersifat menyeluruh secara diakronis dan juga sinkronis. Artinya bahwa budaya masyarakat bahari tentunya mempunyai sejarah yang panjang sehingga menjadi sebuah budaya sekarang, begitu juga satu aspek kegiatan mata pencaharian yang berkaitan dengan bahari tentunya juga berkaitan dengan unsur-unsur lain dalam elemen kebudayaan yang ada, seperti bagaimana sistem religi dari masyarakat tersebut yang berkaitan dengan pelayaran, bagaimana teknologi nelayannya, bagaimana sistem bahasa, seni dan juga pengetahuan dan kekerabatan yang ada sangat mempengaruhi dan fungsional satu aspek dengan aspek lainnya.

Pendekatan yang menyeluruh menjadi sangat diperlukan bagi berfungsinya budaya bahari dalam satu kewilayahan, sehingga akan tampak keunikan, kespesifikan masing-masing budaya yang didasari pada masing-masing sukubangsa yang berbeda.

Kesimpulan

Sebagai bangsa yang berdiam dalam wilayah kepulauan, maka budaya bahari menjadi unsur yang paling menonjol dalam identitas bangsa Indonesia. Bangsa maritim yang menjadi julukan bagi bangsa Indonesia menjadi sebuah identitas yang tentunya diikuti oleh budaya bahari yang dianutnya. Disamping menjadi masyarakat yang bahari, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai sukubangsa juga turut mewarnai aneka ragam tingkah laku bahari yang ada.

Seperti diketahui dalam konteks perubahan kebudayaan, perubahan masyarakat atau kebudayaan masyarakat Indonesia lebih banyak dipengaruhi dari kondisi hubungan sosial antar masyarakat bahari. Seperti adanya system perdagangan antar masyarakat, antar bangsa yang bisa dan dalam kenyataannya terjadinya percampuran dalam sistem keyakinan. Kita tidak dapat pungkiri adanya pengaruh ajaran Hindu dan Buddha, serta agama samawi seperti Kristen dan Islam banyak melalui budaya bahari yang ada di Indonesia.

Dengan adanya keberbedaan sukubangsa yang sangat tinggi, maka otomatis budaya bahari yang ada di seluruh Indonesia akan menunjukkan perbedaan cara, tingkah laku, karakteristik dari anggota masyarakatnya. Walaupun sama-sama berbudaya bahari, tetapi karena didasari pada sukubangsa yang berbeda, maka tradisinya juga mencirikan keberbedaan. Bagaimana hubungan antara satu kelompok masyarakat bahari dengan kelompok masyarakat bahari lainnya dari daerah lain bahkan dari mancanegara yang pernah singgah di masyarakat menjadikan keunikan pembentuk budaya bahari yang ada. Oleh karena itu sejarah masyarakat bahari serta fungsi dari kebahariannya pada masyarakat lainnya patut mendapatkan perhatian secara menyeluruh. Budaya bahari sebagai jatidiri bangsa Indonesia perlu diperhatikan secara menyeluruh (holistik).

***Penulis adalah pengajar pada Sekolah Bisnis Manajemen
Institut Teknologi Bandung***



MITOLOGI TENTANG DUNIA (LAUT) dan MEMAHAMI NILAI-NILAI PENGIKAT KENUSANTARAN

I Ketut Ardhana

Abstrak

Setiap masyarakat memiliki pemahaman tentang mitologi meskipun itu dipercaya dan kadang-kadang tidak. Akan tetapi dalam kenyataannya, mitos itu memiliki makna nyata dan tidak nyata (*real and unreal*). Kebenaran tentang mitos itu sangat tergantung pada latar belakang pemikiran, persepsi atau pengalaman yang pernah dialaminya. Meskipun demikian, ini sangat tergantung dari tingkat pemahaman masyarakat tentang apa yang diyakini sebagai kebenaran itu, baik dilihat dari unsur animisme yang ada atau kepercayaan pada benda, berkembang menjadi apa yang ada dibalik unsur benda, sampai ke tingkat pemahaman yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ini sangat tergantung dari jiwa jaman yang berkembang (*zeitgeist*) yang kadang-kadang digunakan untuk melegitimasi kepercayaan pada mitos itu, atau bahkan sebaliknya adanya pemahaman tentang demitologisasi, melepaskan dari apa yang disebut mitos itu.

Pertanyaan muncul sekitar masalah pertama, apa yang dimaksud dengan mitos? Kedua, bagaimana mitos itu mestinya dimaknai, dan ketiga apakah masih relevan berbicara mitos dalam kaitannya dengan pemahaman nilai-nilai pengikat kenusantaraan dalam proses globalisasi ini.



* Makalah Seminar Hari Nusantara, "Membangkitkan Wawasan Budaya Melalui Peningkatan Peran SDM dan Iptek" yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Denpasar, Bali pada Rabu, 28 November 2012.

Ini adalah beberapa pertanyaan yang akan dilihat dalam upaya memahami secara lebih baik tentang mitologi dunia (laut) dalam memahami nilai-nilai pengikat kenusantaraan dewasa ini.

Kata kunci: mitologi, pandangan tentang dunia (laut), agama tirtha, kenusantaraan dan globalisasi.

Pendahuluan

Mitos adalah suatu yang nyata (*real*) dan tidak nyata (*unreal*). Di satu pihak, mitos itu dikatakan nyata, karena pada dasarnya dianggap ada dan dipercaya sebagai sesuatu yang nyata ada dan diyakini keberadaannya oleh masyarakat dimana mitos itu hidup. Di pihak yang lainnya, ada anggapan bahwa mitos itu tidak nyata, karena sulit dibuktikan kebenarannya di masyarakat. Kontroversi pendapat tentang makna mitos ini adalah sebagai sesuatu yang biasa terjadi di masyarakat. Namun perlu dicatat, bahwa semakin tradisional sistem kehidupan masyarakat itu, maka peluang untuk memaknai tentang mitos semakin besar mendapat tempat di hati masyarakat. Ini bisa dimengerti karena pada masyarakat yang kehidupan masih tradisional adalah sebuah masyarakat yang secara geografis jauh dari pusat perkembangan dalam konteks modernisasi. Masyarakat tradisional seperti ini biasanya masyarakat yang berada jauh di pedalaman, bersifat agak tertutup, diwarnai kehidupan yang statis. Akan tetapi, tidak dapat disamaratakan bahwa mitos hanya ada pada masyarakat pedalaman atau perkotaan saja, karena pada masyarakat pesisir (laut) pun juga memiliki pemahaman tentang mitosnya sendiri, meskipun masyarakat yang tinggal di pantai ini lebih bersifat terbuka dibandingkan dengan masyarakat yang menghuni wilayah pedalaman. Dalam kaitan ini, bukan persoalan mitos itu benar atau tidak, tetapi bagaimana mitos sebagai sebuah metode pembelajaran amat penting dilakukan, sehingga nilai-nilai tentang makna sebuah pengalaman di sebuah masyarakat menjadi bermakna dilihat dalam konteks pembelajaran akan nilai-nilai karakter sukubangsa-sukubangsa di Indonesia.

Pada masyarakat modern yang umumnya berada di wilayah perkotaan dekat dengan pantai, kecuali di pantai selatan Yogya ini seperti di pantai utara Jawa dari mana pembaharuan itu datang, nilai-nilai kebaruan muncul tampak lebih bersifat terbuka dan dinamis, dimana rasionalitas sudah semakin berkembang. Apabila dilihat perkembangannya tampak bahwa kedua tipe masyarakat ini, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern memberikan reaksi yang berbeda terhadap pengaruh yang berasal dari luar itu.

Pada masyarakat yang tradisional, yang umumnya masyarakatnya lebih homogen, seringkali tampak bahwa pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar sebagai "ancaman" yang dapat mengganggu keberadaannya. Untuk itu, tidak mengherankan apabila setiap pembaharu-

an yang datang ditolaknyanya, dan menganggap bahwa apa yang sudah dimilikinya itu sebagai sesuatu yang harus dilestarikan dan menolak sesuatu yang datang dari luar yang dapat membawa ketidakmapanaan pada masyarakatnya. Pada masyarakat modern yang karakteristik masyarakatnya lebih bercorak heterogen tampak tidak terlalu mengabaikan pengaruh yang berasal dari luar, bahkan terlihat bagaimana pengaruh-pengaruh yang datang dari luar tidak dianggap sebagai “ancaman” malahan sebagai tantangan yang harus dihadapi sehingga dapat memperkaya khazanah budaya masyarakat yang dimilikinya itu.

Terlepas dari persoalan perbedaan yang ada itu, dalam makalah ini akan disoroti bagaimana mitos itu memiliki makna pada kehidupan masyarakat sehingga dipelihara, sementara akan dilihat pula mengapa terjadi demitologisasi dimana mitos itu ditinggalkan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya dan mitologisasi penciptaan mitos dalam kepentingan untuk mengangkat sebagai sebuah metode belajar dalam kaitannya dengan pengembangan karakter bangsa dalam konteks kenusantaraan. Untuk itu, dalam makalah ini akan dibahas beberapa persoalan sekitar pertama, apa yang terkandung dalam mitos? Kedua bagaimana mitos itu berkembang dalam masyarakat? Dan ketiga, makna apa yang terkandung dalam mitos sehingga dapat eksis dan berkembang bagi masyarakat pendukungnya dalam kaitannya dengan ikatan-ikatan kenusantaraan. Dengan pembahasan ketiga masalah ini diharapkan memahami lebih baik tentang bentuk, fungsi dan makna mitos dalam konteks kenusantaraan yang berkembang di masyarakat dewasa ini dan masa yang akan datang.

Makna Mitos

Mitos yang ada di masyarakat seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diyakini kebenarannya. Anggapan ini berlaku pada masyarakat yang tidak lagi berkiblat ke hal-hal yang berlandaskan tradisi atau kepercayaan-kepercayaan yang ada di masyarakat. Ini bisa dimengerti, ketika mitos dianggap tidak bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi mereka (istilah Balinya *anak mula keto*, artinya memang demikian adanya dan tidak usah dipertanyakan lagi, karena itu adalah sesuatu yang dianggap tabu). Oleh karena itu, segala hal yang berlandaskan pada tradisi yang tidak bisa memberikan kebenaran yang nyata dianggap sama dengan mitos. Berbeda dengan masyarakat yang masih berlandaskan pada tradisi setempat, dimana mereka menganggap mitos memberikan nilai-nilai panutan yang bisa dikembangkan, sehingga dapat dijadikan teladan bagi masyarakat pendukungnya. Pada masyarakat seperti ini tidak sulit para pimpinan adat di sebuah masyarakat menggerakkan perintahnya, sehingga sesuatu berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati, tanpa terlalu sulit menata kehidupannya.

Ada beberapa pertanyaan mengapa mitos itu muncul dan diciptakan? Siapa yang menciptakan mitos itu dan apa maksud penciptaan mitos itu. Unsur-unsur apa yang berpengaruh terhadap terbentuknya mitos? Mengapa di satu pihak, ada mitos yang dipertahankan oleh

masyarakatnya dan di pihak yang lainnya, mengapa mitos itu ditinggalkan secara perlahan-lahan? Dalam menghadapi arus globalisasi ini apakah masih relevan untuk mempertahankan atau bahkan menciptakan mitos? Dan, apa makna mitos itu dalam kehidupan masyarakat yang berubah dalam konteks globalisasi? Dengan kata lain, apa mungkin menciptakan mitos dalam kehidupan modern dan apa maksudnya. Inilah beberapa pertanyaan yang akan dibahas untuk memahami makna mitos dalam kaitannya dengan kenusantaraan di era globalisasi ini.

Tidak diketahui secara pasti kapan sebuah mitos diciptakan. Apa juga maksud sebenarnya untuk menciptakan mitos itu. Mungkin saja, mitos itu sudah ada sejak jaman prasejarah, yaitu sebelum manusia mengenal tradisi tulisan. Menurut bukti-bukti arkeologis yang ada di Bali dikatakan bahwa terdapat beberapa catatan tentang kelompok-kelompok manusia yang menghuni Bali di masa lalu yaitu sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Ardika (2004, 1--9) menginterpretasikan bahwa kehidupan manusia dan kebudayaan Bali itu sebenarnya sudah berlangsung sejak 2000 tahun yang lalu. Kelompok manusia dengan ciri-ciri Mongoloid ini ditemukan di beberapa situs di Bali, di antaranya Gilimanuk, Cangcang, Beng, Sembiran, dan Bondalem. Ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya alat-alat batu paleolitik di Sembrian dan Trunyan yang terletak di wilayah Bali bagian timur. Didasari atas temuan dan adanya kesamaan tipologi artefak batu di daerah itu dengan penemuan artefak yang jenisnya yang menunjukkan kesamaan seperti yang ditemukan di Pacitan yang terletak di kawasan Jawa Timur, maka diperkirakan bahwa temuan itu berasal dari masa plestosen. Ada indikasi kuat bahwa dengan ditemukannya peninggalan arkeologis itu dapat dilihat adanya gambaran mengenai keterkaitan antara wilayah-wilayah yang disebutkan tersebut yaitu antara Jawa Timur dan Bali misalnya.

Untuk masyarakat di wilayah daratan atau pedalaman misalnya, kita bisa mengambil contoh yang menarik akan tradisi mengayau yang dimiliki etnis Dayak di Kalimantan. Ini bisa terjadi, ketika kita membayangkan bagaimana kehidupan manusia yang diwarnai oleh adanya perang suku antara etnis yang satu dengan etnis yang lain. Pada masyarakat yang masih menghuni wilayah pedalaman tampaknya mitos seperti ini masih berkembang subur. Meskipun demikian, ketika proses religiusitas berlangsung oleh agama-agama baru tampaknya berpengaruh terhadap eksistensi mitos di sebuah wilayah. Dari temuan-temuan itu dinyatakan bahwa sebelum pengaruh agama-agama besar, misalnya dapat dilihat bahwa sebelum terjadinya Indianisasi atau Hinduisasi memang sudah eksis pada perkembangan kebudayaan awal di daerah ini. Misalnya saja adanya orang yang mempraktekkan upacara pemujaan nenek moyang yang sangat tergantung pada agama lokal. Kepercayaan akan kekuatan di luar diri manusia sangat berkembang yaitu kepercayaan ketakutan akan alam, seperti sungai, gunung, pohon dan sebagainya. Selanjutnya muncullah kepercayaan akan jiwa yang ada pada alam itu sendiri, bahwa gunung memiliki jiwa, pohon memiliki jiwa dan seterusnya. Itulah sebabnya pula mengapa pada akhirnya kekuatan pada diri manusia, seperti kepercayaan tentang dewa-dewa dibawa dengan kaitannya pada masalah-masalah pertanian. Masyarakat pun mulai membangun tempat-tempat suci di pegunungan atau tempat yang dianggap suci. Pada kebudayaan Bali sebelum Hindu ini telah muncul suatu kebudayaan yang didasari

pada tradisi penanaman padi dan juga hukum-hukum kebiasaan adat yang tinggi. Hukum tersebut tidak hanya menyangkut masalah perkawinan dan hukum keluarga, tetapi juga sudah menyentuh masalah hubungan pemilikan atas tanah dan sistem migrasi yang cukup kompleks (Villiers 1993, 44). Pertanian padi basah ini telah mengarah pada terbentuknya masyarakat hunian yang sifatnya menetap dan bentukan organisasi sosial yang cukup tinggi. Dengan demikian ini mengakhiri kehidupan ekonomi yang sifatnya subsisten yang kemudian mengarah pada terbentuknya pembagian kerja yaitu dengan munculnya kelompok petani, pengrajin, pedagang, nelayan dan sebagainya. Semuanya ini akhirnya mengarah pada terbentuknya bantuan-bantuan kepada tetangga dalam bentuk tolong-menolong dari keluarga inti, yang akhirnya membentuk dewan-dewan persekutuan yang mengurus masalah yang sifatnya komunal. Tatanan ini juga mengatur sistem pengairan, tanah komunal dan mengatur kerja-kerja sosial.

Meskipun ada pengaruh agama, tidak semua mitos lenyap begitu saja. Bahkan dalam kehidupan sekarang tampak mitos itu masih dipercaya kebenarannya. Mitos itu pulalah yang menjadi nilai-nilai yang tetap dipertahankan keberlangsungannya dengan tujuan mengikat warganya untuk saling menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga dapat melegitimasi kekuasaannya. Dengan alasan ini pulalah mitos seperti ini diciptakan. Kita masih bisa menyaksikan bahwa di setiap kepala suku yang nenek moyangnya sebagai penguasa yang secara terus menerus memperoleh kemenangan, di rumah keturunannya masih dipasang tanduk kerbau di depan rumah mereka sebagai simbol jiwa ksatria untuk bisa dipercaya dan dilegitimasi posisinya sebagai pemimpin atau kepala adat. Ada yang mengatakan bahwa mungkin saja dahulu yang dipasang adalah hasil jarahan kepala-kepala manusia yang kalah perang akibat berlangsungnya perang suku sebagai simbol bahwa mereka memperoleh kemenangan. Karena perjalanan waktu, tengkorak kepala-kepala manusia itu diganti dengan tengkorak kepala-kepala kerbau. Semakin tinggi tingkatan sosial para pemimpin adat, maka semakin tinggi pula tengkorak kepala kerbau yang dimilikinya. Tampaknya ada mitos yang berkembang bahwa semakin banyak tengkorak yang dimiliki, maka semakin sakti si penghuni rumah itu. Orang yang hidup pada masa sekarang mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah mitos karena tidak dapat dibuktikan.

Namun, perlu dicatat bahwa terbentuknya mitos itu bukanlah sesuatu yang tidak benar. Akan tetapi, seseorang memiliki tumpukan tengkorak kepala diperoleh melalui perjuangan berat yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Bukti kehebatan perjuangan memimpin perang tentu tidak disangsikan lagi. Namun, keturunan mereka sekarang mungkin tidak sehebat moyangnya dahulu. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa mitos itu terbentuk karena akumulasi kekuatan yang dimiliki seseorang sehingga disebut sakti, berkuasa dan sebagainya. Oleh karena itu, selanjutnya mereka tidak hanya sekedar percaya akan kebenaran bahwa benda-benda itu sendiri yang dianggap sakti, melainkan di balik benda-benda itu. Pada masyarakat yang percaya akan animisme dan dinamisme muncul anggapan bahwa ada kepercayaan akan kesaktian matahari sebagai dewa matahari. Sebagaimana diketahui bahwa ada dua pengaruh kebudayaan Asia yang secara kuat berpengaruh di Asia Tenggara pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya yaitu kebudayaan India dan Tiongkok. Ini berarti pula bahwa pengaruh India di Asia Tenggara tidak mempunyai pengertian yang dikaitkan dengan kepentingan politik.

Oleh karena itu proses Indianisasi atau Hinduisasi yang dilakukan dapat disampaikan secara damai (Villiers 1993). Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi dasar toleransi dan pengedepanan sikap harmoni terhadap paham-paham keagamaan dan kedatangan aneka ragam etnis di Bali di masa-masa selanjutnya.

Hal ini bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari di masyarakat dalam aspek sosial dan budaya. Pengaruh Hindu atau India bisa dilihat sampai sekarang di Bali sebagai sebuah mozaik Hindu di Asia Tenggara, dimana penyebutan nama lokal ini banyak dikenal dalam masyarakat. Di masa lalu, pengaruh India itu tidak secara langsung yang mana berbeda dengan pengaruh Tiongkok yang memberikan upeti kepada kaisar-kaisar Tiongkok (Lansing 1983, 410). Menurut ajaran Hindu (Brahmā) jagad raya terdiri atas sebuah benua pusat berbentuk lingkaran yang bernama *Jambudwīpa* (Geldern 1956, 2). Benua ini dikelilingi oleh tujuh samudra dan tujuh daratan. Seluruhnya dibatasi oleh rangkaian pegunungan yang tinggi. Di tengah-tengah *Jambudwīpa* berdiri Gunung Meru sebagai pusat jagad raya. Matahari, bulan, dan bintang-bintang bergerak mengelilingi Gunung Meru itu. Di puncak gunung Meru terdapat kota dewa-dewa yang dikelilingi oleh tempat tinggal delapan dewa penjaga mata angin (Lokapāla). Ketika pengaruh Hindu mulai tampak pada awal abad pertama Masehi, mulai dirasakan adanya penamaan sesuai dengan perkembangan kebudayaan India di wilayah-wilayah yang disentuh Indianisasi itu. Demikianlah penciptaan mitologi yang erat kaitannya dengan penyebaran atau Hinduisasi yang berlangsung di masing-masing masyarakat lokal tersebut.

Gambaran jagad raya menurut ajaran Buddha agak berbeda dengan Hindu. Tetapi pada dasarnya mempunyai persamaan, yaitu bahwa pusat jagad raya tetap Gunung Meru. Gunung ini dikelilingi oleh tujuh samudra dan tujuh benua. Di luar rangkaian pegunungan yang ketujuh terdapat samudra yang melingkar, dan di sini terdapat empat benua yang terletak di empat penjuru arah mata angin. Benua yang terletak di sebelah selatan disebut *Jambudwīpa*, tempat tinggal umat manusia. Keseluruhannya itu dilingkari oleh rangkaian pegunungan yang tinggi yang disebut *Cakrawāla*. Di puncak Gunung Meru terdapat surga 33 dewa dengan kota *Sudarçana*, dimana dewa Indra bersemayam sebagai raja sekaligus dewa. Di lereng Meru terdapat surga yang terendah, tempat tinggal Catur Lokapāla (empat dewa penjaga arah mata angin). Di atas surga para dewa masih ada lagi surga-surga yang lain, yang jumlahnya berbeda-beda dalam berbagai sumber. Pada umumnya disebut 24 surga (Geldern 1956, 2).

Pada aliran Waisnawa dewa yang dipunya adalah Wisnu, sedangkan pada aliran Siwa dewa yang utama dipuja adalah Siwa. Misalnya saja bagaimana konsep-konsep lokal dicoba diperkaya dengan konsep yang berasal dari India atau dari Tiongkok. Sebagaimana diketahui bahwa kedua negara ini tidak pernah menjajah negeri tetangganya. Bahkan Tiongkok menganggap negeri tetangganya sebagai *Nan Yang* yang artinya “negeri selatan”. Dapat dikatakan bahwa pengaruh budaya India sangat dominan terjadi di Asia Tenggara. Sebagaimana dengan kepercayaan lokal bahwa arah gunung dianggap sebagai arah yang suci, tempat para dewa dan ketika Hindu menyebar semakin

luas maka konsep ini semakin berkembang kuat di masyarakat. Dapat dikatakan bahwa konsep kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos adalah mirip dengan konsep yang terjadi di India.

Usana Bali dan *Babad Pasek* sebagai sumber tradisional Bali pada masa pra-Majapahit menyebutkan tentang kepercayaan dan agama Bali. Ada sebuah mitos yang menceritakan tentang gunung atau Gunung Mahameru yang dibawa dari India dan sampai ke Bali (lihat juga Wisseman 1986). Dengan kata lain, ini berarti bahwa bagaimana elemen kebudayaan India telah diserap dan disesuaikan dengan kebudayaan Bali dan menjadi kebudayaan Bali atau dalam proses yang disebut Balinisasi. Tampak elemen budaya India juga memperkuat elemen kebudayaan Bali sehingga konteks identitas Bali menjadi kuat. Dapat dikatakan bahwa ritual tertentu yang ada sebelum masuknya Hindu yang ada pada kebudayaan megalitik juga berlanjut dalam kaitannya dengan pembangunan candi-candi Hindu di Bali (Ardhana 1993; lihat juga Ardhana 2011). Oleh karena itu, di sini tampak adanya ciri-ciri yang bersifat demokratis pada kelompok masyarakat yang terbentuk itu. Ada kecenderungan bahwa kelompok keluarga yang menang (*man of prowess*), mencoba membentuk secara perlahan-lahan suatu kelompok aristokrasi di pedesaan. Selanjutnya perkembangannya mengarah terbentuknya sebuah monarki atau kerajaan melalui lembaga-lembaga demokratis dan pengenalan kepercayaan animisme. Hal ini tentu tidak dapat lepas dari munculnya kepercayaan akan adanya roh baik dan roh jahat sebagaimana orang menganggapnya adanya roh-roh pada tanah, gunung, dan sungai. Pengenalan mitologi seperti itu mencerminkan adanya pengalaman kehidupan manusia. Ini merembet pada hubungan antara manusia dan alam dalam kaitannya dengan upaya menjaga hubungan harmonis antara penduduk dataran rendah dengan pegunungan dan dualisme-dualisme yang lainnya. Sikap atau perilaku toleransi terhadap kelompok penduduk yang berasal dari kawasan lainnya akhirnya menjadi sikap toleransi tidak hanya sesama etnis, tetapi juga dengan etnis yang lain untuk dapat hidup secara berdampingan.

Ini tentu sangat penting melihat proses sejarah dan migrasi yang terjadi pada awal perkembangan kebudayaan Bali, yang mana pengaruh-pengaruh luar membawa nilai-nilai baru yang berdampak terhadap kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik masyarakat Bali. Akan tetapi, kapan terjadi perluasan migrasi kebudayaan luar itu seperti kebudayaan India ke Asia Tenggara, Indonesia pada umumnya, atau ke Bali pada khususnya. Proses ini tampaknya belum banyak diketahui dan masih diperdebatkan. Pada umumnya diketahui bahwa beberapa pengenalan paham atau gagasan dari India, seperti prinsip astrologi atau kosmologi yang memiliki awal perkembangan di Timur Dekat sudah mencapai wilayah India barat laut dalam pertengahan abad III Masehi. Dasar-dasar kepercayaan itu menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia di Bali. Misalnya saja, satu dasar dari prinsip astrologi adalah bahwa manusia secara tetap berada di bawah kekuatan-kekuatan yang sangat beragam, yang dilihat dari arah mata angin, posisi planet-planet, dan bintang-bintang. Mereka percaya bahwa kekuatan ini dapat mempengaruhi keadaan kesehatan, sepanjang seseorang memahami untuk menjaga keseimbangan antara diri manusia sendiri dan alam. Mereka berangkat dari pengertian suatu harmoni dalam prinsip yang lainnya sebagaimana halnya dalam

astrologi. Pengertian harmoni ini tampaknya terus dikembangkan di masa-masa selanjutnya. Dengan demikian makrokosmos dan mikrokosmos memperlihatkan kesejajaran, oleh karena itu berada dalam hubungan yang harmonis.

Heine-Gelden (1956, 1) mencatat bahwa pemahaman ajaran ini menyebar ke Asia Tenggara, misalnya ke Jawa pada abad-abad pertama masehi. Perkembangan peradaban India di Asia Tenggara, bukanlah sebuah produk paksaan ekspansi di wilayah ini. Ini dapat dilihat bagaimana penduduk lokal yang masih bertahan hingga sekarang dari pengaruh-pengaruh luar itu. Dengan adanya penduduk Bali yang tertua itu maka mereka menyebutnya dengan Bali Age. Daerah jantung Bali Age terletak di Bali Timur dan Bali Utara umumnya berlokasi di daerah pesisir danau-danau. Menurut orang Bali kata "age" berarti "gunung". Dengan demikian masyarakat Bali Age adalah penduduk asli yang dapat mempertahankan budaya pemujaan nenek moyang Bali lama yang mana tidak terdapat di wilayah-wilayah bagian Bali Selatan, seperti Badung, Gianyar, dan Klungkung. Masyarakat Bali Age ini telah mempertahankan tradisi budaya mereka di desa-desa seperti Trunyan dan Tenganan, yang masih berasal sebelum masa Hindu dan dengan demikian tidak terpengaruh oleh elemen-elemen Hindu. Mereka menghuni puncak-puncak pegunungan yang mengitari mereka dan berkuasa penguasa-penguasa lama, yang sejak masa yang cukup lama menetap di sana. Dapat dikatakan bahwa hal itu terjadi lama sebelum kerajaan Majapahit di Jawa Timur mempengaruhi pulau Bali dengan elemen-elemen budaya yang tinggi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat kasta (catur warna) pada Bali asli tersebut.

Kebudayaan Bali sebelum datangnya pengaruh kebudayaan India atau Hindu (lihat: Mabbett 1977), telah mengenal sistem hukum adat tentang perkawinan dan kepemilikan tanah (Villiers 1993, 44). Sistem ini telah mengatur kerja sosial dalam konteks yang demokratis. Namun demikian, kelompok yang menang menciptakan otoritas mereka yang dikenal sebagai orang berani itu ke arah munculnya kerajaan dan sistem kepercayaan animisme. Mereka percaya bahwa para dewa tinggal di pohon besar, gunung, hutan, dan laut. Ini menciptakan harmoni yang di Bali disebut dengan *Tri Hita Karana*, yaitu keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia dan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan bagaimana masyarakat lokal menyerap istilah politik India dapat dilihat pada catatan Wolters. Sebagaimana Wolters menunjukkan kepada kita tentang istilah *Orang Berani* yang banyak dikenal di dunia Melayu telah dirubah menjadi istilah *Raja* (kata Sanskerta).



Dapat dikatakan bahwa sebelum diperkenalkannya istilah raja, kekuasaan para tokoh politik adalah di tangan *Orang Berani*. Masyarakat lokal membutuhkan adanya stabilitas dalam kehidupan mereka dan perlunya perlindungan terhadap gangguan keamanan. Mereka bahkan menerima kehadiran raja sebagai simbol dari penyatuan dari negara dimana stabilitas itu ada.

Dari perspektif India atau Hindu, ide kosmologi dan astrologi telah ada di India bagian barat laut sejak abad ke-3 Masehi. Penyebaran dari gagasan India telah terjadi lama di Asia Tenggara. Heine-Geldern (1956, 1) mencatat penyebaran gagasan ini ke Asia Tenggara, ke Jawa pada awal abad Masehi. Gagasan ini tampak sangat signifikan dalam kehidupan orang Bali dewasa ini yang membentuk formasi identitas Bali (Ardhana 2011c). Ide ini dapat berkerja sama dalam konteks kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos. Oleh karena itu, gagasan ini menyebar dan menyatu dengan berbagai mitos yang ada dalam masyarakat lokal dengan cara yang damai (Villiers 1993, 44; Sardesai 1997, 17).

Patung pemujaan dewa India dapat dilihat di Bali dalam bentuk batu, seperti Dewa Surya atau Dewa Matahari. Pada mitos lama orang Bali terdapat empat dewa yang bertugas melindungi arah mata angin dalam bentuk penyembahan kepada Dewa Kosika, Garga, Metri, dan Kurusia. Ini dapat dilihat bagaimana pengaruh Hindu itu memperkuat pemahaman akan pandangan lama orang Bali. Sebagaimana dapat dilihat bagaimana proses Hinduisasi ini memberikan nama-nama baru kepada dewa-dewa tersebut (Gust 1994, 14).

Nama-nama Bali	Nama-nama Hindu/India
Kosika	Iśwara
Garga	Brahmā
Metri	Mahādewa
Kurusia	Wisnu
Pretayala	Śiwa
Centing Kuning	Umā

Ini adalah bukti-bukti bahwa bagaimana pengaruh luar juga memperkuat dan membentuk identitas sebuah suku di Indonesia. Dimana dengan adanya mitos-mitos itu diperkuat dalam kaitannya dengan kepentingan budaya politik di masa-masa selanjutnya.

Mitos dan Nilai-nilai Pengikat Kenusantaraan

Kaitan antara mitos dan paham konsep kenusantaraan atau nasionalisme sangatlah erat. Ini dapat dilihat dari dinamika sejarah di Indonesia, dimana paham akan kecintaan tanah air sebenarnya bermula dari pemahaman akan mitos. Di Sumbawa misalnya ada kepercayaan akan adanya hubungan antara pengaruh Jawa di Bima sebagaimana diuraikan dalam sebuah mitos. Pada masa ketika Luwu masih dihuni oleh makhluk supernatural, kerajaan Bima dipimpin secara berturut-turut oleh tujuh orang raja. Raja kedelapan pergi ke Jawa. Menurut kepercayaan Bima, awal sejarah manusia dimulai oleh raja kesembilan. Raja kesembilan ini adalah Mahārādja Pandudewanata yang memimpin Kahyangan. Raja ini mempunyai lima orang anak, yaitu Darmawangśa, Sang Bima, Sang Dewa, Sang Lula atau Kula, dan Sang Arjuna. Putra tertua tinggal di Kahyangan, sementara yang lainnya mengembara ke Jawa dan menguasai pulau tersebut (Jasper 1908, 67). Sebuah tradisi lokal atau disebut mitos yang menyatakan bahwa Sang Bima dibawa ke daerah Bima oleh seekor burung (Beckerling 1920, 146). Dia kemudian membangun sebuah kerajaan. Masyarakat Bima percaya bahwa Sang Bima merupakan nenek moyang kerajaan Bima. Legitimasi raja-raja Bima juga sesuai dengan asal-usul sebagai keturunan penguasa Jawa.

Sehubungan dengan kepercayaan tersebut, di beberapa wilayah Nusa Tenggara, ditemui juga mitos tentang sosok nāga. Asal usul kepercayaan pada nāga berasal dari India dan menyebar ke banyak wilayah di Asia. Nāga mempunyai makna penting di Tiongkok, Birma, Assam, dan Jawa. Umumnya nāga digambarkan sebagai penguasa alam arwah (Ardhana 2005, 30). Selain itu, tubuhnya membentuk bumi yang subur. Di beberapa daerah di Asia Tenggara, seperti yang dapat ditemukan dalam legenda atau mitos Sang Bima digambarkan bahwa raja menikah dengan seekor nāga (Wolters 1982, 90). Hal ini bisa dilihat sebagai simbol pembauran antara pemujaan terhadap raja—yang berasal dari India—dengan pemujaan masyarakat pribumi terhadap kesuburan. Di Sumbawa Besar, Bima maupun Dompu, hiasan dinding rumah yang disebut “Kepala Ruma” dalam berbagai motif nāga, ornament bentuk kakaktua. Di Sumbawa pemujaan terhadap nāga mempunyai makna yang lebih dalam. Menurut legenda, Bima dari kisah *Mahābharata* suatu kali pergi ke Sumbawa dan mempunyai anak dari seekor nāga yang kelak dinikahi oleh tokoh Sang Bima, pemimpin pertama dari Bima. Di Solor atau Flores terdapat pemujaan terhadap nāga dipraktikkan sebagai perlindungan melawan kekeringan akibat sinar matahari. Di Sikka, pemujaan terhadap nāga juga merupakan ungkapan pemujaan terhadap bulan. Upacara pengorbanan juga dapat ditemukan di Ngada (Flores Tengah). Di Alor patung nāga dari kayu dibakar pada masa peralihan dari agama Kristen, sementara di Timor nāga sebagai obyek pemujaan masih ditemui setelah masuknya agama Kristen.

Pengaruh-pengaruh luar tampaknya memainkan peran signifikan dalam memperkuat pandangan tradisi yang ada di Nusa Tenggara. Ini misalnya terjadi di Sumba dimana dapat dilihat dari gelar-gelar para *tetua adat* atau kepala adat yang menggunakan istilah *rato*, dimana di tempat lain di luar Sumba menggunakan gelar *ratu*, yang tampaknya mendapat pengaruh dari perkembangan bahasa Melayu Kuno

yang menjadi dasar perkembangan bahasa Melayu di kepulauan Nusāntara. Catatan-catatan sejarah menyebutkan bahwa di masa lalu memang ada petunjuk tentang adanya bukti-bukti kesejarahan yang menyebutkan bahwa sekitar abad XIV Sumba di Nusa Tenggara menjadi bagian dari kerajaan Majapait di Jawa. Bahkan dikatakan, bahwa para raja Sumba mendapat gelar dari Majapait seperti *Hundarangga Rumatoka, Takunge, Mbitanguor Kandunu* (Ardhana 2000; Ardhana 2005). Juga disebutkan bahwa masyarakat Sumba percaya para raja mereka berasal dari Jawa dan Bima di Sumbawa. Seorang raja di Sumba misalnya memiliki gelar, *Hanggula Ratu: Jawa-Hangaji Ratu Ndimā* yang tampaknya memiliki kaitan dengan nama-nama di Jawa dan Bima. Ia tidak hanya disebut sebagai *Maramba*, tetapi juga sebagai *Hangaji* (Kapita 1976, 26—27). Ini menunjukkan bahwa kerajaan Hindu Jawa memiliki hubungan dekat dengan raja di Sumba. Tidak dapat diketahui secara pasti, seberapa jauh hubungan itu. Tentu pertanyaan sekitar ini masih perlu diteliti lebih jauh misalnya akan kebenaran tentang pengaruh Hindu Jawa atau memang tradisi yang ada di masyarakat itu tanpa pengaruh tersebut. Namun, tampaknya sedikit banyak ada pengaruh luar yang dapat memperkuat tradisi yang ada. Pengaruh-pengaruh itu tampaknya nanti dapat dilihat dalam konteks terjadinya perbudakan di masyarakat Sumba dalam kaitannya dengan perdagangan budak (Needham 1983).

Penduduk masih menyebut negeri mereka terutama sebelum masuknya Belanda (1866) sebagai '*tana mema*', tanah yang nyata, tanah yang benar, dan kemudian '*tana jawa*', tanah asing. Pembagian ini menandai bagaimana pentingnya perubahan yang terjadi setelah datangnya Belanda (Esser 1877). Tanah Sumba dibagi kabupaten yang sekuler (*secular districts*). Di bawahnya terdapat '*onderafdeeling*' yang diartikan meningkatkan kekuatan pada pemburu di Sumba. Desa tradisional, '*kampung adat*', terletak di bukit yang dilingkari *fences*, yang telah disiapkan untuk mempertahankan diri dari musuh penyerang. Kemudian untuk memudahkan mengatur administrasi, Belanda mendukung pembangunan desa-desa baru sepanjang jalan, disebut desa kebun '*garden villages*'. Desa ini berarti juga pusat-pusat suci dari pusat kehidupan masyarakat yang nenek moyang mereka telah merencanakan. Para *rato* dianggap sebagai pemimpin spiritual yang menikmati masalah ini, tetapi tidak sebagai kepemimpinan yang menyeluruh dari tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian tidak ada air dan darah berarti tidak ada kehidupan. Ini berarti terjadi apa yang disebut suatu rekonsiliasi atau pengampunan dengan Marapu dan dengan yang lain. Lemak darah hewan dan penumpahan ayam yang baik untuk Marapu. Dengan persembahan ini diharapkan bahwa sekitar bulan Mei tanah mereka mulai akan panen hasilnya. Dapat dilihat bagaimana warga desa membawa beras untuk dipersembahkan kepada Marapu. Pendeta Marapu, berada di depan, memimpin orang-orang Marapu yang disajikan sebagai undang-undang (*totem*) dan ditempatkan di tengah desa. Dapat dilihat bagaimana seluruh suku ikut berkumpul bersama sebagai sebuah keluarga. Selain itu, mereka menawarkan beras dan daging untuk dipersembahkan kepada Marapu. Kemudian mereka berbagi makanan satu sama lain sebagai simbol persahabatan dan rekonsiliasi.

Pegawai administrasi Belanda di masa lalu tidaklah memahami cara penyampaian mantra-mantra ritual bukan sebagai '*authoritarian anger*', tetapi sebagai kekerasan dan keagresifan. Mereka tidak mengerti kata-kata meskipun di tengah-tengah desa dengan bahagia mengkomunikasikannya yang dilakukan oleh orang laki-laki, wanita dan anak-anak. Para misionaris dan zending seperti Wielenga (1908) dan Vollenhoven (1934) adalah ahli-ahli pertama yang menduga ada sebuah kekuatan emosional, agama dan moral yang dipergunakan dalam bahasa lokal. Di masa lalu ada keinginan untuk menggunakan bahasa lokal dalam penyebaran agama Kristen dengan menerjemahkan kitab suci untuk pemerintahan Belanda dengan menterjemahkan hukum-hukum lokal. Penghargaannya dan pemahamannya untuk orang lokal pada bukunya *Cultuur als Antwoord*, sebagai edisi dan bahan yang digunakan di sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa lokal dan dan mengerti mantra ritual. Namun, bahan-bahan ini tidak tampak selama masa pendudukan Jepang di awal pendudukannya pada tahun 1942. Setelah tahun 1945 bahasa lokal diingat kembali sebagai bahasa feodalisme, milik penguasa-penguasa sebelumnya dengan struktur sosial yang lama, dimana bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa demokrasi baru. Ini tampaknya menjadi salah satu penyebab mengapa bahasa lokal ditinggalkan oleh sebagian generasi berikutnya¹. Ada implikasi terhadap munculnya kesan bahwa apa yang terkandung dalam bahasa lokal, dalam hal ini tentu ada kaitannya dengan nilai-nilai mitos yang ada dalam masyarakat tampaknya juga berpengaruh. Ada pandangan yang melihat bahwa kepercayaan pada kelokalan terutama pada mitos seringkali dianggap mempercayai sesuatu yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Tentu saja, tidak semua mitos itu tidak memiliki nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan sebuah masyarakat, meskipun jaman sudah berubah.

Meskipun dalam beberapa hal mitos dianggap sebagai tahayul dan tidak nyata, namun kita harus mencermati mitos itu dengan bijak. Bagaimana pun juga para leluhur menciptakan berbagai mitos untuk menciptakan kestabilan, rasa aman dan nyaman sehingga dalam mitos itu terkandung nilai-nilai edukasi atau pendidikan karakter pada seseorang di masyarakat. Pada saat masa kecil ada semacam larangan yang tidak baik dilakukan pada seseorang anak, misalnya yang dianggap sebagai tabu, atau pamali bila dilakukan. Mengapa dalam bentuk mitos ungkapan itu disampaikan? Ini bisa dimengerti karena pada usia anak-anak seringkali mereka masih belum bisa menerima secara rasional tentang alasan mengenai apa yang dianggap mitos yang disampaikan oleh orang tua mereka. Ini tentu tidak dimaksudkan agar anak-anak menjadi penakut, tetapi orang tua harus menjelaskan apa makna mitos yang terkandung secara tersirat itu. Ini dapat dilihat bagaimana misalnya seseorang di suatu masyarakat di Bali masih mempercayai bahwa ada tradisi lisan yang mengatakan bahwa tidak boleh berdiri menghadap gelombang laut, ketika mau buang air kecil ketika berada di pantai². Di Jawa misalnya ada mitologi

¹ Dapat pula disebutkan bahwa kepercayaan penduduk Sumba terhadap Marapu lebih dari 60 persen dimana penduduknya menganut kepercayaan yang percaya pada roh leluhur. Sisanya adalah Kristen Katolik dan Protestan. Hanya sejumlah kecil populasinya adalah Islam, Hindu, dan Buddha.

² Di masa lalu, ada anggapan di beberapa masyarakat akan ketakutan akan laut. Budaya berselancar misalnya banyak dipelajari oleh pemuda Bali dari pengaruh wisatawan asing. Ini bisa dimengerti, karena budaya takut akan dunia alat laut sebenarnya budaya yang berkembang di alam Eropa momento mori, ketika sebelum masa Renaissance, akan tetapi setelah berlangsungnya masa Renaissance muncul kesadaran akan menikmati dunia (laut) yang disebut dengan *carpe diem*.

yang sangat terkenal tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Pada saat pengunjung berada di pantai Parangtritis di Yogya ini ada kepercayaan dimana pengunjung itu tidak berani memakai pakaian berwarna hijau karena diyakini bisa dijadikan pelayan-pelayan Ratu Nyi Loro Kidul. Kepercayaan tentang mitos seperti ini pada kenyataannya masih diyakini kebenarannya di masyarakat tersebut.

Berkaitan dengan mitos tentang laut di Bali, ketika masuknya pengaruh Hindu maka dikenal pula istilah Dewa Surya. Dengan kata lain, bukan matahari itu yang sakti, melainkan apa yang ada di balik matahari itu yaitu Dewa Surya. Itulah sebabnya pada masyarakat yang memiliki budaya lokal seperti ini menganggap ada roh di balik benda-benda itu. Untuk laut, misalnya dahulu laut itu dipercaya memiliki kekuatan supernatural, namun setelah masuknya Hindu maka bukan pada laut itu, tetapi apa yang ada di balik laut yang menghuni laut yang disebut dengan Dewa Baruna yang memberikan keselamatan kepada nelayan apabila mencari tangkapan ikan di laut. Laut atau air memiliki makna penting dalam masyarakat yang menganut ajaran Hindu.

Ada semacam kepercayaan sebagaimana yang terdapat dalam lontar *Smaradahana* yang menyebutkan bahwa penjelmaan sebagai manusia terjadi karena air dan pertemuan *San̄Hyan̄Surya* (Matahari) dengan *San̄Hyan̄Chandra* (Bulan) (Diantari 1990, 113—114). Bahkan sebelumnya, dapat dikatakan pada ajaran Hindu, sebelum ajaran ini bernama ajaran Hindu, pernah ajaran ini diberikan nama ajaran Tirtha³.

Makna Tirtha merujuk pada Sindhu yang berarti air, sehingga erat kaitannya antara Sindhu dan Hindu. Kemudian nama ajaran ini pun disebut ajaran Hindu. Pada nilai-nilai Hindu ini tampaknya terkandung unsur-unsur yang dapat mengikat nilai-nilai kenusantaraan yang mengintegrasikan umat Hindu di seluruh kepulauan Nusāntara dalam bingkai negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan *bhineka tunggal* itu.



³ Ini muncul berkaitan dengan usulan pemberian nama agama di sekitar tahun 1950-an, dimana nama agama Tirtha ini mendapat dukungan dari pendeta-pendeta di Gianyar, Bangli, Jembrana, Lombok dan Karangasem. Sementara utusan dari Klungkung dan Buleleng mengajukan usulan nama agama Siwa Tirtha.

Mitos di Bali juga dipergunakan sebagai metode untuk menjelaskan tentang pemeliharaan lingkungan dengan hati yang bersih. Ini bisa dilihat di Pura Tanah Lot (pura yang terletak di Tanah Selatan) yang memiliki keunikan karena berdiri di pinggir laut. Adapun pamali atau tabu yang diyakini di masyarakat di sekitar Pura Tanah Lot adalah tidak diperkenankan membawa kekasih kalau berkunjung ke pura ini dan tidak akan bertahan lama. Akan tetapi mitos itu tidak berlaku bagi yang sudah berkeluarga. Demikian juga dengan apabila ada seorang perempuan yang sedang hamil yang dianggap tabu kalau datang ke pura ini. Menurut mitos bahwa ada seorang wanita yang sedang haid mau berjalan di sebuah jembatan penghubung tebing yang menghubungkan Pura Tanah Lot. Akan tetapi, tiba-tiba saja jembatan yang dilaluinya itu roboh. Inilah alasannya mengapa sampai sekarang tidak ada lagi jembatan yang menghubungkan tebing menuju Pura Tanah Lot. Mitos ini erat kaitannya dengan upaya menjaga kesucian pura Tanah Lot sebagai salah satu pura penting dalam konteks Jawanisasi atau Hinduisasi yang dilakukan oleh Danghyar Nirartha yang pernah berkunjung ke tempat ini.

Berkaitan dengan mitos tentang laut, dapat disebutkan bahwa di Bali pun masih ada kepercayaan akan cerita mitos mengenai Selat Bali. Mitos itu mendeskripsikan ketika pada jaman Kadiri hidup seorang Brahmana, Sidi Mantra yang memiliki seorang istri dan seorang anak yang bernama Manik Angkeran. Namun, anak Sidi Mantra ini memiliki kebiasaan buruk, yaitu sering berjudi. Akibatnya ia pun mempertaruhkan kekayaan orang tuanya untuk bermain judi. Manik Angkeran pun dikisahkan meminta bantuan kepada ayahnya. Karena perasaan sayangnya kepada anak itu, ia pun melakukan puasa dan berdoa. Ketika ia berdoa secara tiba-tiba ia mendengar, "Hai Sidi Mantra, pergilah ke Bali di sebuah tempat di kawah Gunung Agung ada harta karun yang dijaga seekor naga, Naga Besuki namanya. Pergilah ke sana dan mintalah supaya dia mau memberi sedikit hartanya."

Sidi Mantra pun dikisahkan pergi ke Gunung Agung dengan mengatasi segala rintangan. Ketika ia minta restu bantuan kepada Naga Besuki ia pun mendapat harta benda berupa emas dan intan yang dimohonnya dan segera diberikan kepada anaknya, Manik Angkeran agar tidak berjudi kembali. Manik Angkeran mengetahui kalau ayahnya memperoleh harta itu dari Gunung Agung. Manik Angkeran tahu kalau ayahnya pergi ke sana, tetapi ia tidak pernah tahu cara mengucapkan mantra. Diceritakan bahwa Manik Angkeran hanya membawa genta yang dicuri dari ayahnya, Sidi Mantra sewaktu ia tidur. Setibanya di Gunung Agung ia bertemu dengan Naga Besuki. Naga Basuki pun bersabda "Akan kuberikan harta yang kau minta, tetapi kamu harus berjanji untuk mengubah kelakuanmu. Jangan berjudi lagi. Ingatlah akan hukum karma."

Manik Angkeran terkagum dengan harta yang dilihatnya, namun karena ingin mendapat harta lebih banyak, ia pun memotong ekor Naga Besukih. Ia melarikan diri tetapi karena Naga Besuki sangat sakti, Manik Angkeran terbakar menjadi abu sewaktu jejaknya dijilat sang Naga. Sidi Mantra sangat sedih dan ia pun datang lagi ke Naga Besukih supaya Manik Angkeran dapat hidup lagi. Dengan kesaktiannya Sidi Mantra dapat menyembuhkan ekor naga, dan seketika Manik Angkeran dihidupkan. Manik Angkeran minta maaf. Ia pun menyampaikan

janjinya untuk tidak mengulangi perbuatannya. Meskipun Sidi Mantra mengetahui anaknya minta maaf namun Sidi Mantra tidak berkenan mengajaknya hidup bersama. Disebutkan bahwa di tempat dia berdiri muncul sumber air yang makin lama makin membesar dan akhirnya menjadi laut. Pada akhir mitos itu dikatakan, bahwa Sidi Mantra dengan tongkatnya, membuat garis yang dapat memisahkan dia dengan Manik Angkeran. Hingga saat ini, tempat itu menjadi Selat Bali yang telah memisahkan pulau Jawa dengan pulau Bali dengan sebuah selat yang disebut Selat Bali. (lihat: Kang Aden, 8 November 2007).

Meskipun Selat Bali memisahkan antara Jawa dan Bali, namun terdapat nilai-nilai integrasi yang menghubungkan antara Jawa dan Bali. Hal ini dapat dilihat bagaimana terdapat berbagai mitos tentang laut, namun laut itu mempunyai makna menyatukan. Meskipun dipisahkan, tetapi laut itu mempunyai fungsi mengintegrasikan. Ini menurutnya bisa menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara kerajaan Mengwi pada abad XVII yang menguasai Kerajaan Blambangan di Jawa Timur. Hubungan yang terjadi itu, bisa menjelaskan aspek sosial, budaya, agama dan politik yang secara pelan-pelan merajut makna keindonesiaan itu pada abad XVII. Ini membuktikan bahwa Bali bukan sebagai wilayah yang berdiri sendiri tanpa kaitan dengan wilayah lainnya dalam hal ini dengan Jawa misalnya. Bahkan kaitan antara Jawa dan Bali itu sebenarnya sudah bisa dilacak dengan terjadinya perkawinan antara raja Bali dengan raja Jawa Timur, hingga selanjutnya terjadi supremasi kerajaan Majapahit di Bali. Ini sebenarnya yang memperkokoh makna kenusantaraan, ketika Gajah Mada menyampaikan tentang Sumpah Palapa-nya untuk menyatukan kepulauan Nusāntara ini yang sekarang terwujud dengan wilayah darat dan pulau yang disebut Kepulauan Nusāntara.

Penutup

Apa yang dapat disampaikan tentang makna mitos ini adalah adanya unsur-unsur cinta akan tanah dan air yang dalam istilah modern disebut nasionalisme atau paham kecintaan akan tanah air. Mitos itu, tidak hanya sebagai yang sudah ada di masa lalu, tetapi dalam beberapa hal dalam upaya penguatan rasa cinta tanah air ini dalam konteks kenusantaraan bahkan mitos itu diciptakan.

Di Malaysia, misalnya di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah berhadapan dengan persoalan daya saing yang tinggi, mitos itu bahkan diciptakan. Dalam konteks kenusantaraan ini, Malaysia menganggap negara-negara tetangganya, yang berada di seberang laut sebagai nusāntara. Meskipun di seberang laut, bisa dilihat potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk dipromosikan bagi kenusantaraan Malaysia. Dalam mengantisipasi persaingan global dalam konteks kenusantaraan ini, bahkan Malaysia menciptakan mitos untuk dipromosikan dan dijual dalam mengembangkan wisatanya. Lihat misalnya dalam sebuah diorama yang dipertunjukkan di sebuah kawasan wisata di Kuala Lumpur diciptakan cerita mitos mengenai Mashuri. Penciptaan mitos ini ternyata mampu menarik kunjungan

wisatawan yang berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia. Selain mitos tentang Mashuri, juga diciptakan mitos tentang *Malaysia is truly Asia* yang dimaksudkan untuk menarik kunjungan wisatawan asing di negeri Jiran itu. Ini dimaksudkan bahwa untuk melihat nilai-nilai kekayaan Asia cukup pergi ke Malaysia, bukan ke tempat lain. Bahkan negara-negara Asia Tenggara lainnya pun tidak ketinggalan untuk menciptakan slogan-slogan untuk menarik jumlah kunjungan wisatawannya. Thailand misalnya dengan "*Amazing Thailand*", Indonesia dengan "*Wonderful Indonesia*", dan Vietnam dengan "*Hidden Jewellery*"-nya.

Bagi Indonesia, penciptaan mitos bukanlah hal yang baru pula. Karena dalam mitos itu meskipun di satu pihak seringkali mitos itu dianggap tidak nyata (*unreal*), tetapi di pihak lainnya secara nyata (*real*) mampu menciptakan nilai-nilai keteladanan yang bisa dijadikan panutan dalam melangkah ke depan dengan lebih baik. Nilai-nilai atau makna yang terkandung dalam mitos itu ternyata mampu memperdayakan bangsa yang dalam suasana penjajahan untuk kembali bangkit. Sudah sejak lama Mohammad Yamin mencari dan menuliskan mitos yang ada kaitannya dengan upaya penguatan rasa kenusantaraan. Dapat misalnya disebutkan karya yang ditulis oleh Muhammad Yamin salah seorang pahlawan nasional yang berjudul, *6000 Tahun Sang Saka Merah Putih*, adalah sebuah karya yang sangat sarat akan kebesaran jiwa bangsa Indonesia yang sangat kaya akan tanah airnya sejak 6000 tahun yang lalu. Ada yang menganggap karya Yamin ini sebagai mitos, namun sisi lain yang perlu dicermati adalah bahwa Yamin mencoba melihat bukti-bukti nilai kehidupan yang berkarakter seperti adanya warna merah putih pada berbagai bentuk sajian yang dilakukan oleh para leluhur sejak masa yang cukup lama. Ini bahkan, diangkat sebagai menjadi simbol-simbol kenegaraan dalam bentuk pemilihan warna merah yang berani dan putih yang berari suci sebagai warna yang dipilih bagi bendera untuk negara Indonesia. Bangsa Indonesia dalam mewujudkan rasa kesatuan akan cinta tanah dan air yang melingkupi berbagai pulau-pulau besar dan kecil yang disebut sebagai *Nusa Antara* (Nusantara dan Kenusantaraan) berdasarkan keberanian yang didasari atas nilai-nilai kesucian. Nilai-nilai suci ini sebenarnya bisa dikaitkan dengan makna-makna yang terkandung dalam agama dan bisa juga dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal seperti apa yang disebut dengan mitos itu.

Tampak jelas, bahwa dalam mitologi tentang dunia (laut) erat kaitannya dengan upaya untuk memahami nilai-nilai pengikat kenusantaraan itu. Untuk itu, betapa pentingnya upaya untuk menggali nilai-nilai kearifan yang ada pada setiap masyarakat di tingkat lokal ini. Nilai-nilai itu bukan mati, ia masih hidup dalam setiap benak hati para insan pada suku-suku atau etnis yang ada di bumi Nusantara ini. Merekalah para pendukung nilai-nilai sukubangsa yang harus diangkat untuk dilestarikan dan dikembangkan sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang kenusantaraan itu. Dengan demikian, diharapkan bahwa upaya meningkatkan kecerdasan sukubangsa-sukubangsa dapat sejajar dengan upaya meningkatkan Kenusantaraan dan Keindonesiaan itu.

Penulis adalah peneliti pada Pusat Kajian Bali Universitas Udayana

JEJAK BAWAH TANAH DAN PERCIK BAWAH AIR: CIKAL TUA BANGSA BAHARI*

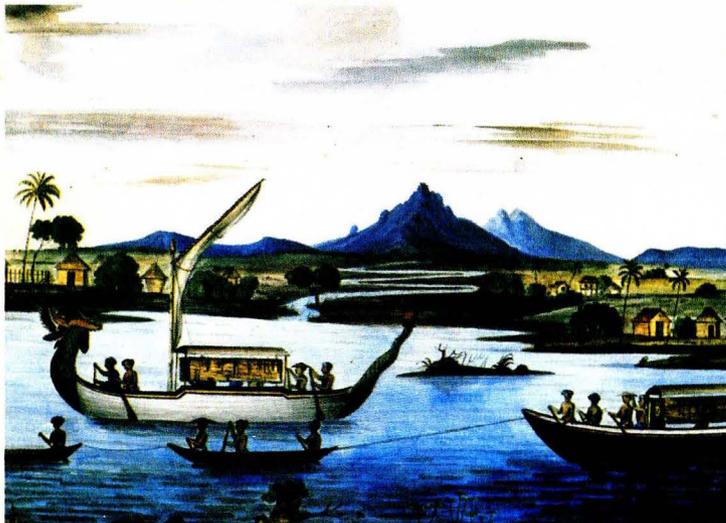
Bambang Budi Utomo

Pengantar

Judul makalah ini mengandung pengertian, yaitu rekonstruksi sejarah Bangsa Bahari yang datanya dapat diperoleh di bawah tanah melalui penggalian arkeologis dan di dasar laut melalui penelitian arkeologi bawah air (*underwater archaeology*).

Pengertian lainnya adalah bahwa Bangsa Bahari ini terdiri dari dua kehidupan masyarakat yang saling membutuhkan, yaitu kelompok masyarakat agraris yang hidup dari tanah-tanah pertanian di daerah pegunungan dan dataran alluvial yang subur, dan kelompok masyarakat nelayan yang hidup dari hasil laut. Masing-masing kelompok masyarakat ini mengembangkan teknologi untuk memudahkan keperluan hidupnya.

Dalam mengusahakan/mengelola sumberdaya alamnya mereka mempunyai perbedaan. Kelompok agraris yang lebih dikenal dengan kelompok petani, mereka harus bekerja keras untuk memperoleh hasil pertanian yang baik, serta memerlukan suatu organisasi sosial yang mantap. Banyak kendala yang harus dihadapi oleh kelompok masyarakat agraris ini, selain musim juga hama yang selalu menyerang hasil pertanian yang belum siap panen.



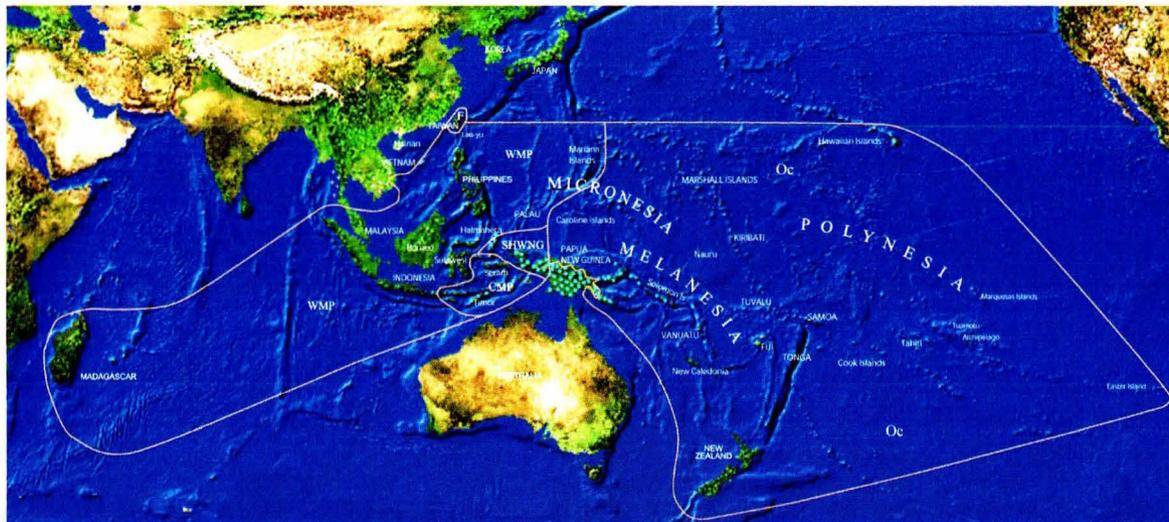
* Makalah Seminar Hari Nusantara "Membangkitkan Wawasan Budaya Melalui Peningkatan Peran SDM dan Iptek" yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Denpasar, Bali, pada Rabu, 28 November 2012.

Sementara itu, kelompok masyarakat nelayan yang tinggal di daerah pesisiran dan pulau-pulau kecil “seharusnya” tidak perlu bekerja keras untuk mencari hasil laut. Mereka seharusnya menangkap ikan, bukan mencarinya. Namun dalam kenyataannya mereka justru mencari ikan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tidak pernah ada ceritera kehidupan nelayan berkecukupan, meskipun mereka tidak perlu member makan ikan di laut. Kelompok masyarakat ini mengembangkan teknologi moda transportasi air yang dikenal dengan nama perahu.

Tanah Air

Siapa sebenarnya nenek moyang Bangsa Bahari? Sebagian orang beranggapan bahwa orang-orang yang bertutur “bahasa” Austronesia-lah nenek moyangnya. *Austronesia* adalah istilah yang dipakai oleh pakar linguistik untuk keluarga bahasa yang berkembang di Taiwan antara 5000-7000 tahun yang lampau.

Di Taiwan orang-orang ini mengembangkan teknik-teknik pertanian yang didapat dari Tiongkok Selatan, beradaptasi dengan lingkungan pulau, dan belajar menyeberangi selat (Selat Formosa). Sejak sekitar millenium ke-3 Sebelum Masehi, mereka mengembara ke arah selatan menuju Filipina. Di tempat ini mereka membawa dan mengembangkan teknik perladangan berpindah, teknik membangun perahu, dan teknik membuat barang-barang tembikar. Pada akhirnya mereka membentuk sub-rumpun bahasa Melayu-Polynesia.



Menjelang millenium pertama Sebelum Masehi, para penutur rumpun bahasa Melayu-Polynesia barat sudah mencapai pesisir Indocina (Champa), Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Pada periode berikutnya, secara bersinambungan mereka sudah berlayar jauh hingga ke Madagaskar di pantai timur Afrika. Akibat berhubungan secara bersinambungan, kemudian tumbuh budaya Melayu-Polynesia Barat (Malagasy) dan berkembang secara mandiri (Belwood, 1997).

Kelompok penutur rumpun bahasa Austronesia yang menyebar ke arah timur membentuk rumpun bahasa Melayu-Polynesia Timur. Perkembangannya di daerah pantai-pantai kawasan timur Nusāntara, seperti Halmahera dan pantai utara Irian. Dari tempat ini kemudian diteruskan sampai ke seluruh penjuru Pasifik, Tonga, Samoa, Hawaii, Easter Island dan yang terjauh ke Selandia Baru.

Populasi para penutur rumpun bahasa Austronesia yang jumlahnya lebih dari 350 juta, menempati wilayah dari Madagaskar di barat hingga Easter Island (Pulau Paskah) di timur, dan dari Taiwan/Micronesia di utara hingga Selandia Baru di selatan. Benang merah yang menyatukan mereka adalah teknik bercocok-tanam, teknik pembuatan perahu, dan teknik pembuatan tembikar (Tanudirdjo 2005).

Bangsa barat menyebut tanah kelahirannya *homeland* atau *motherland* yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih tepat dikatakan *bumi pertiwi* atau *ibu pertiwi*. Istilah ini mungkin berasal dari pemujaan kepada Dewi Kesuburan yang sifatnya universal. Meskipun nenek moyang bangsa Indonesia juga mengenal pemujaan kepada Dewi Kesuburan, untuk menyebut tanah kelahirannya mungkin lebih tepat dengan istilah *tanah air*. Istilah ini lebih tepat karena bangsa Indonesia yang berbeda-beda sukubangsa mendiami pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut dan selat.

Kepulauan Indonesia mempunyai posisi yang strategis. Tidak saja karena berada di antara dua benua, Asia dan Australia, tetapi juga karena kepulauan ini terletak di antara dua samudra, Pasifik dan Indonesia. Posisi ini membuat Kepulauan Indonesia menjadi tempat persilangan budaya dalam pergaulan antarbangsa di kawasan ini. Bahkan, di jaman purba kawasan ini menjadi daerah perambahan yang menantang manusia untuk menjelajahnya. Ketika permukaan air laut turun, pada jaman es, pulau-pulau di kawasan barat bergabung dengan daratan Asia menjadi Paparan Sunda, sedangkan di kawasan timur Pulau Irian dan Aru bergabung dengan Daratan Australia menjadi Paparan Sahul. Di antara dua daratan luas itu, terdapat Zona Wallacea yang ditempati oleh Pulau Sulawesi dan pulau-pulau kecil lainnya yang kini termasuk wilayah Maluku dan Nusatenggara.

Sepanjang sejarah, Zona Wallacea tidak pernah bergabung dengan Paparan Sunda maupun Paparan Sahul, dan selalu dikelilingi oleh lautan dalam. Karena itu, kawasan ini sering dianggap sebagai “penghalang” persebaran manusia purba. Namun, hasil penelitian arkeologis di Zona Wallacea menunjukkan kawasan ini ternyata telah dihuni oleh manusia purba sejak sekitar 800.000 tahun yang lalu, sebagaimana dibuktikan dengan temuan alat-alat batu purba bersama-sama dengan fosil gajah purba, *Stegodon* kerdil di Flores (Tanudirdjo 2001). Temuan ini sekaligus memastikan bahwa pada kala itu manusia purba *Homo erectus* di Indonesia telah mempunyai kemampuan melintasi laut-laut di antara pulau-pulau hingga tiba di Flores. Diduga, *Homo erectus* telah mampu merakit bambu menjadi perahu sederhana untuk menyeberanginya.

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam suku, bahasa, dan budayanya. Secara fisik antar satu budaya dan budaya lain dipisahkan oleh laut. Namun kalau kita melihat dari sisi kemaritiman pemisahan itu tidak pernah ada, karena seluruh perairan yang ada di Nusāntara adalah sebagai pemersatu yang mengintegrasikan ribuan pulau yang terpisah-pisah itu. Dalam proses perkembangannya tingkat integrasi dapat berbeda-beda baik secara geografis maupun secara politis, ekonomis, sosial dan kultural.

Di negara yang disebut Indonesia itu berdiam sebuah bangsa besar yang mendiami wilayah dan negara kepulauan, bangsa yang multi kultur dimana ada dua kelompok kehidupan, yaitu kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dan kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pedalaman. Kedua kelompok masyarakat ini, sadar atau tidak sadar bahwa mereka hidup dalam sebuah ketergantungan akan laut. Semuanya itu kembali pada konsep hidup dan kesadaran ruang hidup yang berasal dari heterogenitas tadi. Kemudian dalam sejarahnya, ada juga tercatat antagonis hasrat untuk saling mengendalikan dari kedua kelompok besar itu sendiri (Lapian 1992). Kelompok yang tinggal di darat berusaha untuk mengendalikan pesisir dengan segala upaya untuk mendapatkan hasil dari laut, dan juga sebaliknya.

Laut adalah ajang untuk mencari kehidupan bagi kedua kelompok masyarakat. Dari laut dapat dieksploitasi sumberdaya biota dan abiotik, serta banyak kegiatan kemaritiman yang menjanjikan dan mempesona. Inilah yang mendorong kedua kelompok masyarakat itu menuju laut. Pada mulanya bertujuan mencari hidup dan mempertahankan hidup. Pada akhirnya bertujuan mengembangkan kesejahteraan, atau dengan kata lain membangun kejayaan dan kekayaan dari kegiatan kemaritiman. Fenomena ini pada akhirnya membentuk karakter bangsa pelaut, seperti lahirnya *Kadātuan Śrīwijaya* dan Kerajaan Mālayu di Sumatera (Casparis 1985), Kerajaan Siŋ hasāri dan Kesultanan Demak di Jawa, dan Kerajaan Makassar di Sulawesi.

Laut dapat dikatakan media pemersatu karena melalui laut orang dari berbagai bangsa melakukan interaksi dengan berbagai macam aktivitas. Melalui laut orang dari berbagai bangsa menjalankan aktivitas perekonomian melalui “jasa” pelayaran antarbenua atau antarpulau. Sejak awal tarikh masehi, laut Nusāntara telah diramaikan oleh kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia. Dengan sarana transportasi air itu, komoditi perdagangan dibawa dari satu tempat ke tempat lain untuk diperdagangkan.

Kearifan Menjaga Pusaka

Negara Kepulauan yang disebut Indonesia merupakan suatu rahmat Allah dikaruniai tanah yang kaya dan subur. Kaya akan barang tambang di dalam buminya, dan kaya akan hasil hutan dan ladang di muka buminya, serta kaya akan hasil laut di perairannya. Itulah

pusaka yang dimiliki bangsa ini. Keadaan ini sudah lama diketahui oleh bangsa-bangsa di dunia. Sejak awal tarikh masehi banyak para pengembara dan pedagang yang datang ke Nusāntara untuk mencari barang komoditi yang laku dijual.

Pusaka bangsa Indonesia –termasuk lingkungan hidupnya—sejak awal kebudayaan manusia yang menghuni Nusāntara, sadar atau tidak telah dikelola dengan baik dengan “perangkat” kearifan yang dimiliki oleh anak bangsa ini. Aturan tidak tertulis yang diterjemahkan melalui naluri dan akal dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian alam, di samping mereka memanfaatkan alam untuk mencari makan dan bertahan hidup. Saya mengambil contoh kearifan mengelola lingkungan pada masyarakat agraris dan masyarakat bahari yang kedua kelompok ini “mendominasi” tanah air.

Masyarakat Agraris

Pertanian (*agriculture*) adalah bentuk proses produksi yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengolah tanah dan memelihara tanaman-tanaman. Di daerah tropik yang terbentang antara garis 23,5° Lintang Utara dan 23,5° Lintang Selatan pertanian yang berkembang ada dua macam, yaitu pertanian ladang berpindah (*shifting cultivation* atau *swidden agriculture*) dan pertanian berkesinambungan. Pertanian ladang berpindah termasuk ke dalam pertanian kering karena jenis pertanian ini dikembangkan di daerah semi-arid⁴. Pertanian berkesinambungan maksudnya adalah pertanian persawahan dengan pengairan (irigasi)⁵.

Pertanian ladang berpindah hasilnya tidak sebanyak pertanian berkesinambungan tetapi hanya memerlukan tenaga kerja yang sedikit, sedangkan pertanian berkesinambungan hasilnya banyak tetapi memerlukan tenaga kerja yang banyak dan organisasi sosial yang mantap (*established*). Berdasarkan data yang terkumpul, agaknya di Jawa pertanian berkesinambungan lebih populer dan menempati areal yang luas di sepanjang tepian sungai di daerah tanah fasies gunung api⁶; Hitungan ekonomi usaha pengolahan ladang berpindah memberi hasil negatif; usaha ladang berpindah tidak menguntungkan. Sementara itu pengolahan pertanian berkesinambungan sebaliknya. Dilihat dari sisi itu, adanya usaha pertanian berkesinambungan mengundang pertanyaan mengapa pertanian jenis itu dapat berkembang dan terkonsentrasi di Tanah Jawa di lembah-lembah yang subur. Berdasarkan data prasasti, jenis pertanian ini sudah berkembang sejak Matarām Kuno (abad ke-8 Masehi) dan terus berkesinambungan hingga masa sekarang.

⁴ Suatu daerah yang kering, kekurangan air, kurang kelembaban, dan curah hujannya kurang dari 250 mm/tahun.

⁵ Pengaturan pemberian air secara buatan pada bidang-bidang tanah pertanian dengan tujuan agar dapat ditanami.

⁶ Keseluruhan dari ciri-ciri anorganik (batuan) dan organik (fosil) dari suatu formasi batuan tertentu.

Di Indonesia kawasan yang paling subur tanahnya adalah daerah lembah sungai Progo dan Elo di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tingginya tingkat kesuburan tanah ini disebabkan karena aktivitas gunungapi-gunungapi Merapi-Merbabu dan Sumbing-Sindoro. Abu vulkanis yang disemburkan oleh gunungapi dari dulu hingga sekarang masih terus berlangsung. Dataran ini merupakan dataran rendah fasies gunungapi yang tanahnya sangat kaya akan zat hara, zat yang berguna bagi tanaman (Mohr 1945, 254). Letusan gunungapi yang pada mulanya merugikan, pada akhirnya justru menguntungkan karena magma yang dikeluarkan akan membeku di permukaan tanah. Karena pengaruh iklim dan air, lama kelamaan akan melapuk sehingga menjadi tanah yang subur (Mohr tt, 18).

Padi (*Oriza sativa*) yang ditanam dengan teknik sawah irigasi tidak tergantung dari jenis tanah tertentu saja, karena air yang mengalir dalam dinamik sawah membawa zat hara, dan pertukaran oksigen dapat terus berlangsung selama air itu mengalir. Pertanian ini hanya dimungkinkan karena adanya upaya yang sifatnya “intensifikasi tenaga kerja” (*labor intensive*) dan selalu berlangsung pemupukan baru, baik langsung (pemberian pupuk kandang oleh petani) atau tidak (melalui pengairan irigasi yang membawa hasil longsor tanah subur di daerah hulu). Pertanian menetap dengan padi sawah dimungkinkan karena sistem sawah merupakan sistem yang bersinambungan.

Di wilayah yang subur ini banyak terdapat tinggalan budaya masa lampau yang merupakan indikator pemukiman kuno. Tinggalan budaya ini ada yang berupa bangunan candi/stūpa, arca, prasasti, tembikar dan keramik. Seluruhnya ditemukan mengelompok dekat dengan pemukiman (desa) sekarang yang dikelilingi areal persawahan pengairan. Keadaan seperti ini terus berlangsung kecuali ada perubahan fungsi lahan atau perluasan desa.

Dari prasasti-prasasti berbahasa Jawa Kuno diperoleh keterangan bahwa penduduk Jawa mengenal dua jenis pertanian, yaitu pertanian ladang (gaga) dan sawah irigasi. Petunjuk yang lebih pasti tentang adanya sawah baru ditemukan pada abad ke-9 di Jawa Tengah, yaitu pada Prasasti Kamalagi yang ditemukan di Desa Tegalsari (Magelang, Jawa Tengah).

“Wuga pu Maṅṅēb menetapkan sīmā (semacam daerah bebas pajak) berupa sawah dan kebun di desa Kamalagi...”

Itulah sepenggal kalimat yang dituliskan pada Prasasti Kamalagi yang bertarikh 30 April 821 Masehi (Goris 1930, 157-170). Masih banyak lagi sistem pertanian sawah yang disebutkan dalam prasasti yang ditemukan di daerah Jawa Tengah, seperti pada Prasasti Kayumwuṅjan (26 Mei 824) (Casparis 1950, 24-50), Prasasti Tri Tpusan (11 November 842) (Casparis 1950, 73-95), Prasasti Wanua Tēṅjah I (785) dan II (10 Juni 863) (Damais 1949, 1-26), dan Prasasti Mantyāsīh I (11 April 907) (Stutterheim 1927, 173-216). Prasasti-prasasti tersebut menunjukkan pada kita bahwa sawah telah ada pada masa Jawa Kuno.



Pengelolaan dan penggarapan sawah di masa Jawa Kuno tidak jauh berbeda dengan masa sekarang. Gambaran penggarapan sawah irigasi boleh jadi tidak jauh berbeda dengan yang ada di Bali sekarang ini (subak). Petak-petak sawah dibuat bersengked-sengked agar tanah tidak longsor dan memudahkan pengaturan air. Pada awal penggarapan, untuk membalikkan tanah digunakan bajak yang ditarik oleh kerbau atau sapi. Lahan siap ditanami padi ketika tanah sudah dibalik dan permukaannya diratakan untuk dibuat garis-garis lurus saling berpotongan. Pada perpotongan garis, di situlah bibit padi ditanam oleh beberapa penduduk desa yang turut bergotongroyong.

Pekerjaan selanjutnya adalah menjaga dan memelihara lahan sawah yang telah ditanami padi. Air yang mengalir di lahan persawahan, semasa padi tumbuh harus tetap terjaga. Tidak boleh terlampau banyak, dan tidak boleh tergenang agar pertukaran oksigen tetap terjaga. Sesekali petani menyiangi rumput-rumput liar yang tumbuh pada dinding pematang sawah dan di sekitar tanaman padi. Sampai waktunya padi mulai menguning pasokan air mulai dikurangi.

Bukti-bukti arkeologis menguatkan dugaan bahwa sistem pertanian sawah irigasi telah ada sejak jaman dulu. Pada relief Candi Borobudur yang berasal dari abad ke-9 Masehi, dalam rangkaian ceritera *Awadana* dan *Jataka*, terdapat relief yang menggambarkan seorang petani sedang membajak sawah. Tangan kirinya memegang tangkai bajak yang ditarik sepasang kerbau/sapi. Tangan kanannya memegang kayu untuk menghalau kedua ternak tersebut. Pada panil lain tampak digambarkan keluarga petani sedang menunggu tanaman padi dan petani sedang memikul padi. Relief ini membuktikan bahwa di sekitar Candi Borobudur terdapat kelompok masyarakat yang hidup dari tanah-tanah pertanian sawah. Tidak mungkin seniman yang memahatkan relief tersebut menggambarkan sesuatu tanpa melihat visualnya.



Pertanian dengan sistem sawah irigasi makin lama terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Kalau pada jaman Matarām Kuno pengairan diperoleh dari sungai yang ada di dekat areal persawahan, pada jaman Airlangga di Jawa Timur sudah lebih maju lagi. Prasasti Hariñjing dari 19 September 921, yang ditemukan di Pare (Kediri), menyebutkan tentang penggalian sungai Hariñjing untuk kepentingan pengairan sawah dan penanggulangan bahaya banjir (Callenvels 1934). Begitu juga Prasasti Kamalagyan (*OJO LXI*) dari 11 September 1037 Masehi yang dikeluarkan oleh Airlangga menyebutkan tentang pembangunan *dawuhan* (pintu air) di Waringin Sapta untuk keperluan pengairan sawah dan pengendalian banjir (Brandes 1913, 134-136; Soetjipto 1958, 72).

Pada masa yang hampir bersamaan dengan di Jawa, di Bali sistem persawahan dengan teknik irigasi berkembang pada abad ke-11 pada masa pemerintahan Raja Anak Wuṅśu. Prasasti Pandak Bandung (1071 Masehi) yang dikeluarkan oleh Raja Anak Wuṅśu menyebut pembelian sawah seluas tiga *tambuku galleng* di Kasowakan. Dalam Prasasti Kelungkung (1072 Masehi) dari raja Anak Wuṅśu menyebutkan tigapuluh subak dengan nama-nama pejabat yang terkait dengan urusan pertanian, seperti *senapati danda*, *sañ admak danda*, *purusakara*, dan *kadahuluan*.

Sistem pertanian sawah dengan teknik irigasi di Sumatera agaknya mulai dikembangkan sejak Ādityawarmman memerintah di Pagarruyung (abad ke-14), Sumatera Barat. Ia adalah seorang bangsawan putra Melayu yang dibesarkan di Majapahit (Casparis 1990, 40-50). Setelah saatnya tiba, ia kembali ke kampung halamannya untuk memerintah. Dengan pengetahuan dan pengalaman selama di Majapahit, ia mengembangkan teknik-teknik pertanian di Minangkabau.

Lain halnya di daerah yang kurang subur tanahnya, daerah *erratic rainfall* (daerah yang curah hujannya tidak menentu), daerah berbukit, dan hutan. Teknik pertanian yang dikembangkan adalah pola perladangan berpindah dan permanen. Di Timor dikenal dua jenis persiapan lahan yang disebut *lere rai* dan *fila rai*. Menghindari resiko menghadapi musim kemarau yang panjang mereka memilih jenis tanaman yang berbeda kebutuhan airnya, dan berbeda panennya. Keadaan tanah maupun topografi menentukan pilihan orang untuk melakukan salah satu dari keduanya.

Lere rai biasanya dilakukan pada daerah yang masih berhutan dengan menebang, menanami lahan, dan berpindah. Sedangkan *fila rai* yang dikerjakan secara intensif agak permanen dengan cara membakar semak dan menyiapkan lubang untuk tanamannya. Sistem *fila rai* tidak dapat dilakukan pada tanah yang melereng dan pada jenis tanah yang berpasir namun sangat efektif dalam memulihkan kelembaban tanah pada musim kemarau daripada *lere rai*. *Fila rai* memerlukan tenaga kerja banyak. Kecenderungan yang terlihat bahwa kepadatan penduduk menyebabkan orang mulai membuat teras di lereng pegunungan mengubah sistem *lere rai* menjadi *fila rai*. Di sinilah awal mulai rusaknya sistem yang telah dibangun berabad-abad oleh nenek moyang.

Masyarakat Bahari

Entah sejak kapan nenek moyang bangsa Indonesia mengenal pembuatan perahu. Hanya sedikit data arkeologi maupun sejarah yang berhasil mengungkapkan tentang hal itu. Satu-satunya data arkeologi yang sedikit mengungkapkan teknologi pembangunan perahu adalah lukisan gua, seperti yang ditemukan di Gua Niah (Serawak) (Nik Hassan Shuhaimi 1999) dan Pulau Muna (Sulawesi Tenggara). Di situ dapat dilihat bagaimana bentuk perahu pada masa prasejarah, yang pada masa itu dapat dikatakan masih sangat sederhana seperti halnya perahu pada masyarakat sederhana masa kini. Sebatang pohon yang mempunyai garis tengah batang cukup besar ditebang, kemudian bagian tengahnya dikeruk dengan menggunakan alat sederhana, misalnya beliung dari batu. Nampaknya mudah, tetapi dalam kenyataannya cukup sulit. Dinding perahu harus dapat diperkirakan tebalnya, tidak boleh terlampau tebal atau terlampau tipis. Badan perahu tidak boleh mudah pecah atau bocor apabila terantuk karang atau kandas di pantai yang keras. Apabila bentuk dasar sudah selesai, barulah diberi cadik di sisi kiri dan kanan badan perahu. Perahu jenis ini dinamakan *perahu lesung* atau *sampan*, panjangnya kira-kira 3-5 meter dan lebar sekitar 1 meter.

Berdasarkan pada data arkeologis, temuan-temuan berupa penggunaan perahu banyak ditemukan dalam bentuk visual baik berupa goresan, pahatan, lukisan, relief dalam bentuk dua dimensi atau dalam bentuk tiga dimensi atau perahu itu sendiri sebagai sejarah dari perkembangan pola hidup nelayan.

Data lainnya lagi berkenaan dengan perahu ditemukan di sepanjang Teluk Seleman (Pulau Seram Utara), yaitu berupa lukisan-lukisan yang dicat dengan warna merah dan putih di gua-gua batu. Lukisan perahu tersebut bersamaan dengan beberapa lukisan telapak tangan manusia dan cap tangan kidal. Berikutnya terdapat temuan di Pulau Kei Kecil pada sebuah ceruk di gua-gua pinggir laut dengan menggunakan cat warna merah beberapa gambar perahu, ikan, matahari dan muka manusia. Di tempat itu juga ditemukan sebuah gambar perahu yang dinaiki oleh beberapa orang yang memakai tutup kepala. Dan perahu lainnya yang digambarkan dengan menggunakan layar (atap) dengan bagian haluan dan buritan yang mencuat ke atas.



Lukisan perahu yang ditemukan di Pulau Kei ini mirip dengan temuan yang terdapat di Timor Leste (dahulu Timor Timur). Ruy Cinetti yang pada tahun 1963 melakukan penelitian di daerah ini mengatakan bahwa gambar perahu ditemukan bersama-sama dengan gambar manusia, binatang dan matahari. Di sini juga ditemukan sebuah gambar perahu yang berciri *kora-kora*.

Penggunaan perahu secara arkeologis tampaknya dimulai ketika pada masa neolitik atau pada masa tersebut dikenal dengan masa bercocok tanam. Temuan di beberapa tempat onggokan-onggokan sampah kerang atau *kyokkenmödinger* menunjukkan adanya pemanfaatan hasil laut untuk menambah mata pencaharian bagi manusia, dan menurut analisis pemanfaatan hasil laut menunjukkan adanya penggunaan alat transportasi dengan perahu. Analisis ini dibuktikan dengan adanya gambar-gambar di gua-gua hunian di Pulau Muna (Sulawesi Tenggara), dalam lukisan yang bercat warna merah tersebut menggambarkan sebuah perahu yang sedang dikayuh oleh beberapa orang. Di samping itu ada beberapa perahu yang tampak digambar menggunakan layar. Bagian buritan dan haluannya tampak melengkung. Pada lukisan lain tampak perahu dengan cadik di sisinya.

Pada jaman prasejarah, perahu bercadik memainkan peranan yang besar dalam hubungan perdagangan antarpulau di Indonesia dan antara kepulauan di Indonesia dengan daratan Asia Tenggara. Karena adanya hubungan perdagangan dengan Asia Tenggara daratan dan Tiongkok, terjadi tukar menukar informasi teknologi dalam segala bidang, misalnya dalam pembangunan candi, pembangunan kota, dan tentu saja pembangunan perahu. Di seluruh perairan Nusāntara, banyak ditemukan runtunan perahu yang tenggelam atau kandas. Dari runtunan itu para pakar dapat mengidentifikasi teknologi pembangunannya. Para pakar telah merumuskan teknologi tradisi pembangunan perahu berdasarkan wilayah budayanya, yaitu *Wilayah Budaya Asia Tenggara* dan *Wilayah Budaya Tiongkok* (Manguin 1987, 63-64).

Perahu yang dibuat dengan *teknologi tradisi Asia Tenggara* mempunyai ciri-ciri khas, antara lain badan (lambung) perahu berbentuk seperti huruf V sehingga bagian lunasnya ber-*linggi*, haluan dan buritan lazimnya berbentuk simetris, tidak ada sekat-sekat kedap air di bagian lambungnya, dalam seluruh proses pembangunannya sama sekali tidak menggunakan paku besi, dan kemudi berganda di bagian kiri dan kanan buritan. Teknik yang paling mengagumkan untuk masa kini adalah cara menyambung papan. Selain tidak menggunakan paku besi, cara menyambung satu papan dengan papan lainnya adalah dengan mengikatnya dengan tali ijuk (*Arenga pinnata*). Sebilah papan, pada bagian tertentu dibuat menonjol. Di bagian yang menonjol ini (disebut *tambuko*), diberi lubang yang jumlahnya 4 buah menembus ke bagian sisi tebal. Melalui lubang-lubang ini tali ijuk kemudian dimasukkan dan diikat dengan bilah papan yang lain. Di bagian sisi yang tebal, diperkuat dengan pasak-pasak kayu/bambu. Teknik penyambungan papan seperti ini dikenal dengan istilah "teknik papan ikat dan kupingan pengikat" (*sewn-plank and lashed-lug technique*) (Horridge 1982).

Sisa perahu yang ditemukan di Samirejo dan Kolam Pinisi (keduanya di wilayah Palembang) serta di dasar laut perairan Cirebon, juga yang ditemukan di tempat lain di Nusāntara dan Malaysia, memiliki kesamaan umum yang dapat dicermati, yaitu teknologi pembuatannya. Teknologi pembuatan perahu yang ditemukan itu antara lain a) teknik ikat, b) teknik pasak kayu/bambu, c) teknik gabungan ikat dan pasak kayu/bambu, dan d) perpaduan teknik pasak kayu dan paku besi. Melihat teknologi rancang-bangun perahu tersebut, dapat diketahui pertanggalannya (Koestoro 1993, C1-1-10).

Bukti tertulis tertua yang berhubungan dengan penggunaan pasak kayu/bambu dalam pembuatan perahu/kapal di Nusāntara berasal dari sumber Portugis awal abad ke-16 Masehi. Dalam sumber itu disebutkan bahwa perahu-perahu niaga orang Melayu dan Jawa yang disebut *jung* (berkapasitas lebih dari 500 ton) dibuat tanpa sepotong besi pun di dalamnya. Untuk menyambung papan maupun *gading-gading* hanya digunakan pasak kayu. Cara pembuatan perahu dengan teknik tersebut masih tetap ditemukan di Nusāntara, seperti yang terlihat pada perahu-perahu niaga dari Sulawesi dan Madura yang kapasitasnya lebih dari 250 ton.

Dari sekian banyak perahu kuno yang ditemukan di perairan Nusāntara, sebagian besar dibangun dengan *teknik tradisi Asia Tenggara*. Keturunan dari kapal-kapal yang dibangun dengan *teknik tradisi Asia Tenggara* adalah kapal Pinisi dan beberapa perahu tradisional di berbagai daerah di Nusāntara. Pada perahu Pinisi, *teknik papan ikat dan kupingan pengikat* dengan menggunakan tali ijuk sudah tidak dipakai lagi. Para pelaut Bugis sudah menggunakan teknik yang agak modern, tetapi masih mengikuti *teknik tradisi Asia Tenggara*.



Dari data arkeologis yang berupa papan-papan runtuh perahu, sulit kita merekonstruksi bagaimana bentuk perahu di masa lampau. Satu-satunya data dokumentasi bentuk dan “ukuran” perahu abad ke-8 Masehi adalah dari relief yang dipahatkan pada dinding Candi Borobudur. Nenek moyang kita dengan ketelitiannya telah merekam bermacam-macam moda transportasi air mulai dari perahu kecil untuk melayari sungai dan danau, hingga perahu besar dengan layar dan cadik untuk melayari samudera (van Erp 1923-1924, 227-255).

Bangsa Indonesia pada hakekatnya adalah bangsa bahari di mana seharusnya kita memandang laut sebagai pemersatu Nusāntara. Kelompok yang hidup di daerah pesisir dan di daerah pegunungan (pedalaman) satu sama lain saling membutuhkan seperti kata pepatah “garam di laut asam di darat, bertemu di belanga jua”. Nenek moyang kita telah mengajari bagaimana cara “mengelola pusaka” dengan kearifan yang dimiliki. Juga sukubangsa-sukubangsa yang hidup di Nusāntara telah mengajari kita bagaimana mereka mencari makan dari warisan pusaka nenek moyangnya sambil melestarikan.

Pada saat ini, akibat dari berbagai “tekanan” masyarakat Indonesia terpaksa menjadi masyarakat agraris. Salah satu akar budaya dari sisi kebaharian sudah terlalu lama dilupakan. Akibat dari lamanya menjadi Negara Agraris, segi-segi kebaharian sudah lama dilupakan. Contoh nyata ketika terjadi tsunami di Aceh. Orang bukannya menjauhi laut ketika air surut jauh ke tengah, mereka beramai-ramai lari menuju tengah laut. Akibat dari itu banyak terjadi korban yang hanyut terbawa arus.

***Penulis adalah Kerani Rendahan pada Pusat Arkeologi Nasional,
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.***



BAGIAN II
DINAMIKA BAHARI



terbang tinggi burung bangau
berenang tenang ikan pari
wawasan dwīpāntara satukan pulau
wawasan nusāntara satukan negeri

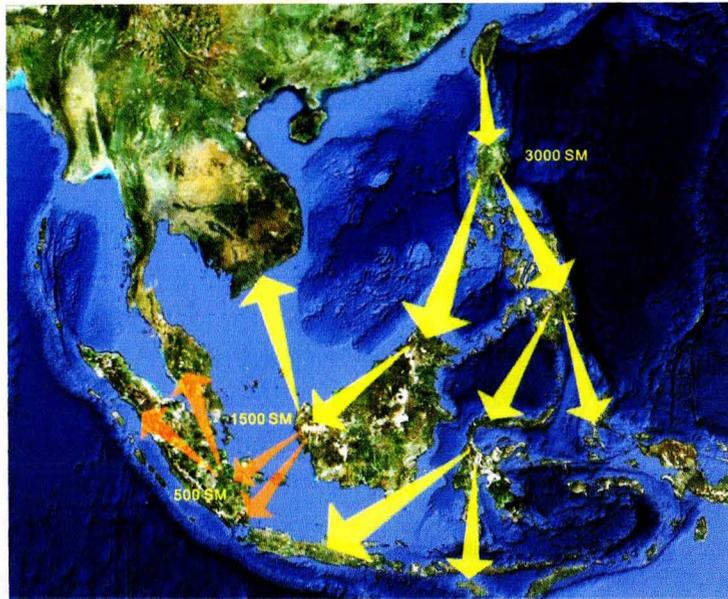
MELAYU dan KEBAHARIAAN di NUSANTARA DALAM KONTEKS NEGARA KEPULAUAN*

Bambang Budi Utomo

Siapa sebenarnya nenek moyang Bangsa Bahari? Sebagian orang beranggapan bahwa orang-orang yang bertutur “bahasa” Austronesia-lah nenek moyangnya. *Austronesia* adalah istilah yang dipakai oleh pakar linguistik untuk keluarga bahasa yang berkembang di Taiwan antara 5000-7000 tahun yang lampau.

Di Taiwan orang-orang ini mengembangkan teknik-teknik pertanian yang didapat dari Tiongkok Selatan, beradaptasi dengan lingkungan pulau, dan belajar menyeberangi selat (Selat Formosa). Sejak sekitar millenium ke-3 Sebelum Masehi (SM), mereka mengembara ke arah selatan menuju Filipina. Di tempat ini mereka membawa dan mengembangkan teknik perladangan berpindah, teknik membangun perahu, dan teknik membuat barang-barang tembikar. Pada akhirnya mereka membentuk sub-rumpun bahasa Melayu-Polynesia.

Menjelang millenium pertama Sebelum Masehi, para penutur rumpun bahasa Melayu-Polynesia barat sudah mencapai pesisir Indocina (Champa), Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Pada periode berikutnya, secara bersinambungan mereka sudah berlayar jauh hingga ke Madagaskar di pantai timur Afrika. Akibat berhubungan secara bersinambungan, kemudian tumbuh budaya Melayu-Polynesia Barat (Malagasy) dan berkembang secara mandiri (Belwood 1985, Bab IV).



* Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Hari Nusantara dengan tema “Pelebagaan Budaya Bahari” yang diselenggarakan di Mataram, Lombok, pada 13 Desember 2012.

Kelompok penutur rumpun bahasa Austronesia yang menyebar ke arah timur membentuk rumpun bahasa Melayu-Polynesia Timur. Perkembangannya di daerah pantai-pantai kawasan timur Nusāntara, seperti Halmahera dan pantai utara Irian. Dari tempat ini kemudian diteruskan sampai ke seluruh penjuru Pasifik, Tonga, Samoa, Hawaii, Easter Island dan yang terjauh ke Selandia Baru.

Populasi para penutur rumpun bahasa Austronesia yang jumlahnya lebih dari 400 juta, menempati wilayah dari Madagaskar di barat hingga Easter Island (Pulau Paskah) di timur, dan dari Taiwan/Micronesia di utara hingga Selandia Baru di selatan. Benang merah yang menyatukan mereka adalah teknik bercocok-tanam, teknik pembuatan perahu, dan teknik pembuatan tembikar (Tanudirdjo 2005).

Puak Melayu

Melayu dalam perwujudannya mempunyai tiga konsep yang masing-masing mengacu pada bentuk yang berbeda, yakni ras sebagai suatu ciri-ciri fisik secara biologi yang membedakannya dengan ras lain dengan ciri-ciri fisik dari kelompok lain; suku-bangsa sebagai suatu jatidiri yang lebih mengacu pada ciri-ciri fisik, gaya bicara yang pada akhirnya sebagai perwujudan dalam tingkat sosial dengan dasar *askriptif*; dan kemudian kebudayaan yang mengacu pada model-model dan cara memahami serta menginterpretasi lingkungan yang kemudian dipakai untuk mendorong terwujudnya kelakuan dan benda-benda budaya.

Ketiga konsep ini menjadi satu dalam memahami apa yang disebut sebagai orang Melayu, dan tentunya penjabaran masing-masing konsep serta keterkaitannya satu dengan lainnya akan sangat berbeda-beda keluasannya. Bila bicara Melayu secara ras, maka yang terjadi akan melewati areal kesukubangsaan Melayu itu sendiri karena melibatkan suku-suku bangsa lainnya seperti Minangkabau, Batak, sebagai paparan daerah ras. Bila berbicara Melayu secara suku-bangsa maka yang terdeteksi adalah adanya pengelompokan-pengelompokan jatidiri Melayu ini yang didasari pada informasi yang didapat dari interaksi kelompok-kelompok tersebut dengan suku-bangsa lainnya, seperti adanya suku-bangsa Melayu di Jambi, Sumatra Barat, Riau dll. Kesemua informasi tersebut didapat dari serentetan hubungan dengan suku-bangsa lainnya di daerah-daerah setempat. Apabila berbicara Melayu secara kebudayaan maka akan tampak perbedaan-perbedaan yang besar antara satu kelompok Melayu dengan kelompok Melayu lainnya, karena masing-masing kelompok berada dan hidup dalam lingkungan alam, sosial dan binaan yang berbeda-beda. Kelompok Melayu yang tinggal di tepian sungai besar dan pesisir, umumnya hidup dari berdagang dan nelayan, sedangkan yang hidup di pegunungan bermata-pencarian sebagai petani dan peladang.

Kelompok Melayu yang berada di daerah Jambi, lebih banyak bersentuhan dengan kelompok Kubu, sehingga mempunyai model-model yang berbeda dengan kelompok-kelompok Melayu yang bersentuhan dengan kelompok Sakai, atau kelompok Minangkabau, dsb. Akan te-

tapi secara garis besar, pada umumnya kelompok-kelompok Melayu ini di mana pun mereka tinggal akan selalu diidentikkan dengan Islam. Seperti Melayu sama dengan Islam di daerah Sakai, atau Islam sama dengan Melayu di daerah Kubu, dan Melayu sama dengan Islam di Barus (pantai barat Sumatra Utara).

Bila ditelusuri persebaran orang Melayu secara suku-bangsa maka akan dapat dilihat dari model-model mitologi yang menyertainya yang dapat dijadikan acuan kesukubangsaan tentang penguasaan wilayah dimana kelompok tersebut menetap dan tinggal. Dari mitologi yang ada maka bisa tergambar kapan dan sampai dimana batas-batas kesukubangsaan Melayu tersebut ada dan kelompok mana yang menjadi 'tetangga'-nya. Mitos dan kosmos merupakan fokus dalam suatu kegiatan ritus yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang melingkupi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, bagaimana cara manusia memahami diri mereka, keberadaannya sebagai anggota masyarakat dan di dunia sebagai satu kesatuan. Hasil pemahaman manusia terhadap alam sekitarnya dimanifestasikan kedalam kehidupan sosial dan berusaha menjelaskan dan menciptakan pembenaran keadaannya sebagai masyarakat, baik bentuk asal maupun cara kehidupannya. Hasil pemahaman tersebut biasanya dimanifestasikan dalam bentuk cerita yang diinformasikan dari orang ke orang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekitar 75% dari penduduk Indonesia adalah ras Melayu. Karena itulah tidak heran ketika sebelum Indonesia merdeka pernah ada pemikiran dibentuknya negara Melayu Raya atau Indonesia Raya yang wilayahnya meliputi Semenanjung Tanah Melayu, seluruh Kalimantan (termasuk Kalimantan Utara, dan Nusāntara. Penduduk Indonesia yang tidak termasuk Melayu (bukan Mongoloid) adalah Papua dan sebagian Nusa Tenggara Timur. Mereka ini termasuk dalam ras Papuid. Konsekuensi apabila terbentuk negara Melayu Raya atau Indonesia Raya, maka Papua atau Irian Barat tidak termasuk dalam negara Melayu Raya atau Indonesia Raya. Beruntunglah para pendiri bangsa menamakannya Republik Indonesia yang wilayahnya di bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda (*Nederlansche Indië*).

Sebagai sukubangsa Melayu, sejak masa perpindahan para penutur rumpun bahasa Austronesia, dalam darah mereka sudah mengalir darah bahari. Para pelaut Melayu sudah lama dikenal sebagai pelaut yang ulung yang mahir mengarungi samudera. Penguasaan laut Nusāntara seperti cuaca, geografi laut, dan astronomi sudah dikuasai dengan baik. Konon peta-peta laut Nusāntara (*Roteiros*) bangsa Eropa (Portugis) dibuat atas bantuan pelaut-pelaut Melayu.

"Nenek moyangku orang pelaut. Gemar mengarung luas samudra" Sepenggal lagu anak-anak ini pada tahun 1960-an sering dinyanyikan oleh anak-anak Sekolah Ra'yat. Seiring dengan "ke daratnya" orang, lagu yang mengingatkan kita sebagai bangsa bahari ini mulai jarang dinyanyikan. Artinya orang sudah mulai melupakan akar budayanya. Orang sudah mulai melupakan laut. Hanya orang-orang yang hidup kesehariannya di laut yang tidak lupa laut. Lihatlah betapa banyak korban yang sedang bertamasya di pantai ketika tsunami melanda Aceh hanya karena kurangnya pengetahuan tentang perilaku laut.

Wawasan Nusāntara memandang laut sebagai satu keutuhan wilayah, dengan darat udara, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya yang tidak mungkin dipisah-pisahkan (Kusumaatmadja 1986). Jadi, ketika orang mulai “menjauhi” laut, maka mulai terpisahlah bangsa ini. Padahal melihat sejarah penyebarannya, mayoritas sukubangsa yang ada di Nusāntara ini berasal dari satu induk, yaitu para penutur rumpun bahasa Austronesia.

Sukubangsa Bahari

Melihat pembagian wilayah di Nusāntara, maka Nusāntara dihuni oleh dua ras besar, yaitu Mongoloid dan Papuid. Ras Mongoloid menurunkan sukubangsa-sukubangsa Melayu, sedangkan ras Papuid menurunkan orang-orang Papua dan orang-orang yang tinggal di kawasan Nusatenggara Timur. Kedua ras tersebut menurunkan sukubangsa-sukubangsa bahari. Namun yang utama adalah Ras Mongoloid dengan bangsa Melayu-nya yang tangguh di lautan.

Sukubangsa Lamalera

Berada di tepi pantai Laut Flores, masyarakat di Lamalera, Pulau Lembata (dahulu disebut Pulau Lomblen), Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan aktivitas penangkapan ikan paus dengan menggunakan peralatan serba tradisional. Peralatan dimaksud berupa layar, tali (yang dibuat dari benang kapas, daun gebang, dan serat kulit pohon waru), *kafe* yaitu *tempuling* atau harpoon, *peledang* (perahu) dari kayu, sampan, galah tempat menancapkan harpoon untuk menombak, alat untuk menggayung air, gentong air, maupun *faye* (alat untuk mendayung).

Di tempat itu musim perburuan ikan-ikan besar, seperti ikan paus, pari, dan hiu dari berbagai jenis oleh masyarakat disebut sebagai musim *lefa* atau yang lebih dikenal dengan nama *olanua* (mata pencaharian). Proses ritual *olanua* dimulai sejak 1 Mei hingga 31 Oktober. Dengan masuknya agama Katolik pada tahun 1886 di Lamalera, prosesi ritual tradisi ini mendapat bentuk baru dengan upaya inkulturasi dari Gereja Katolik. Misalnya sebelum musim *lefa* atau *olanua* dimaknai dengan upacara misa di pantai, pemberkatan *peledang* oleh pastor, doa bersama, dan penggunaan air suci untuk kepentingan upacara bersih diri dari salah dan dosa.

Tradisi ini diawali dengan upacara misa dan *ceremoti*, upacara tradisional dimana seluruh komponen masyarakat Kampung Lamalera duduk bersama di pantai bermusyawarah untuk membicarakan seluruh persoalan kampung, persoalan perburuan dengan berbagai ta-

hapan yang mesti dilaksanakan dalam perburuan itu. Upacara *olanua* ini menjadi unik dan demikian menarik karena rentetan upacara dan segala macam ritual adat dan agama Katolik. Perjumpaan kedua aspek ini menjadi begitu kental dan akrab dalam seluruh proses kehidupan masyarakat Lamalera.

Malam sebelum keesokan harinya mereka melaut, semua suku yang memiliki perahu berdoa di rumah adat masing-masing. Mereka berbagi pengalaman dan mendengar petuah dari yang dituakan. Intinya masing-masing individu harus dapat menjaga ketenteraman, menjaga tutur kata, tidak boleh bertengkar dengan sesama, tetangga, dalam rumah tangga suami dan isteri, anak tidak ada perselisihan dan pertengkaran. Melanggar semua hal tersebut berarti kerja keras di laut tak membawa hasil. Masyarakat Lamalera meyakini bahwa hubungan antara yang di darat dan di laut merupakan hubungan sebab akibat. Keduanya saling mendukung dan saling menentukan. *Atamole* sebagai ahli pembuat *peledang* di darat memiliki peran sendiri yang berbeda dengan *lamafa*, juru tikam di laut. Salah, keliru, atau bahkan lalai membagi hasil tangkapan juga akan membawa dampak buruk terhadap proses penangkapan ikan. Karena itu masyarakat Lamalera sangat menjaga hubungan itu jangan sampai ternoda atau tercela.



Seluruh hasil tangkapan ikan pertama-tama diperuntukkan bagi para janda, fakir miskin, dan yatim piatu. Mereka mendapat tempat utama dalam seluruh prosesi perburuan ikan. Dalam setiap nyanyian adat, doa, dan permohonan dari nelayan, kehadiran para janda, fakir miskin, dan yatim piatu menjadi tujuan utama dari seluruh karya mereka di laut. Dalam tradisi *olanua* ada aturan dimana masyarakat Lamalera mempunyai komitmen untuk tidak boleh menombak ikan paus atau ikan lain yang sedang bunting. Peran *lamafa* (juru tikam) dalam memilih objek yang hendak ditombak menjadi sangat penting. Filosofi di balik itu adalah untuk menjaga kelestariannya supaya ikan-ikan tersebut tidak punah.

Masyarakat Lamalera meyakini bahwa dengan menangkap ikan paus, pari, dan berbagai jenis ikan besar lainnya dapat menghidupi seluruh masyarakat Lamalera, bahkan tradisi barter merupakan prinsip yang dianut oleh masyarakat Lamalera dan Pulau Lembata pada

umumnya. Dalam keseharian ikan ditukar dengan jagung, padi, singkong, buah-buahan, dan berbagai komoditas pertanian lainnya. Diketahui bahwa dengan hasil hasil itu masyarakat Lamalera dapat menyekolahkan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi.

Sukubangsa Laut

Sukubangsa Laut atau Orang Laut terdiri atas kelompok-kelompok sosial yang berdiam di berbagai kawasan perairan Nusāntara, seperti di perairan sebelah timur Sumatera, Selat Melaka sampai Myanmar, pesisir timur Semenanjung Tanah Melayu hingga ke Thailand, sekitar Kalimantan/Borneo, Sulawesi hingga ke Filipina, dan perairan Nusatenggara Timur (Barnes 1996; Ishak 1980). Kelompok masyarakat itu sering disebut Sukubangsa Bajau di Kalimantan, Nusatenggara, dan Sulawesi (Harris 1980), Ameng Sewang di Bangka dan Belitung, dan Orang Selat di Selat Melaka. Mereka tidak tinggal menetap di satu tempat, tetapi berpindah-pindah dari satu perairan dangkal ke perairan dangkal lain. Biasanya mereka mengelompok pada perahu-perahu yang ditambatkan pada muara-muara sungai besar. Ada juga yang tinggal di perkampungan yang dibangun di atas air di muara-muara sungai besar. Rumah tinggal mereka disebut rumah kolong dimana bagian kolong rumah dipakai untuk menambatkan perahu.

Gambaran yang mirip dengan kehidupan Suku Laut ini diperoleh dari catatan pengelana Tionghoa. Sebuah berita Tionghoa yang berasal dari tahun 1225 menguraikan tentang rakyat di kerajaan San-fo-tsi (Hirth & Rockhill 1911, 65). Disebutkan bahwa rakyat tinggal di sekitar kota atau di atas rakit yang beratap rumbia. Mereka itu tangkas dalam peperangan baik di darat maupun di laut. Dalam peperangan dengan kerajaan lain, mereka berkumpul. Berapa pun keperluannya dipenuhi. Mereka sendiri yang memilih panglima dan pemimpinnya. Semua pengeluaran untuk persenjataan dan perbekalan ditanggung oleh mereka masing-masing. Dalam menghadapi lawan dengan resiko mati terbunuh, di antara bangsa-bangsa lain sukar dicari tandingannya. Mungkinkah *Orang Laut* yang mendiami Sumatera bagian timur itu keturunan dari mereka itu?

Dilihat dari latar belakang asal usul mereka, para ahli mengkategorikan Orang Laut sebagai sisa keturunan bangsa-bangsa penutur rumpun bahasa Austronesia yang bermigrasi dari Asia daratan pada 2.500-3.500 tahun yang lampau. Mereka ini menyebar ke Nusāntara dan pantai pesisir Asia Tenggara daratan hingga ke Champa. Mereka termasuk dalam golongan Melayu Tua (Proto Melayu) dengan ciri-ciri fisik Mongoloid.

Sukubangsa Ameng Sewang (Setyobudi 1987) kiranya dapat dijadikan contoh untuk mengenali pola kehidupan sosial budaya Orang Laut secara keseluruhan. Naskah-naskah lama menyebutkan bahwa Orang Laut sudah lama hidup di perahu mengelompok di daerah perairan

dangkal, dan tidak pernah tinggal di darat. Orang Laut beranggapan bahwa darat adalah tempatnya orang mati, sedangkan laut tempatnya orang hidup dan mencari kehidupan. Sebuah laporan Belanda menyebutkan bahwa pada tahun 1668 sebuah kapal Belanda yang merapat di Belitung, para awaknya diserang oleh orang Ameng Sewang. Ini artinya, pada masa itu orang Ameng Sewang telah mempunyai suatu kekuatan yang patut diperhitungkan.

Laut adalah tempatnya Orang Laut hidup dan mencari kehidupan. Kawasan perairan tempatnya mereka mencari kehidupan adalah Selat Karimata, sebuah selat di antara Laut Tiongkok Selatan dan Laut Jawa. Selat ini dikenal sebagai perairan yang ganas, terutama ketika angin musim barat. Pada musim ini Orang Laut tidak melaut. Mereka berlindung di teluk atau di muara sungai yang terlindung dari angin dan ombak yang ganas. Kadang-kadang sampai berbulan-bulan lamanya mereka berlindung sampai musim kembali tenang.

Sukubangsa Bajau adalah sukubangsa yang tanah asalnya Kepulauan Sulu, Filipina Selatan. Sukubangsa ini merupakan sukubangsa nomaden yang hidup di laut, sehingga kerap disebut gipsi laut. Sejak ratusan tahun yang lalu mereka sudah menyebar ke negeri Sabah dan berbagai wilayah Nusāntara. Sukubangsa Bajau juga merupakan anak negeri di Sabah. Sukubangsa Bajau yang sudah Islam ini merupakan gelombang terakhir migrasi dari arah utara Kalimantan yang memasuki pesisir Kalimantan Timur hingga Kalimantan Selatan dan menduduki pulau-pulau sekitarnya, lebih dahulu daripada kedatangan suku-suku Muslim dari rumpun Bugis yaitu Sukubangsa Bugis, Sukubangsa Makassar, Sukubangsa Mandar.



Wilayah tempat Sukubangsa Bajau berada dan bermata-pencaharian hidup, antara lain: Kalimantan Timur (Berau, Bontang, dan lain-lain), Kalimantan Selatan (Kota Baru) disebut orang Bajau Rampa Kapis, Sulawesi Selatan (Selayar), Sulawesi Tenggara, Nusatenggara Barat, dan Nusatenggara Timur (Pulau Komodo).

Bahasa Orang Laut memiliki kemiripan dengan Bahasa Melayu dan digolongkan sebagai Bahasa Melayu Lokal. Saat ini mereka umumnya bekerja sebagai nelayan. Seperti Sukubangsa Bajau, Orang Laut kadang-kadang dijuluki sebagai "kelana laut" atau "gipsi laut", karena mereka hidup berpindah-pindah di atas perahu.

Termasuk juga Sukubangsa Laut adalah Suku Sekak. Merupakan sukubangsa yang mendiami pesisir sepanjang pesisir utara Pulau Bangka. Ciri khas sukubangsa ini adalah mereka selalu mendiami daerah pesisir pantai dan mata pencaharian mereka adalah nelayan. Sukubangsa Sekak merupakan rumpun bangsa Melayu yang mana bahasa dan dialek yang digunakan hampir mirip dengan bahasa Melayu namun ada perbedaan yang cukup mencolok antara Sukubangsa Sekak atau orang Sekak dibandingkan dengan orang yang mendiami Pulau Bangka sekalipun warna kulit yang agak hitam. Kalau dilihat sepintas ada kemiripan dengan sukubangsa-sukubangsa lain di Indonesia khususnya di daratan Sumatera, apalagi telah berinteraksi dengan sukubangsa lain.

Negara Kepulauan

“Niatan” bangsa bahari ini untuk membangun sebuah negara kepulauan sudah tampak sejak masa Kerajaan Siṅhasāri di bawah pimpinan Raja Kērtanāgara. Dalam Prasasti Cāmundi (1270 Masehi), raja ini menuliskan niatnya hendak menyatukan seluruh *dwipāntara*. Tindakan ini dilakukan untuk menahan ekspansi tentara Mongol yang hendak meluaskan wilayah hingga ke Nusāntara.

Setelah Kerajaan Siṅhasāri, rupa-rupanya niatan membentuk sebuah negara kepulauan memakan waktu yang panjang. Kerajaan-kerajaan maritim yang pernah hadir di Nusāntara ini belum mampu untuk mewujudkannya. Kerajaan-kerajaan itu hanya sebatas menguasai, tetapi tidak memeliharanya. Ketika penguasanya jatuh, maka kerajaannya menjadi hancur cerai berai.

Ratusan tahun sudah berlalu sejak Kērtanāgara dengan “wawasan” *dwipāntara*-nya dicetuskan. Bahkan sampai terbentuknya Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, laut di antara pulau adalah laut bebas yang dapat dilalui seenaknya oleh kapal-kapal asing. Kemudian pada tanggal 13 Desember 1957, secara sepihak Perdana Menteri Ir. H. Djoeanda mendeklarasikan bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan dan laut di antara pulau termasuk wilayah yuridiksi Indonesia.

Deklarasi Djoeanda 1957 kemudian dikemukakan pada Konferensi Hukum Laut I tahun 1958 di Jenewa, Swiss. Perjuangan untuk menuju pengakuan internasional masih panjang. Dengan diprakarsai Perserikatan Bangsa-bangsa, pada tahun 1982 ditandatangani Hukum Laut Internasional oleh 119 negara peserta. Konvensi ini disebut *United Nation Convention on Law of the Sea (Unclos 1982)* yang mewadahi dan mengatur Negara Kepulauan (*Archipelagic States*). Konvensi ini berlaku efektif pada 16 November 1994, yaitu ketika lebih dari 60 negara meratifikasinya. Indonesia meratifikasi *Unclos 1982* melalui UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut).

Selanjutnya, atas perjuangan Menteri Luar Negeri Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dicetuskanlah konsep Wawasan Nusāntara. Wawasan Nusāntara mencakup perwujudan Nusāntara sebagai suatu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan budaya dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Semua *laut dalam* (laut di antara pulau di Nusāntara) yang dengan ketentuan 12 mil merupakan laut bebas, tidak lagi menjadi laut internasional tetapi sebagai laut pedalaman yang termasuk sebagai kawasan laut teritorial dari suatu negara kepulauan.

Limapuluh tahun sudah Indonesia menjadi Negara Kepulauan (*Archipelagic State*), dan untuk menuju ke arah itu tidaklah mudah. Perlu waktu, tenaga, dan pikiran yang menguras tenaga. Perjalanan sejarah Indonesia yang panjang dengan kejadian-kejadian sejarah, merupakan pengalaman yang berharga. Bukan hanya sekedar untuk kebanggaan semata, karena kebanggaan itu membuat kita sombong dan akhirnya terlena dengan kisah sejarah. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita memelihara dan mempertahankan *Negara Kepulauan* ini.

Penutup

Masyarakat Indonesia bila dilihat secara ras, terdiri dari dua ras besar yaitu ras Melayu dan ras Melanesia yang merupakan ras asli yang tumbuh dan berkembang di tempat aslinya. Dua ras besar yang ada di Indonesia yang merupakan asli dari penduduk di Indonesia yang tidak akan sama bentuk fisiknya. Selain dari dua ras besar yang berbeda itu, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai sukubangsa dengan ciri-ciri kedaerahan yang khas yang kadang-kadang bertentangan satu dengan lainnya. Begitu juga dengan pola hidup yang dari seluruh pola hidup manusia, semuanya terdapat di Indonesia dari berburu meramu sampai dengan industri barang dan jasa. Sukubangsa-sukubangsa yang ada ini dapat diidentifikasi ke dalam pulau-pulau yang terdapat di Indonesia.

Kelompok-kelompok masyarakat yang hidup di Nusāntara ini, hidup dalam alam budaya bahari, terutama pada masyarakat yang hidup di daerah pesisir dengan matapencaharian hidupnya sebagai nelayan. Alat transportasi yang dibuat/dibangun adalah perahu dengan teknologi yang khas Asia Tenggara, yaitu teknik “papan ikat dan kupingan pengikat”.

Sukubangsa bahari dalam artian sesungguhnya adalah Suku Laut atau sering disebut Orang Laut. Sukubangsa ini tidak pernah tinggal menetap di suatu tempat. Mereka hidup mengembara dari suatu perairan dangkal ke perairan dangkal lain. Mereka tidak memerlukan teknologi modern, seperti kompas. Dalam usaha menentukan arah mereka perpatokan pada bintang-bintang di langit. Mata-pencaharian hidupnya sebagian besar nelayan. Mereka “tidak mencari” ikan, tetapi mereka “menangkap” ikan.

Sukubangsa bahari lain di Nusāntara yang menjaga kelestarian lingkungan adalah Sukubangsa Lamalera di Nusatenggara Timur. Dalam usaha menangkap ikan paus atau ikan pari, mereka tidak sembarang menangkap atau memburunya. Masih banyak lagi sukubangsa di Indonesia yang menjaga kelestarian lingkungan alam tempatnya hidup dengan menggunakan kearifan lokal yang dimilikinya.

Usaha menyatukan Nusāntara oleh sukubangsa bahari tanpa disadari sudah berlangsung lama. Pada masa Śrīwijaya (abad ke-7-10 Masehi) usaha penyatuan sudah dimulai di belahan barat Nusāntara. Kemudian hal yang sama dilakukan oleh Mahārāja Kērtanāgara dari Kerajaan Siṅhasāri juga di belahan barat Nusāntara. Tujuannya adalah untuk bersatu padu dalam menghadapi serangan tentara Mongol yang datang dari arah utara. Setelah mengalami perjalanan sejarah yang panjang, pada akhirnya penyatuan Nusāntara secara politis dapat diakui oleh dunia internasional, yaitu dengan ditandatanganinya Hukum Laut Internasional pada tahun 1982. Bersama-sama dengan Jepang, Filipina, dan Inggris, Indonesia diakui sebagai Negara Kepulauan yang terluas.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa Bangsa Bahari dalam menyikapi lingkungan tempatnya hidup harus melihat bahwa **laut bukan sebagai pemisah, tetapi laut adalah sebagai pemersatu!** Inilah salah satu cara dalam menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kepulauan dengan penduduk yang multikultur.

*Penulis adalah Kerani Rendahan pada Pusat Arkeologi Nasional,
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.*

AKULTURASI BUDAYA SUKU BAJO DENGAN BUDAYA SEKITAR*

Tasrifin Tahara

Pengantar

Si Nursim Putra Bajo baru saja menginjakkan kaki di Desa Mola Samaturu sebuah desa yang merupakan salah satu desa di perkampungan Suku Bajo Kabupaten Wakatobi.⁷ Lelah karena perjalanan jauh dari Kota Kendari melewati Kota Baubau dengan menggunakan kapal seakan tiada terasa dikarenakan rasa girangnya saat membayangkan dirinya akan kembali bersua dengan sanak saudara. Ia ingin membagi kebahagiaan kepada keluarganya karena sudah menjadi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Haluoleo (UNHALU) Kendari. Ia adalah pemuda Suku Bajo yang tengah berjuang menunjukkan identitas kelompoknya bukan lagi sebagai komunitas yang hanya bisa menangkap ikan atau penyelam teripang, tapi jauh lebih maju lagi bahwa pengetahuan tentang kelautan yang menjadi “milik” komunitasnya kini lebih digeluti dalam dunia pendidikan tinggi layaknya kelompok lain karena selama ini Suku Bajo sangat minim yang bias menempuh pendidikan formal apalagi bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Selain sebagai sebuah kebahagiaan tersendiri, tetapi apa yang dilakukan oleh Si Nursim merupakan pergulatan identitas Suku Bajo yang selalu disematkan stereotip sebagai kelompok yang bodoh, yang tidak memiliki pendidikan.



* Makalah yang dipresentasikan dalam rangka Hari Nusantara, dengan tema “Membangkitkan Wawasan Budaya Bahari Melalui Peningkatan Peran SDM dan Iptek”, tanggal 28 November 2012 di Aston Denpasar Hotel, Bali.

⁷ Saat ini, jumlah penduduk Suku Bajo di Kepulauan Wakatobi kini 12 ribu orang, yang tersebar di beberapa kampung. Selain Mola Selatan, ada Desa Mantigola dan Sampela di Pulau Kaledupa serta Desa Lamanggau di Tomia. Mola terbanyak penduduknya, 7.000 orang dan paling “modern” dibanding Kampung Bajo lain karena beberapa rumah terbuat dari tembok, sebagian beratap seng, menunjukkan sisa-sisa “kejayaan” Suku Bajo.

Lain lagi dengan kisah kesuksesan Abdul Manan yang saat ini sebagai Presiden Bajo Indonesia. Pada tahun 1976, ia merantau ke Baubau melanjutkan SMP hingga SMA. Kemudian mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Kota Kendari ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) dan diterima sebagai staf pengajar pada Universitas Haluoleo (UNHALU) Kendari. Kemudian ia mendapatkan beasiswa Program Magister di Thailand Jurusan Manajemen Tropika. Abdul Manan merupakan Putra Suku Bajo yang satu-satunya memiliki pendidikan magister dan kini dipercaya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Presiden Bajo Indonesia.



Stereotip Terhadap Suku Bajo

Kisah Si Nursim dan Abdul Manan sebagai pintu awal memasuki detak jantung kehidupan Suku Bajo. Pengalaman mereka adalah titik awal untuk mengetahui bahwa selama ini Suku Bajo diperlakukan dengan cara yang direndahkan dan perlakuan tersebut, tersimpan rapi dalam benak mereka. Sebagaimana lazimnya dalam etnografi, kisah kedua orang tersebut menjadi jendela awal untuk melihat akulturasi Suku Bajo, bagaimana interaksi mereka dengan etnis di sekitar komunitasnya, serta bagaimana mereka membangun strategi serta negosiasi makna, di tengah situasi hubungan yang direndahkan dan hanya dikenal sebagai suku penangkap ikan, penyelam teripang, melawan perampok-perampok yang berbahaya, bahkan konon sebagai perompak di laut.

Pasca reformasi di Indonesia banyak kalangan yang mewacanakan tentang bangkitnya kembali kesadaran identitas budaya dan identitas etnik di Indonesia, khususnya pada perkembangannya gerakan-gerakan sosial yang berupaya untuk memunculkan kembali eksistensi masyarakat lokal maupun identitas budaya lokal. Suku Bajo dan kelompok-kelompok lain sebagai komunitas yang sering disematkan stereotip dan marginalisasi oleh kelompok lain dan negara, kini melakukan perlawanan-perlawanan sebagai bentuk negosiasi dalam dinamika struktur (Lihat Tsing 1993; Maunati 2004; Tahara 2010). Manifestasinya pun beragam, seperti adanya gerakan sosial yang mengartikulasikan kembali proses pembentukan suatu identitas dengan tujuan untuk menegaskan kembali keberadaan suatu entitas sosial yang khas, atas dasar adanya kesamaan budaya, asal usul, kekerabatan, bahasa, agama, teritorial, dan sentimen primordial. Pada taraf yang paling ekstrem, gerakan-gerakan sosial kadang berkembang menjadi sebuah perlawanan terhadap negara yang mengancam

integrasi bangsa dan harmoni sosial dalam tatanan kehidupan bersama di tanah air ini. Meskipun berbagai upaya dan strategi telah dilakukan oleh pemerintah, namun upaya tersebut belum juga dapat menghilangkan perasaan sentimen etnis, prasangka, stereotip, dan bahkan mengarah pada konflik sosial (Tahara 2010).

Di wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia yang memiliki wilayah laut sekitar tiga perempat seluas 7,9 juta km² yang mempersatukan 17.504 pulau dengan 95.161 km garis pantai, yakni Suku Bajo (*sea gypsies*), Bugis, Makassar, Mandar, Buton, dan Madura (Horridge 1986). Di antara suku-suku maritim tersebut, tampaknya kehadiran orang Buton dalam kaitannya dengan laut belum banyak terungkap. Beberapa karya yang menulis tentang kemaritiman Buton adalah Michael Southon (1995), Schrool (2003), Rudyansjah (2009), dan Zuhdi (2010a) meskipun dalam beberapa karya hanya pada sejarah dalam konteks interaksi Gowa, Ternate dan VOC, tetapi juga terungkap jaringan pelayaran orang Buton. Selama ini belum ada peneliti yang mengungkap hubungan antara orang Buton dengan Suku Bajo, padahal dibagian tertentu seperti Tiworo dan Kepulauan Tukang Besi (sekarang Wakatobi) banyak dijumpai komunitas Suku Bajo yang sepenuhnya berkaitan dengan laut. Kedekatan antara orang Buton dengan Suku Bajo dapat dilihat dari adanya daerah yang bernama Pasar Wajo di Pulau Buton. Tempat ini merupakan interaksi antara orang Buton dan Bajo. Wajo bagi masyarakat Buton merupakan sebutan bagi Suku Bajo (Zuhdi 2010b).

Dalam proses interaksi antaretnik, dalam berbagai arena sosial, masih ada prasangka dan stereotip etnik terhadap Suku Bajo sebagai orang kotor, bodoh, dan bahkan sebagai kelompok perompak di laut. Sebagai kelompok yang disematkan stereotip, Suku Bajo mengembangkan strategi dengan mengembangkan politik identitas sebagai bentuk pengakuan atas etnik yang sejajar dengan kelompok lain. Jika prasangka dan stereotip ini terus diproduksi maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan antar etnik dan mengancam stabilitas bangsa. Oleh karena itu, perlu upaya tetap terjaganya integritas bangsa dan harmoni sosial masyarakat bahari di Indonesia ke depan, maka apreseasi terhadap budaya Suku Bajo perlu mendapat perhatian sebagai sarana perekat bangsa multietnik dan budaya ini.

Bajo: Sejarah yang Terabaikan

Dari manakah asal kata Bajo? Menurut Anna Tsing (1993), biasanya pertanyaan ini adalah awal untuk memulai sebuah etnografi. *Bajo*, *Bajau* atau *Sama Bajo* juga merupakan salah satu sukubangsa di Indonesia yang menyebar ke berbagai penjuru negeri. Konon nenek moyang mereka berasal dari Johor, Malaysia. Mereka adalah keturunan orang-orang Johor yang dititahkan raja untuk mencari putrinya yang melarikan diri. Orang-orang tersebut diperintahkan mencari ke segala penjuru negeri hingga Pulau Sulawesi. Menurut cerita, sang puteri memilih menetap di Sulawesi, sedangkan orang-orang yang mencarinya lambat laun memilih tinggal dan tidak lagi kembali ke

Johor. Dan konon menurut satu versi, sang puteri yang menikah dengan pangeran Bugis kemudian menempatkan rakyatnya di daerah yang sekarang bernama Bajoe di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan versi lainnya menyebutkan karena tidak dapat menemukan sang puteri, akhirnya orang-orang asal Johor ini memilih menetap di kawasan Teluk Tomini, baik di Gorontalo maupun Kepulauan Togian.

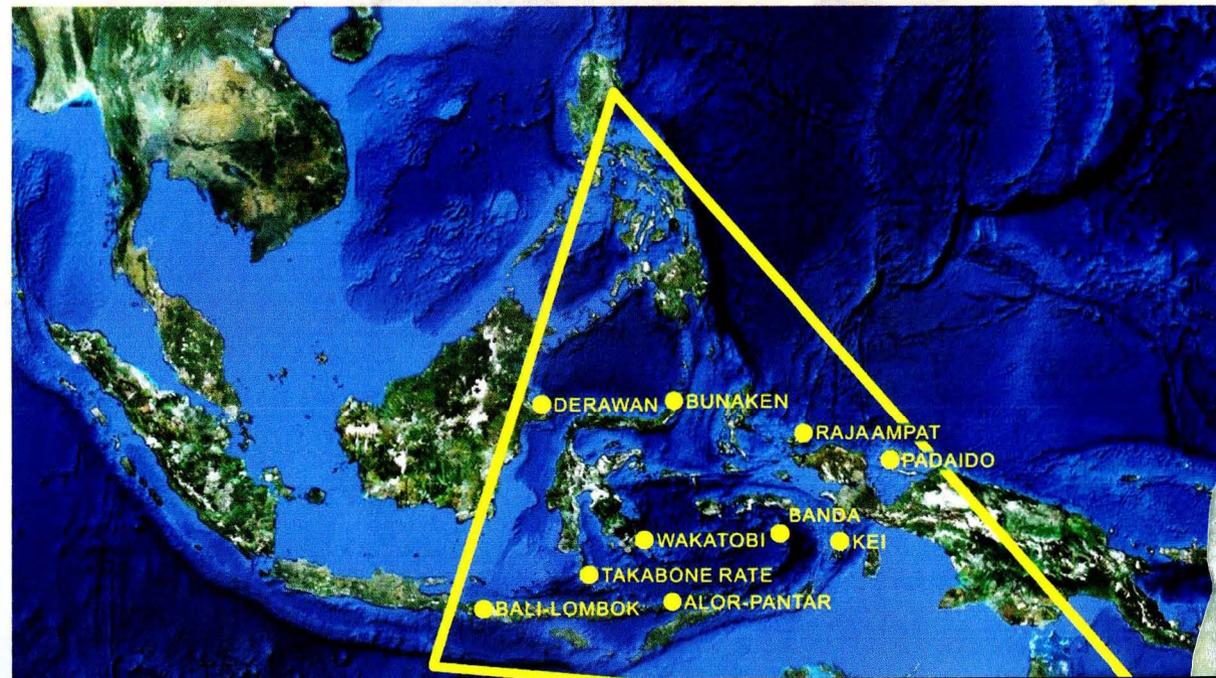
Suku Bajo dahulu tinggal dan menetap di atas air dengan rumah perahu yang dinamakan *bido*. Oleh karena itu, kehidupan orang Bajo yang tidak bisa dipisahkan dengan laut dan perahu yang kadang mereka hidup berpindah-pindah dari satu kumpulan karang ke karang lain di berbagai kepulauan di Asia Tenggara. Dalam catatan Magellan ditunjukkan bahwa Suku Bajo telah hidup sebagai orang laut sejak awal abad XVI.

Sejak penulis Eropa pertama kali menyebut Suku Bugis sebagai pelaut, hingga kini, mereka masih sering tidak dapat membedakan Suku Bugis dengan Suku Bajo. Sejak 1511, Tomé Pires, seorang Portugis, menyamakan saudagar Bugis yang berlayar ke Melaka dari tempat yang dia sebut Pulau "Macacar", dengan Suku Bajo yang dianggap sebagai perompak. Dari sejarah diketahui bahwa Suku Bajo bukan sekedar suku pengembara laut yang hanya tahu menangkap ikan. Mereka pun merupakan pemasok berbagai komoditi pasar internasional. Mereka sangat aktif mencari komoditi laut seperti kerang mutiara, teripang, sisik penyu, mutiara, kerang, karang, dan rumput laut.

Suku Bajo juga menyediakan berbagai komoditi pantai terutama dari hutan bakau seperti akar-akaran, kulit, dan kayu bakau yang digunakan sebagai bahan celup, serta kayu garu, damar, madu, lilin tawon lebah, dan sarang burung, baik yang terdapat di sekitar tempat mereka tinggal atau pun dari tempat-tempat yang mereka kunjungi (Andaya 1982). Aktivitas ini melibatkan mereka dalam hubungan perdagangan dan barter dengan Kerajaan Bugis dan Makassar.

Suku Bajo dikenal sebagai pelaut-pelaut yang tangguh. Namun, sejarah lebih mengenal Suku Makassar, Suku Bugis, atau Suku Mandar, sebagai raja di lautan. Padahal,

Peta Segitiga Karang Dunia Pemukiman Suku Bajo



Suku Bajo pernah disebut-sebut sebagai bagian dari angkatan laut Kerajaan Śrīwijaya. Karena itulah ketangguhan dan keterampilannya mengarungi samudera jelas tidak terbantahkan. Sejumlah antropolog mencatat, Suku Bajo lari ke laut karena mereka menghindari perang dan kericuhan yang terjadi di darat. Sejak itu, bermunculan manusia-manusia perahu yang sepenuhnya hidup di atas air.

Nama Suku Bajo diberikan oleh warga suku lain di Pulau Sulawesi sendiri atau di luar Pulau Sulawesi. Sedangkan warga Suku Bajo menyebutnya dirinya sebagai Suku Sama dan menyebut orang di luar sukunya dengan Suku Bagai. Bahasa Suku Bajo (*Baong Sama*), memperlihatkan sesuatu yang khas dalam masyarakat ini. Apabila mereka berada di antara sesama mereka, mereka menggunakan kata *sama* sebagai istilah rujukan dan untuk menunjukkan kelompok mereka. Istilah *sama* ini berposisi dengan “bagai” yang artinya semua masyarakat lain, di luar orang Bajo. *Sama* adalah orang Bajo yang keberadaannya berhubungan dengan *sama-sama* lainnya. Istilah ini mendukung gagasan untuk membuat Suku Bajo menjadi sebuah masyarakat, sebab istilah itu mengingatkan setiap orang bahwa ia merupakan warga dan termasuk di dalam kelompoknya. Arti istilah tersebut sangat jauh melampaui arti yang diberikan dalam bahasa Indonesia, seperti “serupa”, “sama”, “setara”.

Sejak kapan Suku Bajo meninggalkan kampung halamannya, sampai sekarang tidak ada yang mengetahui pasti. Namun satu hal yang pasti, berkat keterpencilan mereka selama sejarah, Suku Bajo membawa jejak-jejak perpindahan penduduk yang menghuni Asia Tenggara sekitar dua ribu tahun yang lalu⁸. Selama ini dalam memahami budaya masyarakat bahari, penafsiran sejarah Bajo kerap dilihat hanya berdasarkan cara pandang kelompok maritim di Nusāntara seperti Bugis, Makassar, Mandar, dan Buton. Padahal Sahlins (1985) mengatakan, perbedaan waktu dan tempat akan merefleksikan perbedaan sejarah juga⁹. Semua tempat memiliki sejarahnya masing-masing sebab sejarah tumbuh sebagai bagian dari kebudayaan. Jika penafsiran Sahlins (1985) digunakan untuk melihat konteks ini, sejarah Bajo masih dilihat sebagai sejarah pulau-pulau yang terabaikan (*history of neglected islands*) yang dianggap tidak penting dalam peta sejarah maritim di Nusāntara. Akibatnya Suku Bajo tidak banyak bersuara atau didengarkan suaranya sebab selalu dilihat dengan cara pandang kebudayaan dominan.

⁸ Robert dalam penelitiannya di Desa Torosiaje. Penulis meriwayatkan bahwa orang Bajo berbondong-bondong pindah tanpa tujuan yang pasti. Armada-armada bido (*soppe*) mulai menjelajahi ribuan kilometer melewati lautan-lautan Asia. Beberapa orang Bajo masih mengikuti petualang itu yang sekarang tampaknya merupakan nasib mereka. Selengkapnya lihat Francois Robert Zacot, 2008. *Orang Bajo Suku Pengembara Laut: Pengalaman Seorang Antropolog*, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.

⁹ Sahlins mengatakan, “The different cultural orders have their own modes of historical actions, conciousness, and determinations – their own historical practice. Other times, other customes, and according to otherness of the custom, the distinctive anthropology that is needed to understand any given human course.” Selengkapnya, lihat Sahlins, Marshall (1985) *Island of History*. Chicago & London: The University of Chicago Press.

Kedatangan kelompok Suku Bajo di Wakatobi sejak tahun 1958 dan pemukiman pertama di Mantigola (Kaledupa). Sebelum tahun 1958 yang pertama kali bermukim di Perairan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Bajoe Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian tahun 1963, akibat ketidaknyamanan mereka dengan adanya pemberontakan DI/TII maka pemukiman Suku Bajo menyebar di Pesisir Mandati (Pulau Wangiwangi) yang membentuk Perkampungan Bajo hingga sekarang.

Selain menetap di darat, Suku Bajo telah banyak yang kawin dengan komunitas sekitar mereka menetap seperti orang Wangiwangi atau Kaledupa, dan sebagian dari mereka seperti di Mola dapat berbicara dalam empat Bahasa: Sama, Bugis, Wanci, dan Indonesia. Di berbagai daerah, Suku Bajo yang akhirnya menetap, sedang lainnya masih berkelana di lautan. Mereka membangun pemukiman-pemukiman di berbagai penjuru Indonesia dan Asia Tenggara. Suku Bajo memang memiliki karakter yang unik. Mereka bisa berpindah-pindah lokasi, jika lingkungan di sekitarnya mengganggu mereka.



Dalam mempertahankan hidupnya, Suku Bajo berusaha mengembangkan hubungan-hubungan dagang atau kebudayaan dengan menggunakan perahu untuk berdagang pada wilayah-wilayah kampung tetangga tempat mereka menetap. Mereka tak dapat memperoleh prinsip-prinsip ekonomi lainnya karena mereka berpindah-pindah tempat dan hal itu penting bagi mereka.¹⁰ Mereka berpindah-pindah tempat dalam kelompok-kelompok kecil, tidak menguasai bahasa-bahasa penduduk lainnya, namun mereka berusaha mengadopsi beberapa bahasa yang menjadi mitra dalam hubungan-hubungan ekonomi. Suku Bajo dikenal mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, kendati tradisinya sendiri tetap berjalan dan termarginalkan dari proses pembangunan di Indonesia.

Suku Bajo: Negeri di Atas Karang

Salah satu sukubangsa yang sangat terkenal dengan pendukung kebudayaan bahari adalah Suku Bajo. Sejak dahulu, Suku Bajo dikenal sebagai pelaut ulung yang hidup matinya berada di atas lautan. Bahkan perkampungan merekapun dibangun jauh menjorok ke arah lautan bebas, tempat mereka mencari penghidupan. Laut bagi mereka adalah satu-satunya tempat yang dapat diandalkan. Julukan bagi mereka sudah barang tentu *sea nomads*, karena pada mulanya mereka memang hidup terapung-apung di atas rumah perahu. Suku Bajo

¹⁰ Prinsip-prinsip ini mungkin sudah banyak terjadi pergeseran dengan semakin banyaknya Suku Bajo yang hidup menetap di sekitar pesisir pantai wilayah tertentu.

inipun menyebar ke segala penjuru wilayah semenjak abad ke-16 hingga sekitar 40 – 50 tahun silam (perpindahan terakhir terjadi di berbagai wilayah di perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur).

Di mana ada laut, maka Suku Bajo itu mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan bekerja memanfaatkan potensi sumberdaya laut. Suku Bajo sejak lahir sudah dikenal dengan kehidupan di atas permukaan air. Inilah yang menyebabkan kerap kali mereka menolak untuk hidup di daratan meskipun secara diam-diam saling menjalin hubungan dengannya. Dalam konsepsi Suku Bajo, meninggalkan cara hidup di laut berarti meninggalkan adat istiadat hidup mereka. Bagi Suku Bajo, lautan merupakan tempat satu-satunya untuk menetap dan bertemu. Oleh karena itu, Suku Bajo memahami dunia menurut cara hidup dan prinsip bahwa mereka adalah orang-orang laut.

Kondisi psikologis berkenaan dengan kelautan, menyebabkan Suku Bajo tidak tertandingi pengetahuannya tentang laut. Kedekatan mereka dengan laut menyebabkan mereka bias adaptif dalam kondisi apapun di atas laut dan menjadikan kebanggaan bagi mereka sebagai kelompok suku pemilik budaya maritim. Hal inilah yang menyebabkan mereka merasa superior dengan identitas Suku Bajo.

Saat ini, jumlah Suku Bajo yang menggantungkan hidupnya di atas perahu diperkirakan semakin sedikit bahkan di Kepulauan Wakatobi sudah tidak ada yang hidup di atas perahu. Mereka sudah hidup menepi dan menetap di pesisir pantai dan mendirikan rumah panggung yang menggunakan bahan ramah lingkungan. Dindingnya terbuat kombinasi kayu dan anyaman bambu, bagian atap dari daun rumbia. Isi sebuah rumah terdiri beberapa anggota keluarga inti, dan pada umumnya menjadi sebuah keluarga luas yang terdiri dari ipar-ipar, sepupu, dan lain-lain.



Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Suku Bajo kadang diperhatikan dengan ketidakpastian. Mereka sangat tergantung dengan hasil tangkapan di laut untuk mendapatkan uang sebagai hasil penjualan hasil tangkapan tersebut. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pokok lain mereka sangat membutuhkan pihak-pihak luar. Khususnya Suku Bajo di Wakatobi, mereka sangat tergantung pada saudagar keliling dari darat yang menjual beras, sayur, buah-buahan atau dalam istilah Suku Bajo disebut *papayato* berasal dari pulau sekitar yang datang menggunakan perahu biasanya menjual keliling pada pukul 09.00 – 13.00. Selain melakukan transaksi dengan uang, biasanya Suku Bajo juga melakukan barter dengan ikan hasil tangkapan untuk membeli kebutuhan seperti sayur, buah-buahan dan beras.

Selain itu kebutuhan paling utama adalah air tawar yang digunakan untuk memasak dan mandi. Untuk memenuhi kebutuhan air tawar, orang Bajo harus membeli air di pulau terdekat dengan pemukiman mereka. Kegiatan mengambil air tawar dilakukan oleh ibu-ibu atau anak-anak pada sore hari dengan menggunakan sampan kecil.

Saat membangun sebuah komunitas baru, biasanya Suku Bajo berlabuh di satu pantai lebih dahulu. Lama kelamaan mereka menimbun pantai dengan batu dan mulai mendirikan pancang-pancang rumah panggung. Hal yang menarik pola pemukiman Kampung Bajo adalah mutlak menyediakan jalur-jalur perahu sebagai alat transportasi utama yang menghubungkan satu sama lain. Oleh karena itu, ketika berkunjung ke lokasi pemukiman Suku Bajo akan terlihat hilir mudik perahu di sekitar perkampungan tersebut. Selain itu juga, pemandangan anak-anak kecil bermain di laut sambil mencari ikan.

Rumah-rumah Suku Bajo mayoritas sangat sederhana, panjangnya kira-kira tujuh meter sampai lima belas meter, paling banyak terdiri atas dua kamar. Biasanya kamar pertama setelah memasuki serambi adalah *tengga* (untuk tamu), yang digunakan sebagai tempat tidur orang lanjut usia. Kalau malam, mereka tidur dengan menggunakan tikar dan sarung. Kemudian pada kamar yang kedua disebut *pores* sebagai tempat tidur suami-istri dan anak yang masih kecil. Pada waktu siang atau sore hari serambi biasanya digunakan sebagai tempat untuk santai untuk menikmati angin laut di waktu sore. Pada bagian tersebut, biasanya digantung sepotong jala (*rua*) sebagai perlindungan rumah, kerang-kerang serta beberapa poster gambar artis dan pemain bola. Di serambi pula pada waktu-waktu senggang para lelaki memperbaiki jala dan kaum ibu sibuk bergunjing sambil mencari kutu.

Biasanya pada rumah-rumah sederhana, rumah mereka memiliki dua buah tangga sebagai pintu masuk. Pintu pertama terletak di depan (serambi) dan pintu ke dua terletak di belakang menuju dapur. Bagian dapur sebagai tempat menyiapkan makanan dan juga sebagai ruang makan serta menyimpan peralatan makan. Mereka memiliki peralatan seadanya saja, hanya untuk istirahat mereka menggunakan tikar atau kadang balai-balai dari papan. Untuk keperluan menyimpan barang, biasanya menggunakan peti kayu atau lemari kecil. Selain itu mereka menyimpan barang-barang di ruang-ruang antara kerangka bangunan dan atap. Pada bagian bawah rumah adalah air laut. Oleh karena itu untuk keluar rumah mereka harus melompat ke dalam perahu yang biasanya ditambatkan pada tangga rumah. Oleh karena itu, perahu merupakan sarana angkutan vital yang menghubungkan satu sama lain.

Aktivitas Pemanfaatan Sumberdaya Laut

Sebagai komunitas yang tidak dapat dipisahkan dari laut, Suku Bajo kerap kali melakukan penolakan untuk menetap hidup di darat dan mematuhi sesuatu pemerintahan karena tidak akan mempermudah perkembangan kehidupan sosial ekonomi mereka. Sejak dulu, mereka dikenal sebagai pelaut ulung dan gemar mangarungi lautan Nusāntara. Mereka bisa menangkap ikan dan penyu di mana pun tanpa larangan. Untuk menangkap ikan, mereka berlayar ke perairan Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, bahkan sampai keluar negeri di wilayah perairan Australia. Bahkan nelayan Bajo di Sulawesi “terkenal” sering terjaring pihak berwajib Australia. Salah seorang informan Bajo mengatakan bahwa pada 1980-an hingga 1990-an, Suku Bajo Wakatobi mengalami “masa kejayaan” berdagang penyu sisik. Penyu yang ditangkap sebagian dijual, sebagian dikembangbiakkan. Dulu mereka bisa menjual penyu sisik ukuran 60 sentimeter seharga Rp 100-200 ribu per ekor. Saat ini penyu itu sudah berharga jutaan rupiah. Penjualan penyu memang bergantung pada besar kapal yang digunakan. Penghasilan dari berdagang penyu, tiga bulan sekali bisa mendapat puluhan juta rupiah. Setelah penangkapan penyu dilarang pada wilayah perairan seluruh Indonesia. Kegiatan perdagangan hewan itu merosot drastis. Pendapatan Suku Bajo seperti di Kepulauan Wakatobi sejak beberapa tahun lalu pun jauh berkurang. Saat ini juga kesulitan ditambah dengan kekhawatiran sosial penetapan zonasi. Meski para nelayan Bajo bisa saja mencari ikan di luar kawasan konservasi, larangan itu tak urung membuat daerah tangkapan Suku Bajo semakin sempit dan menyebabkan kurangnya pendapatan.

Dalam aktivitasnya memanfaatkan sumberdaya laut, orang Bajo mengenal empat kategori berdasarkan jarak wilayah dalam penangkapan ikan. Keempat kategori itu adalah *palilibu*, *pongka*, *sakai*, dan *lamma*. (1) Kategori *palilibu* adalah kegiatan penangkapan hasil-hasil laut di sekitar pemukiman/pulau dengan waktu penangkapan selama 1 – 3 hari, (2) Kategori *pongka* adalah berlayar melakukan penangkapan hasil-hasil laut ke daerah atau provinsi lain selama waktu penjelajahan beberapa minggu hingga sebulan, (3) Kategori *sakai* adalah berlayar mencari nafkah atau menangkap hasil-hasil laut ke daerah atau provinsi lain selama berbulan-bulan bahkan setahun, dan (4) Kategori *lamma* adalah pelayaran dengan menggunakan perahu/kapal motor menuju dalam dan luar negeri dengan membawa muatan barang dagangan dengan masa waktu berbulan-bulan hingga tahunan.

Dalam hal teknologi pemanfaatan sumberdaya laut, orang Bajo menggunakan sarana transportasi perahu *soppe*, *lepa-lepa*, dan *jolloro* dengan jarak tempuh 2 sampai 5 mil untuk perahu jenis *soppe* dan *lepa-lepa* sedangkan untuk *jolloro* bisa mencapai 15 mil dari pantai karena menggunakan mesin. Untuk aktifitas penangkapan antarpulau dan penyelaman teripang, orang Bajo menggunakan jenis kapal motor *lambo* dan *pinisi*.

Dalam hal teknologi penangkapan Suku Bajo telah mengenal dan menggunakan alat-alat tangkap tradisional yang dapat dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu: (1) pancing, (2) jaring/jala/pukat, (3) tombak tusuk, dan (4) bom. Kategori pancing tradisional mencakup beberapa tipe ukuran, mulai dari pancing untuk ikan-ikan kecil, untuk ikan ukuran sedang, dan untuk ikan-ikan ukuran besar. Termasuk kategori jaring/jala/pukat tradisional yang oleh orang Bajo disebut jaring *lanba'* dan jaring *rengge kareo*. Ukuran jaring *lanba'* tinggi satu depa, panjang mencapai puluhan sampai ratusan meter, bahkan sekarang panjang jaring *lanba'* ada yang mencapai 300 depa, dan lubang net ialah 3 inci. Untuk *rengge kareo* (jaring hiu) juga sama dengan ukuran *lanba'*. Mengenai bahan material dari kedua jenis jaring tersebut terbuat dari benang nilon, dan sebagian besar dari tali halus tetapi kuat.

Sistem Kekerabatan dan Interaksi Sosial

Seperti halnya kelompok masyarakat atau suku-suku lain di Indonesia yang menganut sistem perkawinan secara endogami, sistem perkawinan dalam Suku Bajo pada umumnya menginginkan perkawinan dengan kerabat atau masih memiliki hubungan keluarga. Namun demikian, perkawinan antara saudara sepupu sekali tidak diinginkan, tetapi diidealkan dengan kerabatnya atau hubungan keluarga sudah menjauh misalnya sepupu empat kali. Namun saat ini, perkawinan antara Suku Bajo dengan suku lain sudah sering terjadi.

Dalam melaksanakan perkawinan Suku Bajo masih memegang teguh adat istiadatnya. Bila ada seseorang yang datang dari luar (suku lain) menikah dengan salah seorang perempuan Bajo, maka laki-laki tersebut harus mengikuti adat istiadat Suku Bajo. Sebaliknya pula jika ada seorang pemuda Bajo menikah dengan perempuan suku lain, maka ia akan mengikuti adat istiadat perempuan yang akan dinikahinya. Seorang yang bukan Suku Bajo wajib membayar dua kali lipat besarnya mahar (*pananga*) sebab menurut konsepsi Suku Bajo, orang tersebut tidak akan menetap di Kampung Bajo, tetapi hanya numpang lewat.

Hukum adat yang berlaku juga bagi Suku Bajo atau seorang perempuan bercerai dengan suaminya atau menjanda. Suami kedua yang akan menikahinya hanya membayar setengah mas kawin. Kemudian jika ia menikah untuk ketiga kalinya, maka calon suaminya hanya membayar seperempat mas kawin dan tidak lagi memberi kain putih.

Apapun masalah perselisihan yang terjadi pada Suku Bajo, maka kepala adat selalu turun tangan menyelesaikan semua masalah. Dalam hal perkawinan, kepala adat selalu menyelidiki garis keturunan nenek moyang orang-orang yang akan menikah bahkan asal desa dan kemudian mempertimbangkannya. Selain aturan adat sistem perkawinan orang Bajo juga mengikuti aturan ajaran Islam dan hukum perkawinan yang ada dalam wilayah Indonesia.

Sebenarnya dalam struktur sosial Suku Bajo juga mengenal stratifikasi berdasarkan keturunan. Dulu Suku Bajo terbagi atas dua kelas sosial yakni golongan bangsawan yang berkedudukan tinggi atau dikenal dengan istilah *laha langga*, dan golongan rakyat biasa, budak-budak atau *atata*, dan orang yang berkedudukan rendah atau *laha titin'na*. Untuk menentukan kedudukan berdasarkan garis keturunan pihak ayah, apabila seorang pemuda keturunan rakyat biasa melamar atau menikahi gadis golongan bangsawan, maka ia harus membayar mas kawin ditambah separuh dari jumlah mas kawin sebagai simbol pembelian darah keturunan atau *laha titin'na*. Selanjutnya anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan ini sudah tidak termasuk golongan bangsawan.

Suku Bajo mengenal *extended family* atau keluarga luas. Dalam satu rumah, terdapat beberapa keluarga yang tinggal bersama dengan dapur yang sama. Pemilihan tempat tinggal setelah menikah lebih fleksibel atau ambilokal yakni pasangan bisa memilih dengan bebas untuk tinggal pada keluarga istri atau suami apabila mereka belum memiliki rumah sendiri.

Seperti halnya sistem kekerabatan yang dianut oleh beberapa etnis lain di Indonesia, Suku Bajo juga menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan pihak bapak. Sistem kekerabatan ini juga berpengaruh pada pembagian tugas dan peran berdasarkan sistem gender dalam aktifitas dalam keluarga. Seorang laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan bertanggungjawab terhadap keluarga. Posisi sebagai laki-laki menjadi posisi penting karena laki-laki bertanggungjawab mencari nafkah untuk menghidupi keluarga apabila sudah berumah tangga, meskipun istrinya juga memiliki pekerjaan.

Untuk membedakan berbagai hubungan kekerabatan, orang Bajo membagi dalam beberapa kategori. Pertama, *beres* merupakan keluarga dalam arti umum, dan menunjuk pada hubungan kerabat. Ada *beres teo* (keluarga jauh) dan *beres tutuku* (keluarga dekat). Kedua, *dapparanakan* adalah sebuah keluarga dalam arti "orang yang tinggal dalam satu rumah", lingkungan keluarga, kelompok orang-orang yang hidup di bawah satu atap, apapun tingkatan hubungan keluarga mereka. *Dapparakan* menunjuk pada ruang geografis. Sedangkan kategori ketiga, *dambarisan* menyangkut desa sebagai sebuah keluarga besar dan yang menonjolkan perasaan kekompakan. Suku Bajo menyebut bapaknya dengan sebutan *uwa* dan ibunya dengan sebutan *ma'*. Sedangkan panggilan bagi anak laki-laki adalah *lilla* dan anak perempuan dengan sebutan *dinda*. Selanjutnya, panggilan bagi kakek dan nenek adalah *mbo*.

Dalam interaksi sosial sehari-hari, Suku Bajo memahami identitasnya dengan istilah *Sama* dan *Bagai*. Konsep ini merupakan digunakan untuk memahami kelompoknya dan kelompok lain. Konsep *Sama* adalah Suku Bajo dan *Bagai* adalah orang/kelompok lain. Konsep *Sama* inilah yang merupakan perekat sesama Suku Bajo yang merasa senasib sepenanggungan meskipun mereka terpisah secara geografi atau negara. Mereka memahami laut sebagai perekat eksistensinya sedangkan darat adalah *Bagai* (milik kelompok lain).

Penutup

Suku Bajo merupakan suku laut yang terbesar di Nusāntara yang sampai sekarang masih belum pasti menafsirkan sejarah keberadaan mereka. Sebagai komunitas hidup matinya di laut dengan totalitas kebudayaan maritim menjadikan laut sebagai satu-satunya tempat yang menjadi tumpuan hidup mereka. Julukan sebagai suku yang “sea nomad” karena secara historis mereka hidup terapung-apung di atas rumah perahu, namun sekarang sudah menempati wilayah pesisir yang masih berorientasi dengan laut.

Dalam konsep menjaga kedaulatan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan, Suku Bajo merupakan penjaga terdepan wilayah negara. Hal ini ditandai dengan pola pemukiman yang mereka tempati di wilayah kepulauan, pesisir pantai, karang, teluk, selat dan perairan laut. Totalitas kebudayaan seperti kesejarahan, aktifitas sosial ekonomi, pola pemukiman, kelembagaan, sistem kepercayaan, dan wawasan kebaharian merupakan potensi yang harus dikembangkan sebagai salah satu unsur ketahanan bangsa. Namun hal ini tidak ditopang dengan sumberdaya manusia (tingkat pendidikan) dan kemampuan ekonomi yang menyebabkan Suku Bajo hanya memahami dunia mereka dengan konsepsi etnis (*Sama/Bajo*) tanpa melihat batas-batas negara.

Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa kesadaran kelompok komunitas subnasional seperti Suku Bajo akan mengembangkan gerakan-gerakan/usaha-usaha negosiasi tatkala peristiwa-peristiwa politik paraktis terjadi seperti pilkada atau pemilu legislatif, bagi kepentingan komunitas yang bersangkutan, mengkonstruksikan identitas kelompok dengan menghidupkan unsur-unsur pokok jati dirinya dan membangun ingatan kolektif terhadap sejarah khususnya lewat pembentukan organisasi komunitas didalam negeri dan antar negara. Hal ini dilakukan sebagai resistensi terhadap aneka stereotip yang disematkan kepada mereka padahal selama ini Suku Bajo selama ini setia pada kedaulatan wilayah Indonesia. Kondisi ini dilakukan oleh Suku Bajo demi mengatasi marginalisasi yang dialami komunitas ini.

***Penulis adalah staf pengajar/peneliti pada Departemen Antropologi
Universitas Hasanuddin, Makassar***

MENJAHIT LAUT: SULAWESI DAN LOMBOK DALAM LINTAS SEJARAH MARITIM*

Prof. Dr. Andi Ima Kesuma, M.Pd

Abstrak

Tujuan tulisan ini berusaha menjelaskan beberapa aspek dari keberadaan Makassar dan Lombok dalam sejarah maritimnya. Pembahasan utama dari kajian ini seputar hubungan global, musiman, dan hubungan lokal kedua bandar tersebut, selain hubungan di antara keduanya. Sebagai sebuah kekhususan, selanjutnya diperjelas adanya jiwa pertualangan Suku Bugis, hal ini untuk dapat menarik adanya persebaran Suku Bugis di Nusāntara, termasuk hubungannya dengan pelabuhan di Lombok, baik dalam rangka sebagai jaringan global dan lokal. Terakhir, dirasakan perlu adanya pengkajian hubungan dari segala aspek yang ada antara Makassar dan Lombok dalam perjalanan sejarah maritim. Karena itu, penjelasan hubungan tersebut mendapatkan tempat tersendiri pada bagian akhir dalam pemaparan kajian ini.

Kata kunci: menjahit, laut, sulawesi, lombok, sejarah, maritim

Pengantar

Suatu kenyataan bahwa penulisan sejarah konvensional dalam tema-tema penulisannya lebih banyak memperhatikan sejarah politik, orang-orang besar, serta kejadian-kejadian yang berdampak besar, sehingga tema-tema lain seperti sosial, budaya, kehidupan bahari masyarakat sangatlah tidak memadai jika di-



* Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Hari Nusantara dengan tema "Pelebagaan Budaya Bahari" yang diselenggarakan di Mataram, Lombok, pada 13 Desember 2012.

bandingkan dengan tema-tema sejarah konvensional tersebut. Khusus untuk sejarah bahari usaha ke arah itu sudah dilakukan Adrian B. Lopian, sehingga akhir-akhir ini kesejarahan masyarakat bahari dirasakan sangat penting, kajian ini merupakan satu langkah untuk menemukan hakikat masyarakat bahari kita pada masa lampau tersebut.

Sebagian masyarakat memahami bahwa laut merupakan jalur persebaran utama umat manusia masa lampau, tidak terkecuali sampai saat ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Lebih jauh, laut bukan hanya sebagai sarana perhubungan kemaritiman, akan tetapi perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi navigasi, perkapalan, budaya pesisir, angkatan laut, sampai perompakan (Sulistiyono 2004, 2), terjadi pada masyarakat maritim. Karena itu, kehidupan bahari sangat penting untuk diperhatikan, bukan hanya untuk saat ini, namun juga perjalanan sejarahnya, sehingga akan membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai kehidupan bahari masyarakat kita pada masa lalunya sampai saat ini.

Berhubungan tema sejarah maritim banyak sekali, tulisan ini akan memfokuskan pembahasan pada pelayaran dan perniagaan masyarakat Sulawesi dan Lombok dalam kancah sejarah maritim Nusāntara dan global, terutama sekali hubungan antara keduanya karena kedua pulau ini memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah maritim di bagian timur Nusāntara. Terkait dengan itu, aktivitas bahari dalam semua aspeknya akan coba diperhatikan, bukan hanya pelayaran dalam arti sempit, melainkan pelayaran yang dapat memberikan banyak hal pada daerah yang dituju atau sebaliknya.

Makassar dan Lombok dalam Jaringan Global Sejarah Maritim

Makassar dan Lombok merupakan dua daerah yang memiliki integrasi dengan jaringan niaga global, tentu selain pelabuhan yang ada di bagian timur Nusāntara. Makassar dan Lombok telah berkembang pada pertengahan abad XIV Masehi. Namun demikian bila ditelusuri proses kesejarahan dapat dikatakan bahwa Bandar Makassar di Sulawesi bukanlah bandar yang kini kita kenal dengan Makassar, karena kawasan bandar ini pada priode itu masih sunyi-senyap dalam dunia perdagangan maritim. Kota pelabuhan di pesisir barat jazirah selatan Pulau Sulawesi yang berkembang ketika itu diduga berada di Siang (Bunguro, Pangkajane), Bacokiki (Pare-Pare), serta Suppa, dan Nepo (Balanipa, Pangkep) (Rasyid Asba 2009, 2; <http://www.google.com/> diakses 1-12-2012). Kedua daerah ini selain memiliki hubungan pelayaran dan perdagangan dengan saudagar-saudagar Nusāntara namun juga berkembang dalam jaringan niaga global.

Makassar di Sulawesi dan Ampenan di Lombok pada akhir abad XVI hingga paruh pertama abad XVII, menjadi pusat niaga untuk pelaut dan saudagar Asia dan Eropa dalam komoditas rempah-rempah dan kayu cendana. Semua saudagar Asia dan Eropa datang dan mem-

punyai perwakilan dagang (loji) di kedua bandar ini. Hal itu memberi gambaran kemajuan yang luar biasa sehingga Anthony Reid menyatakan kisah kemajuan di wilayah itu merupakan gambaran keberhasilan yang tiada bandingnya dalam sejarah Indonesia.

Dengan berkembangnya jaringan perdagangan ini, terutama pada awal-awal abad XIX, Nusa Tenggara muncul lebih dinamis dalam aktivitasnya dan bahkan muncul pusat-pusat baru yang memberikan arti pada perubahan ekonominya. Dapat dikemukakan sebagai contoh, pelabuhan Ampenan di Lombok kini melampaui pelabuhan lainnya di Nusa Tenggara (terutama di bagian barat). Namun secara umum pelabuhan di Nusa Tenggara Barat saat itu sudah memiliki hubungan dan jaringan global. Apabila diperhatikan maka dari lingkungan Nusa Tenggara dapat dikapalkan komoditi perdagangan seperti dari Lombok (beras, kuda), Bima-Sumbawa (kuda, kayu sapan, garam), Ende Waengapu (kuda, budak), Salor-Larantuka (kapas, jagung, minyak ikan paus), dan Timor (kayu cendana, kuda, lilin lebah). Sementara itu, Makassar pada akhir abad XIX dalam jaringan global telah berfungsi sebagai pos terdepan bagi perdagangan Singapura. Lalu-lintas antara kawasan Indonesia timur dan Singapura sangat maju. Ketika itu banyak orang Tionghoa di kota Makassar dan di Ampenan memiliki juragan di Singapura.



Barang-barang ekspor dari Makassar dan Ampenan yang dikapalkan ke Singapura, selain untuk diolah di Singapura juga dikirim ke Tiongkok, India, Jepang, Eropa dan Amerika. Berbagai komoditi dari Singapura dipasarkan di benua Eropa melalui Inggris, Perancis dan Jerman. Sebaliknya barang-barang impor penting di Makassar, juga diambil dari Singapura seperti tekstil, alat-alat industri rumah tangga, minyak bumi dan beras.

Pada perkembangannya kemudian, inilah yang menempatkan pelabuhan Ampenan sebagai tempat yang strategis, terletak di tengah jalur perdagangan panjang antara Australia-Singapura-India, dan Australia-Manila-Tiongkok. Khusus untuk perkembangan di Lombok, terdapat tiga jenis perdagangan yang dapat dilihat: 1) perdagangan orang Eropa (*Eropean trade*) suatu perdagangan yang dilakukan oleh kapal-kapal Eropa. Jenis perdagangan ini menempatkan Ampenan/Lombok pada beberapa jalur panjang seperti: New South Wales-Manila-Tiongkok dan New South Wales-Singapura-Benggala, dan jalur Lombok-Mauritius-Cape Colony; 2) perdagangan musiman (*ordinary monsoon trade*) yang biasanya dilakukan oleh saudagar Bugis dan Tionghoa. Jalur ini membawa Ampenan/Lombok berhubungan dengan tempat-tempat lain di Nusāntara, seperti Jawa, Makassar, Riau, Kalimantan, Maluku, Singapura; dan 3) Perdagangan lokal, adalah perdagangan antarpulau di lingkungan Nusa Tenggara (Rasyid Asba 2009, 7 dalam <http://www.google.com/> diakses 1-12-2012).

Sejak tahun 1660, ketika hubungan perdagangan antara Makassar dengan VOC-Belanda mengalami ketegangan dan mencapai puncaknya dengan dikuainya Makassar (Perjanjian Bongaya, 18 November 1667), semua saudagar Eropa lain tidak boleh berdagang di Makassar. Hanya saudagar VOC-Belanda saja yang boleh berniaga di Makassar dan mereka diberi kebebasan dari segala kewajiban. Sementara itu, di Ampenan (Lombok) saudagar VOC-Belanda kurang mendapat kesempatan untuk berkembang, terutama ketika dinasti Karangasem-Bali sudah berkuasa di Lombok.

Dalam masa perdagangan global tahun 1855-1856, di pelabuhan Ampenan (Lombok) telah berlabuh 55 buah kapal dari berbagai bangsa. Dari perbandingan jumlahnya dapat diketahui, bahwa dari Jawa datang yang terbanyak (16 buah), Makassar (8 buah), Bali (8 buah), Australia (6 buah), Singapura (5 buah), Timor-Kupang (1 buah), dan lain-lain tempat/bandar masing-masing 1 buah. Ini artinya bahwa perdagangan dan pelayaran pada saat itu telah memasuki jaringan global. Belum lagi berkembangnya para saudagar Arab setelah berkembangnya Labuhan Haji di Lombok Timur.

Migrasi Orang-orang Bugis dalam Sejarah Maritim

Perpindahan/migrasi orang ke berbagai daerah, baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia merupakan tradisi yang telah berlangsung lama. Keadaan ini sudah berlangsung sejak abad XV dimana orang-orang Bugis dan Bajo sudah menyebar di pesisir timur pulau Sumbawa. Di Sumbawa mereka memegang peranan penting dalam berbagai bidang dan lapangan kerja, misalnya sebagai saudagar, mubaligh, penguasa, dan yang paling penting adalah orang-orang Bugis telah memegang peranan utama dalam lalu-lintas perhubungan laut. Peranan yang sama dilakukan orang-orang Bugis Makassar di daerah-daerah seperti Lombok, Bali, Madura, Kalimantan, Pantai Utara Jawa, Aceh, Singapura, Perak, Johor, Riau, Papua, dan Timor Leste. Jiwa penjelajah merupakan suatu atribut yang sudah melekat pada orang-orang Bugis. *Sompe'* atau semangat berlayar yang mengakar pada jiwa para pelaut Bugis, telah mengantarkan mereka menjelajahi samudra, meretas pulau dan lautan di Nusāntara, bahkan melintasi batas-batas negara. semua tidak lepas dari jiwa dan semangat penjelajahan mereka.

Selain memang karena adanya semangat penjelajah pada Suku Bugis, perkembangan selanjutnya tidak hanya didorong oleh faktor petualangan tadi, namun sekitar abad XVI hingga XVIII sampai awal abad XX banyak faktor yang berkelindan di dalamnya. Karena itu, dalam hal ini seperti yang diyakini oleh para sejarawan dan ilmuwan sosial lainnya, tidak ada satu determinan tunggal yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa sejarah.

Pertanyaannya kemudian, selain jiwa petualangan tadi, faktor apa yang menyebabkan terjadinya migrasi orang-orang Bugis ke berbagai wilayah di Nusāntara maupun di negara-negara lain. Paling tidak terdapat dua alasan utama penyebab migrasi ini, terutama sekali pada abad-abad XVI-XX. *Pertama*, masalah keamanan. Masa kacau yang berkepanjangan di Sulawesi Selatan, berawal sekitar abad XVI hingga XVIII atau sepanjang tiga abad lamanya terjadi perang antara kerajaan-kerajaan lokal yang kemudian disusul dengan perang melawan Belanda sampai dengan awal abad XX. Terakhir karena adanya pemberontakan DI/TII pada tahun 1950 hingga 1965. Dengan kata lain, seperti dikatakan Andi Ima Kesuma bahwa:

Selain adanya filosofi Suku Bugis yakni “*kogisi monro sore lophie, kositu tomallabu sengereng*” yang artinya “dimana perahu terdampar, disanalah kehidupan ditegakkan”. Melainkan terjadinya migrasi orang Bugis keluar Sulawesi Selatan berkaitan erat dengan peperangan sebagai akibat dari rivalitas antar kerajaan yang memperebutkan hegemoni. Dalam hal ini, migrasi pada hakikatnya adalah produk perang serta proses sosial (2004, 130-136).

Kedua, berkaitan dengan masalah ekonomi. Sebagai etnis yang memiliki naluri untuk merantau, orang-orang Bugis selalu berupaya mencari tempat yang dianggap layak bagi dirinya untuk tinggal, bekerja, bermasyarakat, dan lain-lain. Selama hal tersebut belum dicapai, perantauan tidak akan pernah berakhir.

Seperti dikatakan sebelumnya aktivitas pelayaran ini semakin meningkat ketika Makassar dikuasai VOC. Inilah yang menyebabkan mulai dari kawasan barat Nusāntara pada abad XVIII kegiatan orang Bugis di kawasan Selat Melaka sudah sangat meningkat sehingga mereka berperan pula dalam pertarungan politik, malahan orang Bugis menduduki jabatan sebagai Raja Muda di Riau, dan di Selangor mendirikan kesultanan (Lapian 1996, 8).

Berita ini tidak lain merupakan peranan orang-orang Bugis di seberang lautan selain adanya tujuan ekonomi dan diaspora di atas. Artinya bahwa dalam hal ini kita telah menemukan tiga alasan lagi, bukan hanya diaspora dalam arti mutlak dan tujuan ekonomi, namun sebagai jalan untuk mempertahankan Sulawesi Selatan terlebih utama Makassar dari VOC. Dalam eksodus keluar Sulawesi Selatan tersebut bergabung sekian banyak kelompok bangsawan, ksatria, dan saudagar Makassar untuk membentuk armada-armada pengungsi yang sering disamakan dengan kota-kota terapung (Liebner 2004, 92-93). Hal inilah yang menjadi landasan bagi sekian banyak gelombang eksodus lain yang sampai pertengahan abad XVIII membentuk kesatuan-kesatuan politik baru di Kalimantan, Sumatera, Riau, dan Melaka.

Persebaran Suku Bugis seperti dijelaskan sebelumnya bahwa tidak hanya urusan politis, terdapat banyak hal yang mendorong mereka untuk bermigrasi keluar dari Sulawesi Selatan, sehingga perkembangan mereka pun di luar Sulawesi Selatan semakin meningkat. Sebagai sebuah perbandingan yang jaraknya mungkin cukup jauh dapat kita lihat perkembangannya dari data yang akan disajikan dalam penjelasan selanjutnya.

Sampai beberapa abad kemudian migrasi orang-orang Bugis, juga orang-orang Makassar, dan Mandar perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa dekade yang lampau tercermin dalam *Volkstelling* tahun 1930. Jumlah ini adalah akumulasi dari persebaran sebelumnya dalam jumlah yang lebih banyak dimulai pada abad XVI. Adapun distribusi orang-orang Bugis, Makassar, dan Mandar pada tahun 1930 sebagai akumulasi dari emigrasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

Distribusi Orang-orang Bugis, Makassar dan Mandar Tahun 1930

Wilayah	Bugis	Makassar	Mandar
<i>Residency of Celebes</i>	1.380.334	630.144	175.271
<i>Residency of Manado</i>	27.477	1.360	1.571
Borneo	95.048	3.088	5.846
Sumatera	10.170	1.044	11
<i>Residency of Timor</i>	11.652	2.718	796
Sumbawa	8.232	1.975	-
Bali dan Lombok	2.468	276	2.295
Maluku	1.239	1.622	103
Jawa dan Madura	4.593	2.198	3.293
British Malaya	4.961	23	-

Sumber: Abidin (1983) dalam *Volkstelling 1930*, Vol. V, pp. 20-21

Berdasarkan tabel tersebut, kalau dijumlahkan dengan orang peranakan yang tinggal di Sulawesi Selatan, maka pada tahun 1930 ditaksir 10 % dari jumlah penduduk Sulawesi (terutama Suku Bugis) yang bertempat tinggal di luar Sulawesi Selatan (Lineton dalam Zainal Abidin 1983, 70). Ini menunjukkan bahwa dari barat sampai timur Nusāntara masyarakat Bugis (untuk menyebut semuanya yang berasal dari Sulawesi Selatan) telah telah tersebar dan terkenal sebagai pelaut ulung yang mengarungi seluruh wilayah Nusāntara. Sampai saat ini Pinisi sebagai lambang yang dibanggakan masyarakat Sulawesi tidak lepas dari keberadaan masyarakat mereka sebagai pelaut yang ulung.

Sampai saat ini telah banyak perantau Bugis yang beranak-pinak dan hidup makmur di perantauan. Salah satu contoh, berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, sekurangnya 1 juta orang keturunan Bugis bermukim di Kalimantan, 250 ribu orang di Sumatera, dan 750 ribu orang yang menjadi warga negara Malaysia. Belum lagi kawasan-kawasan lainnya, jika dibandingkan dengan data tahun 1930-an di atas, jelas merupakan perkembangan nyata.

Penjelasan tersebut hanya sebagian kecil dari gambaran umum persebaran Suku Bugis atau paling tidak beberapa suku yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini tidak lain untuk menggambarkan jiwa petualangan masyarakatnya hingga sampai juga dan menetap di Bumi Sasak yang akan menjadi pembahasan selanjutnya. Dengan kata lain, gambaran persebaran mereka di ataslah yang mejadi faktor juga dalam perkembangannya di Pulau Lombok. Penjelasan tersebut, karenanya untuk membuka pemahaman kita akan hubungan bahari Sulawesi Selatan dengan Pulau Lombok, baik dalam sejarahnya maupun perkembangan dalam proses hingga saat ini.



Persebaran Pelaut Bugis-Wajo di Pulau Lombok

Lombok merupakan sebuah pulau di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau ini kurang lebih bulat bentuknya dengan semacam “ekor” di sudut baratdaya yang panjangnya kurang lebih 70 km. Pulau ini luasnya adalah 4.725 km² (sedikit lebih kecil daripada Bali) dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.722.123 jiwa.

Pulau Lombok seperti halnya dengan Makassar sejak dari dahulu dikenal sebagai gugusan maritim paling ramai di bagian timur. Bahkan

Nāgarakērtāgama menyebutkan beberapa kota di Indonesia timur yang mempunyai hubungan dengan Majapahit. *Nāgarakērtāgama* pupuh 14: 4-5 menyebutkan nama-nama tempat di pulau Sulawesi seperti Bantayang, Luwuk, Makasar, Buton, Selayar, dan Beggawi (Slametmulyana 2006, 346). Wilayah tersebut dinyatakan sebagai jalur utama ke timur yang dihubungkan dengan gugusan pulau Sumba, Lombok, Solor, Kunir, dan Kepulauan Maluku yang kaya akan rempah-rempah.

Berdasarkan informasi dari kakawin *Nāgarakērtāgama* tersebut, diduga orang-orang Bugis dan Bajo sejak abad XIV telah ada di daerah Lombok karena tempat-tempat tersebut merupakan pelabuhan. Pada sekitar abad XIX, ketika pelabuhan Ampenan telah berkembang banyak orang Bugis dan Bajo yang bermigrasi ke pesisir Awang di Lombok Tengah, Labuhan Haji, dan Tanjung Luar di Lombok Timur.

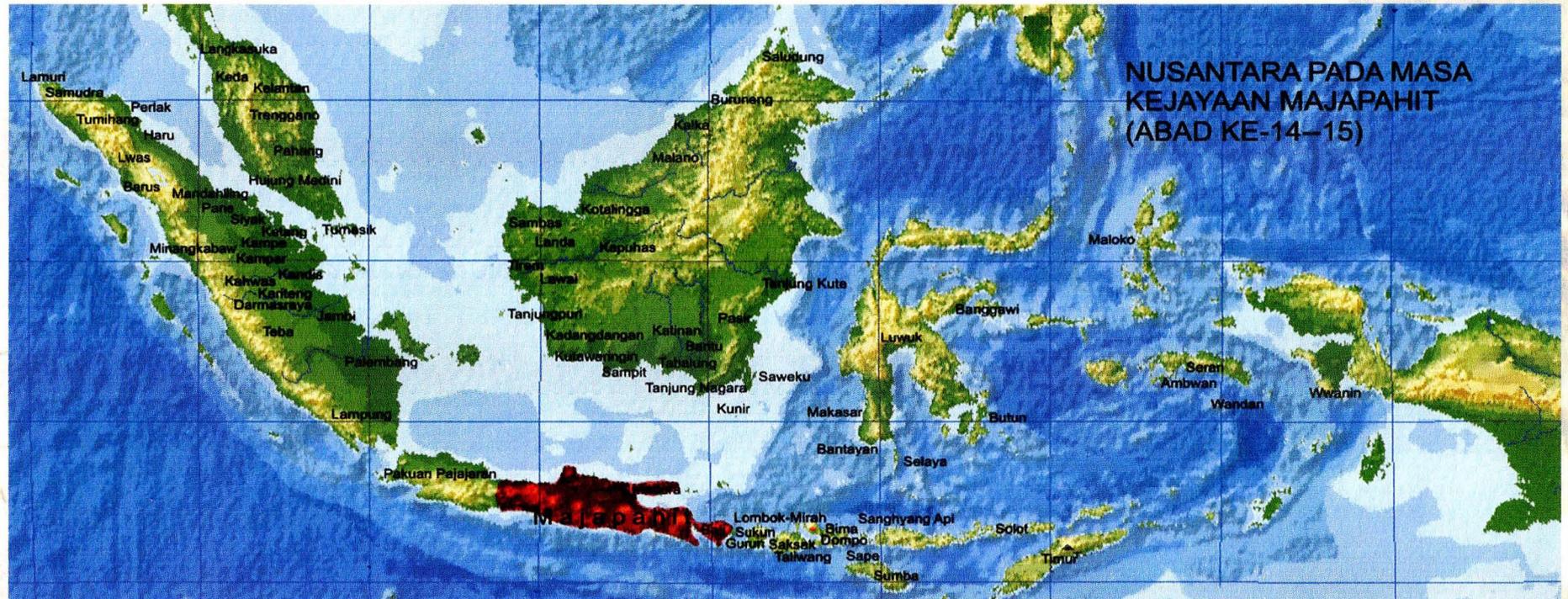
Pelabuhan Ampenan di Lombok Barat

Ampenan adalah sebuah kecamatan di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok Barat (Mataram). Daerah ini dahulunya merupakan pusat kota di Pulau Lombok. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok (laut yang menghubungkan pulau Lombok dengan pulau Bali). Di kecamatan ini terdapat peninggalan kotatua karena dahulunya merupakan pelabuhan utama daerah Lombok. Karena itu dapat dikatakan bahwa Kecamatan Ampenan adalah “kota tua”-nya Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di tempat inilah sejarah Lombok sekitar tahun 1800-an dirajut.

Di Ampenan terdapat banyak kampung yang merupakan perwujudan dari berbagai sukubangsa di Indonesia diantaranya Kampung Tionghoa (Pecinan), Kampung Bugis, Kampung Melayu, Kampung Banjar, Kampung Arab, dan Kampung Bali, sehingga masyarakat yang ada di sini bersifat heterogen yang hidup rukun. Ampenan dalam bahasa Sasak berarti “amben” atau “tempat singgah”. Sesuai dengan namanya, Ampenan merupakan kawasan yang oleh Belanda dikembangkan menjadi pelabuhan untuk menyaingi dominasi kerajaan-kerajaan di Pulau Bali. Seperti kota pelabuhan pada umumnya, Ampenan sejak saat itu hingga kini dihuni berbagai macam etnis. Warga Tionghoa yang oleh Belanda kala itu digunakan sebagai tenaga kerja murah, hidup dengan komunitas etnis Arab, Melayu serta Bugis.

Di Ampenan masih berdiri Wihara Bodhi Dharma meskipun dibangun sejak 1804. Keberadaan wihara ini merupakan bukti ada pembauran suku di Ampenan sejak dulu kala, karena berada di lingkungan kampung Melayu yang didominasi penganut Islam. Sementara itu di kawasan pesisir dimukimi komunitas Bugis yang berprofesi sebagai nelayan. Pekerjaannya sebagai nelayan sebagai sumber utama dalam kehidupannya sehari-hari diwariskan dari nenek moyang mereka.

Berdasarkan keterangan tersebut, nyatalah bahwa dahulu pelabuhan ini merupakan pusatnya kegiatan maritim di Pulau Lombok. Karena itu kesejarahannya perlu dikaji ulang, khususnya terkait dengan keberadaan Suku Bugis di tempat ini.



Jika dibuka lembaran sejarah perdagangan maritim di Indonesia bagian timur maka tampak bahwa sejak abad XIV wilayah itu telah dikenal luas. Dalam kakawin *Nāgarakērtāgama* yang ditulis oleh Mpu Prapañca pada tahun 1364, telah tercatat sejumlah tempat di Sulawesi Selatan yang memohon perlindungan kepada raja Majapahit, yaitu Luwu, Bantayan (Bantaeng), Selayar, dan Makassar. Tanpa mempertimbangkan proses sejarah, kita pasti menyatakan bahwa berdasarkan karya Prapañca, Makassar dan Lombok (mirah) telah dikenal sejak tahun 1360-an. Namun demikian bila ditelusuri proses kesejarahan dapat dikatakan bahwa Makassar dan Ampenan Lombok yang dicatat oleh Prapañca itu bukan bandar yang kini dikenal sebagai Bandar Makassar, karena kawasan bandar ini pada masa itu masih sunyi-senyap dalam dunia perdagangan maritim. Kota pelabuhan di pesisir barat jazirah selatan Pulau Sulawesi yang berkembang ketika

itu diperkirakan Siang (Bungoro/Pangkajene), Bacokiki (Pare-Pare), Suppa, dan Nepo (Balanipa-Mandar). Begitupula di Bali muncul Karang Asem dan di Lombok muncul Ampenan serta di Timor muncul Kupang.

Posisi itu telah menempatkannya menjadi bandar terpenting dan pusat perdagangan internasional dalam dunia perdagangan maritim pada akhir abad XVI hingga paruh pertama abad XVII. Makassar dan Ampenan menjadi pusat niaga untuk pelaut dan saudagar di Asia dan Eropa dalam komoditas rempah-rempah dan kayu cendana.

Terlebih lagi setelah beberapa abad sebelumnya banyak orang Bugis yang berlayar ke wilayah Nusa Tenggara, pada awal abad XIX, akibat kesuburan tanah yang mulai terjadi di Lombok akibat abu letusan Tambora di Sumbawa pada April 1815 tampak membawa perubahan. Dan beras merupakan komoditi ekspor terpenting.

Dengan berkembangnya jaringan perdagangan ini, Nusa Tenggara muncul lebih dinamis dalam aktivitasnya dan bahkan muncul pusat-pusat baru yang memberikan arti pada pertumbuhan ekonominya. Sebagai contoh, Ampenan (Lombok) kini melampaui pelabuhan lainnya di Nusa Tenggara (terutama di bagian barat), berkembang sebagai pelabuhan bebas dan ramai dengan datangnya saudagar luar. Keramaian pelabuhan Ampenan dapat dimengerti dari keterangan Zollinger (1846). Disebutkan bahwa hampir semua perdagangan dilakukan di Ampenan. Di sini terdapat selain kampung orang Sasak, Bali, juga kampung saudagar pendatang seperti: kampung Bugis, Melayu, juga ada sejumlah orang Eropa dan Tionghoa. Hasil-hasil Lombok (terutama beras) dikirim tidak hanya di lingkungan Nusa Tenggara, tetapi juga sampai ke tempat-tempat yang lebih jauh seperti: Maluku, Makasar, Tiongkok, dan Eropa.

Mengenai keadaan penduduk Lombok, Zollinger (1846) memberikan gambaran, di sini terdapat penduduk sebanyak 405.000 jiwa, yang terdiri dari: 38.000 orang Sasak, 20.000 orang Bali, 5.000 orang Bugis, 10-12 orang Tionghoa, dan 4 orang Eropa. Pada masa ini dinasti Karangasem (Bali) sudah berkuasa di Lombok. Bahkan J.H. Peter pada tahun 1856 menyebut, di Ampenan sudah tinggal sebanyak 10.000 orang Bugis. Hal itu menunjukkan bahwa orang Bugis di Lombok meningkat dua kali lipat dari tahun 1846. Orang-orang Bugis, Arab menetap melakukan perdagangan, lalu mencari pengaruh. Kemudian mereka memasukkan pula ajaran-ajaran agamanya (Islam). Dan salah satu jua yang penting pada masa ini, nama Labuhan Haji di Lombok Timur sudah mulai tersebar.

Sekitar tahun 1850-an pada saat Lombok sudah dikuasai Kerajaan Karang Asem Bali, di Lombok kapal-kapal Belanda juga kurang mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Di sini terdapat banyak saudagar lain yang dipercaya raja sebagai shahbandar. Meskipun Firma Freijss juga mencobanya, namun nampak kurang berhasil. Disebutkan, sesungguhnya J.P. Freijss telah menempatkan agennya di Ampenan tahun 1850. Akan tetapi ketika ia datang kesana tahun 1855, J.P. Freijss tidak lagi menemui pengurusnya, karena dikatakan te-

lah kembali ke Makasar pada tahun 1854-1855. Selanjutnya kapal-kapal Belanda hanya bisa datang sewaktu-waktu pada musim panen untuk membeli beras, meskipun sesungguhnya Belanda sudah ingin menggunakan Lombok sebagai tempat ekspor/impor secara formal.

Berdasarkan berita tersebut, ternyata peranan orang Bugis di pelabuhan ini sangatlah penting, bukan hanya sebagai saudagar, atau sekedar nelayan biasa, melainkan sebagian dari mereka sebagai shahbandar yang disegani dan dapat dijadikan pemimpin. Setelah itu, orang-orang Bugis sampai saat ini tidak hanya berada di Ampenan, tetapi juga di pantai utara, yang menghasilkan banyak kapas.

Etnis Bajo di Pesisir Awang Lombok Tengah

Menurut kepala Suku Bajo, masyarakat Bajo bermigrasi ke Lombok Tengah pada sekitar lima abad yang lalu. Mereka menempati wilayah dusun Awang (bagian selatan paling timur kabupaten Lombok Tengah), desa Mertak, dan Kecamatan Pujut. Suku Bajo yang berada di Lombok Tengah mempunyai perbedaan kebiasaan dibanding dengan masyarakat Bajo di daerah asalnya. Disebutkan dalam buku *Orang Bajo* yang ditulis oleh Francois Robert Zacot, seorang antropolog dari Prancis, bahwa kehidupan Suku Bajo (di Sulawesi) kehidupannya berada di laut (Robert Zacot 2008). Mereka menjadikan perahu sebagai tempat tinggal dan ada pula yang membangun rumah panggung di atas laut. Dengan demikian mereka menyebut dirinya sebagai orang laut. Begitu lekatnya kehidupan laut dengan mereka, sampai-sampai mereka tidak mau berhubungan dengan segala sesuatu yang ada di daratan. Mereka tidak mau makan daging unggas sebagai pernyataan ketidakuannya menyesuaikan diri dengan cara-cara hidup orang daratan.

Hal tersebut tidak ditemukan di masyarakat Bajo di Lombok Tengah (Dusun Awang). Mereka justru memilih berbaur dengan masyarakat setempat, yakni masyarakat Suku Sasak. Mereka tinggal dengan masyarakat Suku Sasak dalam satu wilayah. Membangun rumah di dekat permukiman Suku Sasak. Hanya saja sebagian besar model rumahnya masih menggunakan arsitektur rumah panggung, sebagian yang lain menggunakan arsitektur biasa. Ini bukan karena keinginannya, tetapi karena harga kayu yang mahal. Secara geografis, tidak ditemukan batas pemisah antara kampung Suku Bajo dengan kampung Suku Sasak. Mereka hidup berdampingan dalam satu pemukiman.

Wilayah di kabupaten Lombok Tengah yang paling banyak ditempati oleh penduduk beretnis Bajo, selain Dusun Mertak dan Pujut, terdapat di wilayah Dusun Awang, khususnya Dusun Awang Balak. Dalam wilayah ini terdapat juga penduduk beretnis Sasak, yakni Awang Kebon. Luas Dusun Awang Balak kurang lebih 7,5 Ha. Wilayahnya berbatasan dengan Kampung Asam di sebelah utara; gunung di sebelah selatan; Awang Kebon di sebelah barat; dan laut di sebelah timur. Dusun ini merupakan daerah pantai, sehingga mayoritas pekerjaan penduduk adalah nelayan (85%) dan saudagar (15%).



Suatu keunikan tersendiri pada masyarakat maritim di Dusun Awang, selain mereka mempertahankan bahasa Bajo, masyarakat Bajo di Dusun Awang juga mengakui bahwa leluhur mereka berasal dari Sulawesi Selatan tanpa menyebutkan nama daerahnya secara tepat. Hal ini dikarenakan para perintis di daerah Awang tersebut sudah tidak ada, dan kurangnya informasi dari nenek moyang mereka tentang asal daerahnya. Akibatnya keberadaan mereka dalam kompleksitas yang ada belum lengkap.

Keberadaan Suku Bajo sebagai suku laut mengimplikasikan bahwa mata pencaharian suku ini adalah nelayan. Bahkan mereka membangun perkampungan jauh menjorok ke arah laut bebas. Julukan bagi mereka sudah barang tentu adalah *sea nomads*, karena pada mulanya mereka memang hidup terapung-apung di atas *leppa* (rumah perahu).

Sebagai nelayan Suku Bajo mempunyai keahlian dapat menentukan jenis ikan yang dapat ditangkap menurut hari, bulan, waktu yang tepat, arah angin, dan tempat. Mereka juga mempunyai kebiasaan menyiapkan sesaji untuk upacara doa sebelum melaut karena perjalanan di laut itu memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan.

Tidak demikian halnya dengan masyarakat yang mengaku dirinya orang Bajo di Dusun Awang Balak. Mereka tidak tinggal di laut perairan dangkal tetapi tinggal di tepi pantai. Pekerjaan utamanya adalah nelayan yang mencari ikan di laut, dan ada pula nelayan yang membudidayakan udang lobster di sepanjang perairan tenang di Teluk Awang. Sebagai akibat dari pergaulannya dengan Suku Sasak, dan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, sebagian orang Bajo bermatapencaharian sebagai pedagang kecil. Walaupun mereka tidak mendominasi kehidupan mereka di laut seperti leluhur mereka, yang diakui dari Sulawesi, tetapi keseharian mereka tetap berada di laut atau di pantai.

Terkait dengan sistem kepercayaan. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa leluhur masyarakat Bajo mepercayai adanya kekuatan setan-setan dan roh-roh leluhurnya, roh-roh orang mati yang dapat berbuat baik atau jahat. Setan yang merupakan kekuatan jahat bisa membuat orang sakit atau kesurupan arwah, sehingga harus dilakukan pemberian sesaji.

Masyarakat Bajo di Dusun Awang menunjukkan identitas Islam yang cukup kental. Di dusun tersebut terdapat sebuah masjid yang cukup besar. Semua kegiatan kehidupan diwarnai oleh nilai-nilai agama Islam, misalnya dalam hal perkawinan, ritual yang dilakukan lebih bersifat Islami. Hanya dalam kegiatan atau ritual budaya yang melestarikan budaya leluhur, selamatan laut, mereka menggunakan mantra tertentu di samping doa-doa islami. Hal ini misalnya dapat dilihat dari apa yang mereka lakukan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 di Dusun Awang dilaksanakan upacara *Nyelamak Laut*. Kegiatan ini sejak tahun 1997 tidak dilakukan, karena tidak tersedianya dana. Setelah dirasa jumlah penghasilan masyarakat semakin menurun, upacara pemberian sesaji laut perlu dilakukan. Masyarakat Bajo berkeyakinan bahwa "ikan akan naik" jika dilakukan upacara *Nyelamak Laut*, sehingga jumlah 'tangkapan" mereka dapat naik lagi. Kegiatan *Nyelamak laut* ini bukan hanya menjadi acara desa saja, tetapi melibatkan pihak pemerintahan dan TNI.

Perlu diperhatikan juga bahwa, sebenarnya masih banyak kekurangan informasi terkait dengan Suku Bajo di Pulau Lombok (terutama sekali di pesisir Awang), terutama yang terkait dengan dokumen resmi. Dalam dokumen-dokumen Suku Bajo dari Pulau Lombok dinyatakan bahwa mereka menempati kampung-kampung di Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur. Sementara masyarakat Bajo yang ada di Teluk Awang Lombok Tengah tidak dinyatakan dalam dokumen-dokumen resmi. Hal ini dimungkinkan karena jumlah mereka yang tidak terlalu besar jumlahnya. Namun demikian, kegiatan selamatan laut, sebagai sebuah peristiwa yang cukup besar dilakukan oleh pemerintah di Dusun Awang, bukan di pusatkan di Lombok Timur.

Labuhan Lombok, Labuhan Haji dan Tanjung Luar di Lombok Timur

Labuhan Lombok

Labuhan Lombok merupakan pelabuhan yang saat ini digunakan sebagai lalu-lintas antara Lombok yang berhubungan dengan Pulau Sumbawa. Di sekitar Labuhan Lombok juga bermukim orang-orang yang berasal dari Suku Bugis. Mereka tidak lagi tercatat sebagai orang Sulawesi, melainkan menjadi bagian dari masyarakat yang menetap di Lombok Timur bagian timur. Mereka bergaul dengan masyarakat Sasak, namun tentunya mereka lebih banyak dan secara mayoritas adalah sebagai nelayan. Lalu bagaimana dengan sejarahnya sehingga mereka bisa menetap di tempat ini, dengan membawa sebagian budayanya seperti cara pembuatan rumah, bahasa, dan lain sebagainya.

Setelah Kerajaan Majapahit runtuh pada sekitar abad XV, kerajaan-kerajaan kecil di Nusa Tenggara, seperti Kerajaan Lombok, Langko, Pejanggik, Sokong dan Bayan, serta beberapa desa kecil seperti Pujut, Tempit, Kedaro, Batu Dendeng, Kuripan, Kentawang, meru-

pakan kerajaan-kerajaan atau desa-desa yang merdeka. Di antaranya yang paling terkenal di seluruh Nusāntara adalah Kerajaan Lombok, yang karena indahnya, banyak dikunjungi oleh saudagar dari luar, seperti dari Palembang, Banten, Gresik, dan Sulawesi.

Penting dicatat juga dalam hal ini adalah perkembangan Islam di Lombok Timur yang diyakini disebarkan melalui jalur perdagangan, baik itu berasal dari saudagar-saudagar Makasar, Jawa, maupun Arab. Hal ini dapat diketahui dari minoritasnya ditemukan komunitas *Wetu Telu* di Lombok Timur. Diduga agama Islam menjangkau daerah ini disebarkan oleh para saudagar dan nelayan dari Makasar melalui Labuhan Kayangan, Lombok Timur. Itu terlihat dari banyaknya penduduk Lombok Timur yang keturunan Makasar. Islam yang mereka anut disebut dengan Islam Sunni. Adapun yang mengistilahkannya dengan *Wetu Lima*, yakni suatu ajaran yang mengamalkan Islam secara sempurna. *Wetu Lima* mempercayai bahwa rukun Islam itu ada lima dan harus menjadi tanggung jawab masing-masing pribadi yang telah akil baligh.

Berdasarkan berita yang ada, orang-orang Makassar tiba di Lombok Timur pada abad XVI dan berhasil menguasai Selaparang, kerajaan orang Sasak Asli. Dibandingkan dengan orang Jawa, orang Makassar lebih berhasil dalam mendakwahkan Islam Sunni. Mereka berhasil mengkonversikan hampir seluruh orang Sasak ke dalam Islam, meskipun kebanyakan mereka masih mencampurkan Islam dengan kepercayaan lokal yang non-islam.

Berdasarkan berita tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan Labuhan Lombok sebagai salah satu jalur maritim di Indonesia timur telah mendorong orang-orang Bugis bukan hanya sebagai saudagar sementara atau menyebarkan ajaran Islam, namun juga sebagai penduduk yang berdiam di Pulau Lombok. Kebanyakan di antara mereka hidup sebagai nelayan, karena mereka melihat potensi laut perairan Sumbawa dan Lombok kaya akan hasil laut. Dan sampai sekarang komunitas mereka banyak berada di Labuhan Lombok ini.

Labuhan Haji

Pada tahun 1980-an sebagai penghubung dari Pelabuhan Ampenan di Lombok Barat, di Lombok Timur muncul Labuhan Haji yang banyak digunakan oleh masyarakat Sasak untuk pergi Haji. Aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa hubungan Lombok Timur dengan saudagar Arab dan kerajaan di jazirah Arab sudah berlangsung lama. Karena itu, pelabuhan yang saat ini sedang diperbaiki untuk dijadikan pelabuhan sebagaimana fungsinya semula, pada saat itu sudah menjadi pelabuhan yang bukan hanya diperhitungkan secara lokal, namun sudah menjadi pelabuhan lalu-lintas internasional seperti halnya Pelabuhan Ampenan di Lombok Barat yang sebelumnya menjadi pelabuhan yang sangat ramai. Labuhan Haji di Lombok Timur, sebagaimana fungsi dari Pelabuhan Ampenan di bagian barat telah mem-

berikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan maritim di kawasan Lombok Timur menggantikan posisi Labuhan Lombok yang pada abad XVI menjadi pusat pelabuhan yang ramai di Lombok Timur.

Suku Bugis di Labuhan Haji sampai sekarang mencatatkan identitasnya sendiri sebagai penghuni di tempat tersebut. Mereka juga menggunakan identitas yang mereka bawa dari suku aslinya seperti bahasa dan sebagian dari adat-istiadat yang ada. Namun mereka juga berhubungan dengan masyarakat Sasak yang ada di sekitarnya. Pada umumnya mereka adalah pelaut yang ulung. Di tempat ini selain mereka sebagai pelaut mereka juga sebagai saudagar, atau mungkin juga juragan seperti halnya masyarakat keturunan Arab yang sampai saat ini tinggal disana.

Tanjung Luar

Pelabuhan Tanjung Luar yang berada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur adalah tempat pelelangan ikan terbesar di Lombok. Di pelabuhan ini setidaknya ada 67 unit kapal nelayan yang 40 di antaranya berburu hiu. Jenis ikan hiu yang biasanya ditangkap oleh para nelayan adalah Hiu Loreng, Hiu Kejen, Hiu Lonjor dan Hiu Tikus. Khusus untuk ikan yang berbadan besar, para nelayan umumnya sudah memiliki pemesan tetap. Sirip hiu diekspor ke Hongkong, sedangkan insang Manta Ray dikapalkan ke sebuah pabrik kosmetik di Surabaya. Tanjung Luar juga merupakan wilayah permukiman masyarakat Bugis yang tinggal di rumah-rumah bertiang.

Sampai saat ini, kepercayaan Suku Bajo terhadap ritual menyelamatkan laut masih dilakukan. Ritual warga Dusun Toroh Selatan, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak melakukan *Nyalamak Dilau*, yakni melarung kepala kerbau (*Ditiba Tikolok*) ke lokasi batu karang di tengah laut. *Nyalamak Dilau* berarti selamat laut atau dpat juga disebut sebagai *Nyalama Palabuang*. Selamat ini sebagai bentuk rasa syukur sekaligus pengharapan agar hasil ikan tangkapan mereka meningkat. Prosesi yang digelar masyarakat keturunan Suku Bajo tersebut sudah dilakukan secara turun temurun sejak 400 tahun silam, sama halnya dengan ritual yang dilakukan oleh masyarakat laut di Dusun Awang, Lombok Tengah.



Epilog

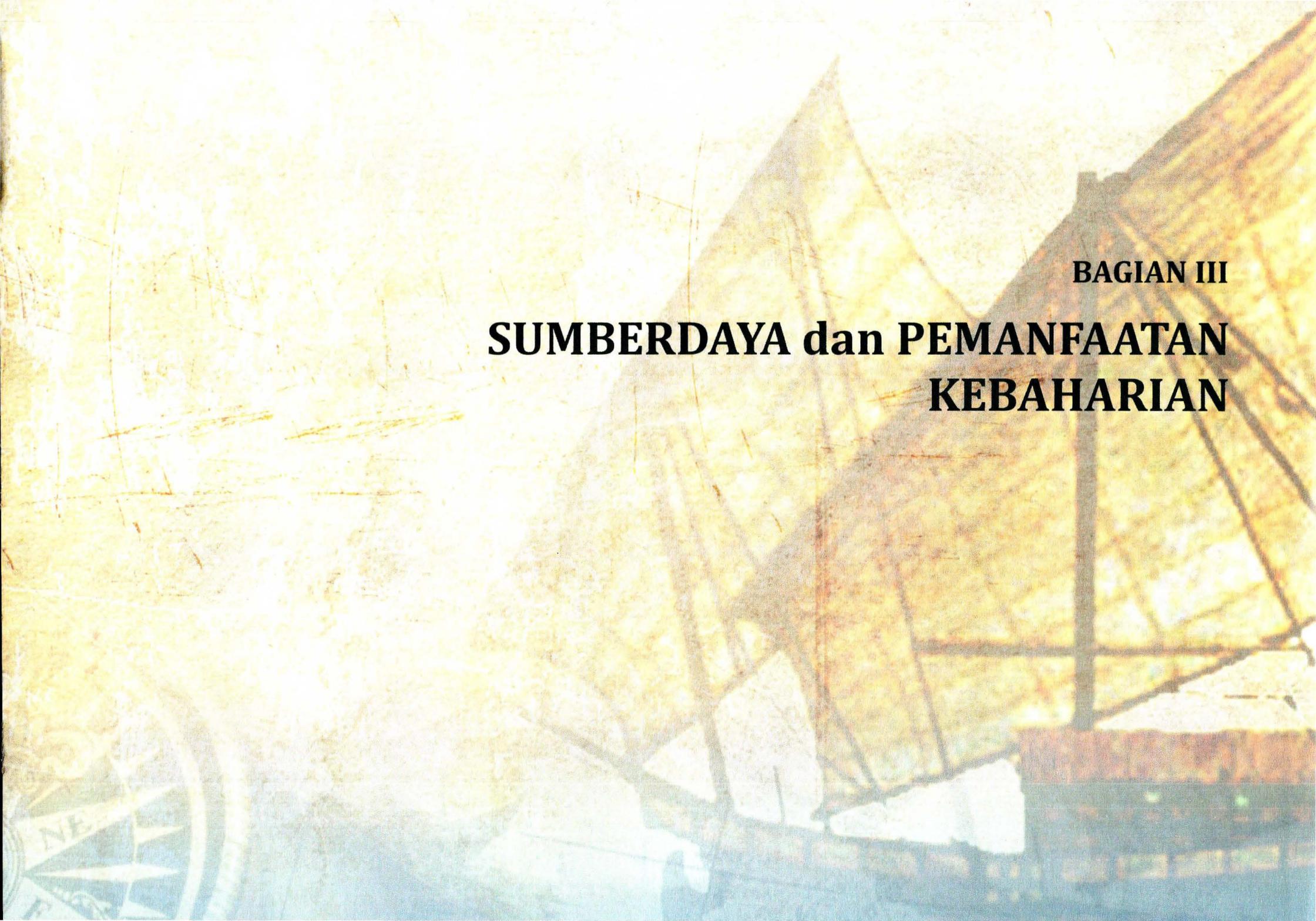
Pelabuhan Makassar dan Ampenan Lombok sudah ada sejak pertengahan abad XIV. Keadaan ini telah menjadikan Makassar dan Ampenan menjadi pusat niaga untuk pelaut dan saudagar di Asia dan Eropa dalam komunitas perdagangan rempah-rempah dan kayu cendana.

Semakin berkembangnya hubungan perdagangan dengan daerah luar, maka hubungan perdagangan ada tiga jalur yang dapat dilihat: 1) perdagangan orang Eropa (*Eropean trade*) suatu perdagangan yang dilakukan oleh kapal-kapal Eropa. Jenis perdagangan ini menempatkan Ampenan Lombok pada beberapa jalur panjang seperti New South Wales-Manila-Tiongkok dan New South Wales-Singapura-Benggala, dan jalur Lombok-Mauritius-Cape Colony; 2) perdagangan musiman (*ordinary mansoon trade*) yang biasanya dilakukan oleh saudagar Bugis dan Tionghoa. Jalur ini membawa Lombok berhubungan dengan tempat-tempat lain di Nusāntara seperti Jawa, Makassar, Riau, Kalimantan, Maluku, Singapura; dan 3) perdagangan lokal, adalah perdagangan antar pulau di lingkungan Nusa Tenggara.

Selain hubungan dagangnya dengan daerah luar dalam tinjauan pada orang-orang Bugis yang tersebar ke seluruh Nusāntara tidak lepas dari adanya filosofi Suku Bugis yakni "*kogisi monro sore lokie, kositu tomallabu sengereng*" yang "artinya dimana perahu terdampar, disanalah kehidupan ditegakkan". Inilah salah satu kekuatan yang mendorong orang-orang Bugis bermigrasi ke seluruh penjuru Nusāntara, meskipun terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menggerakannya seperti keadaan daerah (pergolakan kerajaan, dll), alasan ekonomi, dan lain sebagainya.

Sebagai hubungan tersendiri antara Pulau Lombok dan Makassar dan sejarah maritimnya sampai saat ini, tentu harus dilihat dari komunitas orang-orang Suku Bugis yang tinggal di Pulau Lombok. Komunitas Suku Bugis sampai saat ini sebagai perkembangan dari sejarahnya tersebar di pinggir-pinggir pantai di Pulau Lombok, mulai dari Pelabuhan Ampenan di Lombok Barat yang dahulunya merupakan pelabuhan internasional yang sangat ramai, di Dusun Awang, Lombok Tengah yang banyak menjelmakan budaya Suku Bajo, Labuhan Lombok di Lombok Timur, yang merupakan pelabuhan utama pada abad XVI, Labuhan Haji di Lombok Timur, serta Tanjung Luar di Lombok Timur bagian selatan. Di tempat-tempat inilah Suku Bugis di Pulau Lombok berkembang dan mengembangkan kehidupan baharinya, entah sebagai saudagar atau sebagai nelayan.

***Penulis adalah Guru Besar Ilmu Sejarah dan Pariwisata
Universitas Negeri Makassar***



BAGIAN III

**SUMBERDAYA dan PEMANFAATAN
KEBAHARIAN**



cek minah pergi pekan
naik sado ke cilangkap
laut nusantara kaya ikan
tebar jala ikan tertangkap

KOTA MAKASSAR DALAM SEJARAH MARITIM INDONESIA*

Edward L. Poelingomang

Makassar adalah keterangan atau predikat nama tempat yang dikenal lebih dahulu dari penyebutan untuk bandar niaga kerajaan kembar Gowa dan Tallo, yang dalam perkembangannya menyandang nama Kerajaan Makassar. Dalam naskah Jawa Kuno, *Nāgarakērtāgama* yang ditulis oleh Prapañca pada tahun 1364, Makassar telah disebut, disamping nama Luwu, Bantaeng, dan Selayar. Nama tempat yang disebut Makassar itu belum dapat diidentifikasi hingga sekarang. Selain itu dalam tradisi pelaut dan saudagar yang berniaga ke Maluku menyebut kawasan yang pulau-pulau berada di utara Pulau Sumbawa dengan nama Makassar. Tradisi penyebutan pulau-pulau itu kemudian diserap oleh pelaut dan saudagar Portugis setelah merebut dan menduduki Melaka. Dalam catatan Tomé Pires diungkapkan bahwa saudagar-saudagar Melayu menginformasikan bahwa terdapat jalur paling singkat dalam pelayaran ke Maluku yaitu melalui Makassar (Corteseo, 1944). Tampaknya informasi itu mendorong pelaut dan saudagar Portugis melusuri jalur pelayaran itu, sehingga dalam peta pelayaran pengembara Portugis Pulau Kalimantan diberi nama "Pulau Makassar yang Besar" (*Gramdos ilha de Macazar*) dan Pulau Sulawesi dan pulau-pulau di sekitarnya dengan sebutan "Pulau-pulau Makassar" (*Ilhas dos Macazar*). Selain penyebutan nama Makassar untuk pulau-pulau itu, kota-kota pelabuhan yang berada di pesisir barat Sulawesi yang menjadi tempat singgah dalam pelayaran ke Maluku juga diberikan predikat Makassar, antara lain Siang Makassar, Bacokiki Makassar, Suppa Makassar, Sidenreng Makassar, Napo Makassar dan Tallo Makassar.



* Makalah yang disampaikan dalam Seminar Hari Nusantara dengan tema "Dinamika Aktual Masyarakat Bahari Indonesia yang diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 10-11 Desember 2012.

Informasi menyangkut penyebutan Makassar yang meliputi wilayah yang luas itu, dalam perkembangan kemudian dimatereikan menjadi nama bandar niaga kerajaan Gowa dan Tallo (Sombaopu dan Tallo) dua bandar yang secara historis baru tumbuh kemudian setelah beberapa pelabuhan lain, seperti: Siang, Bacokiki, Suppa, Napo, dan Sidenreng. Sehubungan dengan itu topik pembicaraan dalam menelusuri sejarah kota Makassar sebagai kota niaga dan kota maritim ini pertama-tama diarahkan untuk menelusuri latar sejarah penamaan bandar niaga yang kini mengemban nama Makassar. Setelah itu diungkapkan proses kesejarahan kedudukan Makassar sebagai kota niaga dan kota maritim. Dengan demikian kiranya dapat dipahami mengapa penyebutan nama kota Makassar mengandung makna bagi perkembangan kota ini.

Terbentuknya Bandar Makassar

Informasi kesejarahan yang ditelusuri hanya memberikan gambaran bahwa bandar itu terbentuk dari dua bandar niaga dari kerajaan kembar Gowa-Tallo, yaitu bandar Tallo dari Kerajaan Tallo yang terletak di pesisir selatan muara Sungai Bira dan bandar Sombaopu dari Kerajaan Gowa yang terletak di pesisir utara muara Sungai Jeneberang. Dua kerajaan tetangga itu berhasil membentuk persekutuan pada tahun 1528, setelah melalui permufakatan penyelesaian konflik (perang). Permufakatan mereka itu dikenal dalam bentuk pernyataan bahwa “barang siapa yang mengadu-dombakan Kerajaan Gowa dengan Kerajaan Tallo akan dikutuk oleh Dewata” (*ia-iannamo tau ampasiewai Gowa-Tallo iamo nacalla Dewata*) (Wolhoff dan Abdurrahman t.t, 21; Stapel 1922, 2; Andaya 1981, 24). Kesepakatan itu berpengaruh bagi rakyatnya dan semua yang mengenal dua kerajaan kembar itu sehingga muncul ungkapan “satu rakyat, dua raja” (*sereji ata narua karaeng*). Persekutuan yang dibangun itu bersifat menyatukan dua kerajaan itu dalam kehidupan kenegaraan tetap mengakui kedudukan kekuasaan masing-masing sebagai raja kerajaan, di samping membentuk satu kesatuan dengan menempatkan raja Gowa sebagai pemegang kendali kekuasaan kerajaan kembar itu (*Sombaya*) dan raja Tallo sebagai pejabat mangkubumi (*Tumabicara Buta*).

Perang yang berakhir dengan pembentukan persekutuan dua kerajaan itu berbasis pada keinginan Kerajaan Gowa untuk mengubah orientasi kehidupan kerajaannya dari agraria ke dunia maritim pada periode pemerintahan raja Gowa IX, Tumaparissi Kalonna Daeng Matanre Karaeng Manguntungi (1510-1546). Kebijakan itu dilaksanakan mengingat semakin banyak arus migran saudagar Melayu ke kawasan ini setelah Melaka diduduki oleh Portugis pada 1511. Sehubungan dengan itu, setelah melakukan persekutuan dua kerajaan itu yang secara kesejarahan diperintah oleh raja dari keturunan yang sama¹¹, melaksanakan perluasan kekuasaan dengan menaklukan kerajaan-kerajaan pesisir dan memaksa mereka untuk melakukan perdagangan dengan bandar niaga Tallo dan Sombaopu.

¹¹ Menurut catatan sejarah raja Kerajaan Tallo yang pertama, Kareng Lowe ri Sero adalah saudara kandung dari raja Gowa VII, Batara Gowa, putera dari raja Gowa VI, Tunatangkalopi (1445-1460). Kisah tentang dua kerajaan tetangga ini terdapat dua versi. Versi pertama mengkisahkan bahwa kedua putera raja ini selalu berselisih.

Kebijakan ini dipandang oleh raja Gowa X, I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung, Tunipalangga Ulaweng (1546-1565) kurang memberikan peluang bagi kemajuan bandar niaga kerajaan kembar itu. Oleh karena itu dicanangkan kembali tindakan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan pesisir dan kerajaan-kerajaan yang memiliki potensi ekonomi, dengan kebijakan baru yaitu memaksa kerajaan-kerajaan taklukan untuk tunduk dan patuh kepadanya dan mengangkut orang dan barang dari negeri taklukan, khususnya yang bergiat dalam dunia perdagangan maritim ke bandar negerinya. Kebijakan itu saya sebut sebagai kebijakan *makkanama nu mammio* (aku bertitah dan kamu menaatinya). Kebijakan ini berakibat bandar-bandar niaga yang berada di pesisir jazirah selatan menjadi sirna, dan hanya ada dua bandar yaitu Tallo dan Sombaopu, namun secara fisik sudah sulit dipisahkan karena wilayah antara dua bandar itu telah menyatu dan tampak menjadi satu bandar yang terbentang dari muara Sungai Bira (Sungai Tallo) hingga muara Sungai Jeneberang yang dipenuhi oleh para saudagar dari berbagai bandar niaga yang berpredikat Makassar sebelumnya.

Kenyataan itu yang mendasari para saudagar itu menyebut bandar niaga Tallo dan Sombaopu itu dengan sebutan Bandar Makassar, dan tidak menyebut Tallo Makassar dan Sombaopu Makassar karena keduanya telah menyatu. Sebutan yang sama pula untuk menyebut dua kerajaan kembar yang telah membentuk persatuan itu dengan Kerajaan Makassar, nama yang sama dengan penyebutan bandar niaga mereka. Dalam struktur kerajaan kembar inilah dikenal raja Gowa menjadi raja atau kepala kerajaan dan raja Tallo menjadi mangkubumi atau kepala pemerintahan kerajaan.

Kenyataan kesejarahan itu memberikan petunjuk pada kita Bandar Sombaopu dan Bandar Tallo menyatu menjadi satu bandar pada periode pemerintah raja Tunipalangga Ulaweng dan mangkubumi Mangaijoang Berang Tunipasuru (raja Tallo). Bila dipertimbangkan setelah dua atau tiga tahun memerintah kemudian melakukan ekspedisi penaklukan selama kurang lebih 5 tahun,

Karena itu sebelum mangkat ia membagi wilayah kerajaannya kepada dua puteranya. Batara Gowa menjadi raja dari wilayah yang dikenal dengan Kerajaan Gowa, sementara adiknya menjadi raja atas wilayah yang kemudian disebut Kerajaan Tallo. Versi lain mengkisahkan bahwa sebelum raja mangkat ia telah berpesan agar Karaeng lowe ri Sero yang kelak menggantikannya. Ketika raja mangkat putera tertuanya, Batara Gowa bertindak merebut atribut kerajaan (Sudanga) sehingga dewan kerajaan mengakuiinya sebagai raja. Akibat perebutan itu, adiknya meninggalkan kerajaan dan pergi menetap di Pacinnang. Katika kehadirannya itu diketahui oleh para gelang di wilayah Bira, empat galarang bersepakat untuk menobatkannya menjadi raja. Tawaran itu diterima, sehingga mereka bergiat membangun istana kerajaan di wilayah pesisir pada muara Sungai Bira yang dikenal dengan nama hutan Tolloang. Dari nama hutan itulah kemudian kerjaan yang didirikan itu dinamakan Kerajaan Tallo.



maka dapat diperkirakan bahwa setelah 8 tahun memerintah wilayah antara bandar Tallo dan Sombaopu telah dipenuhi oleh penduduk kerajaan taklukan yang bergiat dalam dunia maritim, dan dua bandar itu telah menyatu, dan berkedudukan sebagai satu-satunya bandar niaga di pesisir barat jazirah selatan. Berdasarkan pada perkiraan itu dapat dinyatakan bahwa Bandar Makassar telah terwujud sekitar tahun 1557.

Seiring dengan kebijakan menempatkan dan memusatkan kegiatan pelaut dan saudagar dari kerajaan-kerajaan taklukan pada bandar niaga Tallo dan Sombaopu sebagai satu-satunya pusat niaga, maka kerajaan kembar ini melaksanakan “kebijakan pintu terbuka” (*open door policy*) dengan menganut prinsip 'laut bebas” (*mare liberium*). Kebijakan itu melapangkan para pelaut dan saudagar yang bergiat dalam dunia perdagangan maritim di kawasan kepulauan ini berdatangan dan memohon izin menetap dan berniaga. Saudagar yang jauh sebelumnya telah menetap dan berniaga di sekitar Sombaopu adalah saudagar Portugis pada tahun 1532 (Erkelens 1897, 82). Kebijakan penaklukan dan pemusatan kegiatan di Bandar Gowa-Tallo itu berdampak saudagar Melayu, yang sebelumnya bermukim di Bandar Siang (Pangkajene – Bungoro) memohon izin untuk menetap dan berniaga di Makassar. Dalam perkembangan kemudian datang pula saudagar-saudagar lain, seperti Belanda (VOC) pada 1603, Inggeris (1613), Spanyol (1615), Denmark (1618) dan Tiongkok (1618). Berkumpulnya para saudagar di bandar ini berhasil meningkatkan statusnya menjadi bandar transit internasional terpenting dan terutama ketika itu.

Anthony Reid yang meneliti dan mengkaji perkembangan perdagangan Makassar sebelum Perang Makassar (1666-1667; 1668-1669) berkesimpulan bahwa sejarah pertumbuhan perdagangan Makassar menampilkan kisah kemajuan dan keberhasilan yang tiada bandingnya dalam sejarah Indonesia (Reid 1983, 117). Bandar Makassar tumbuh dan maju dengan pesat dalam dunia perdagangan, menjadi pusat tujuan niaga bagi semua saudagar yang bergiat dalam dunia perdagangan maritim di kawasan kepulauan Indonesia. Saudagar Eropa dan timur asing lainnya yang datang berniaga dan menetap di bandar ini merasakan keamanan mereka terlindung dan penuh kedamaian. Itulah sebabnya mereka memaparkan dalam laporan bahwa raja bersikap sangat toleransi dan simpati serta suka memaafkan (Stapel 1922, 9).

Tantangan Bagi Makassar

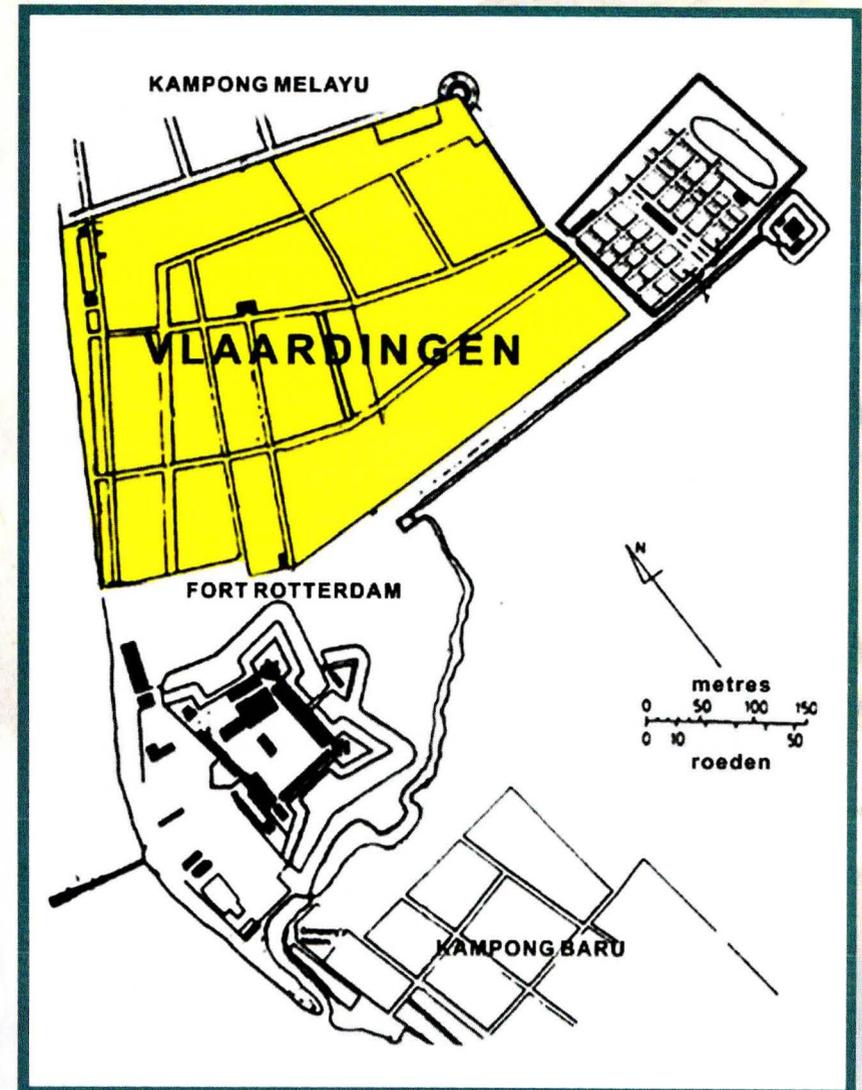
Kemajuan yang diukir dalam sejarah Kota Makassar ini mulai mengalami kesuraman setelah Perang Makassar (1666-1669). Kompeni (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*, disingkat VOC) yang tampil menjadi pemenang dalam perang itu bergiat mengubah kedudukan Makassar, karena dipandang sebagai nama yang tidak melapangkan kebijakan monopoli perdagangan rempah-rempahnya. Itulah sebabnya setelah usai perang, Cornelis Speelman tampil dengan rancangan baru mengubah kedudukan bandar niaga yang telah didu-

dukinya itu. Benteng-benteng pertahanan diruntuhkan dan hanya satu benteng yang tetap dipertahankan dan dijadikan tempat kegiatan administrasi dan niaga kompeni yaitu Benteng Jungpandang, yang diganti namanya menjadi Fort Rotterdam. Selain itu di bagian utara benteng itu dibentuk satu perkampuang saudagar (*negorij*) yang dinamakan Negorij Vlaardingen. Di tempat inilah para saudagar Belanda menetap dan menjual barang dagangan mereka. Di bagian utara *negorij* ini ditempatkan saudagar Melayu, sehingga tempat itu disebut Kampung Melayu.

Pada bagian timur dibangun istana untuk Arung Palakka, raja Bone, yang dinamakan Bontoala, dan lahan kebun untuk para saudagar Belanda yang disebut Kebun Kompeni (*Compagnie Tuin*). Kompeni juga memiliki areal di bagian timur yang disebut *Koninksplein* (Karebosi) Untuk menjamin keamanan kegiatan berkebun dibangun kemudian sebuah benteng di daerah Patunuang, sebelah timur *Koninksplein*, yang dikenal dengan nama Fort Vredenberg.

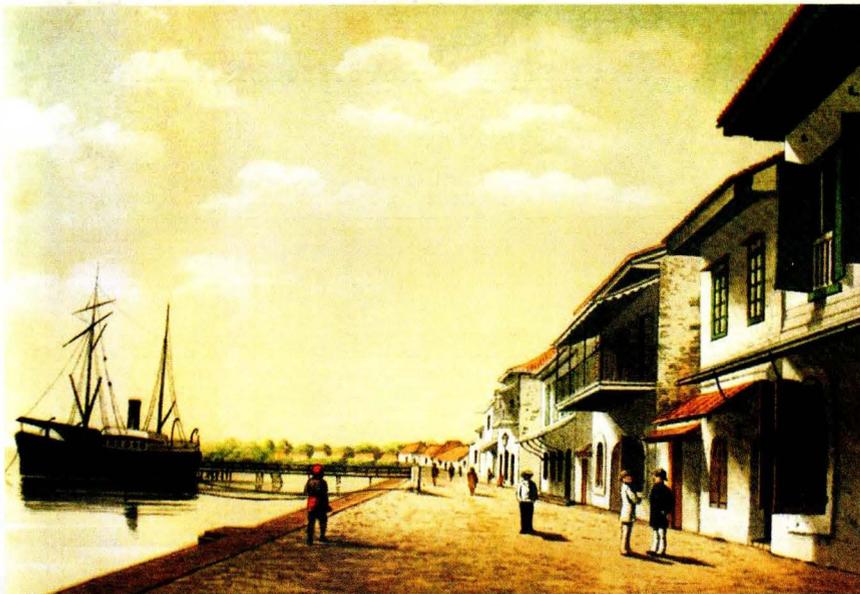
Pengaturan ini tampak menunjukkan bahwa Kompeni, khususnya kebijakan Speelman, bertujuan untuk mensirnakan penyebutan Makassar untuk kota baru yang dibangun itu. Untuk maksud itulah Makassar yang menjadi pelabuhan transito internasional terbesar itu tidak dijadikan kota pelabuhan dagang melainkan diubah statusnya menjadi pos pengaman kebijakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Itulah sebabnya bandar ini hanya berfungsi sebagai pelabuhan singgah kapal Kompeni dari Batavia yang berlayar ke dan datang dari Maluku.

Nama Makassar tidak tampak dalam rancangan kota baru yang dibangun di atas reruntuhan Kota Makassar. Penyebutan area tempat kegiatan perdagangan dengan nama Vlardingen itu mengindikasikan bahwa Speelman telah menggantikan nama kota itu. Namun hubungan antara para penguasa daerah kerajaan dengan Kompeni berpusat pada Fort Rotterdam, yang di kalangan mereka lebih dikenal dengan nama Jungpandang, maka tampak bahwa kota baru ciptaan Speelman itu dikenal kota Jungpandang.



Dalam perkembangan kemudian ketika produksi teh Tiongkok mendapat permintaan pasar di Eropa, pihak Kompeni bergiat menjalin kembali hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Usaha itu mendorong Kompeni membuka beberapa pelabuhan dagang di wilayahnya bagi perdagangan maritim Tiongkok pada tahun 1731. Dalam kebijaksanaan itu tampak bahwa kota baru ciptaan Speelman itu kembali disebut dengan Pelabuhan Makassar. Hal itu mungkin berkaitan dengan pengetahuan saudagar Tionghoa akan nama bandar itu dengan nama Makassar dan bukan Vlaardingen. Sejak itu tampak bahwa bandar Makassar mulai kembali diberi peluang bertumbuh kembali, meskipun dalam kebijakan hubungan niaga dengan Tiongkok itu, hanya diizinkan dua jung setiap tahun untuk mengunjungi Makassar.

Perdagangan teh dan hubungan perdagangan dengan Tiongkok itu akhirnya mendorong pemerintah Hindia Belanda, yang menggantikan kedudukan Kompeni di Indonesia, bergiat bersaing dengan saudagar Eropa lainnya, khususnya Inggris, berusaha kembali memajukan perdagangan Makassar dengan menjadikan kota niaga itu berstatus pelabuhan bebas pada 1 Januari 1847. Kebijakan itu berhasil meningkatkan volume perdagangan Makassar dan menyaingi bandar niaga Inggris di Singapura (baca: Poelinggomang 2002). Namun dalam perkembangan kemudian (1872), pemerintah Hindia Belanda memandang kemajuan Makassar itu tidak menguntungkan pemerintah kecuali bandar niaga asing lainnya. Kenyataan menunjukkan semakin kurang berkembang bandar niaga Batavia, Semarang, dan Surabaya. Oleh karena itu pemerintah menghendaki perubahan status bandar Makassar dari pelabuhan bebas menjadi pelabuhan wajib pajak, namun mendapat reaksi protes berbagai pihak karena dipandang akan lebih menguntungkan bandar niaga asing lainnya.



Perkembangan dan kemajuan Makassar itu didukung oleh sejumlah faktor, antara lain: (1) letak Makassar berada di pusat dari kawasan perdagangan di kepulauan ini; (2) posisinya berada pada jalur jaringan perdagangan dari negara-negara yang berada di bagian utara benua Asia dengan Australia yang berada di selatan, juga pada jalur pelayan dari Samudera Pasifik menuju ke Samudera Indonesia; (3) pelabuhannya termasuk pelabuhan alam yang nyaman karena terlindung oleh pulau-pulau kecil yang bertebaran di depannya sehingga gelombang laut pada muson barat laut tidak mengancam kapal dan perahu dagang yang berlabuh; (4) sebagian penduduk Sulawesi Selatan bergiat dalam dunia perdagangan maritim dan dikenal sebagai pelaut dan saudagar yang ulung dan cekatan. Banyak karangan yang mengungkapkan bahwa pelaut dan saudagar dari Sulawesi Selatan yang memegang peranan penting dalam dunia perdagangan maritim pada abad XIX.

Salah satu alasan dari kelompok yang menentang rencana pemerintah untuk membatalkan kedudukan pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan bebas itu yang dipandang sangat penting adalah bahwa jika status Makassar diubah maka pelaut dan saudagar dari Sulawesi Selatan akan kembali memusatkan kegiatan perdagangan maritim mereka ke bandar niaga asing. Itu berarti akan melemahkan kedudukan perdagangan maritim di Hindia Belanda dan kemungkinan dapat melapangkan bangsa Eropa lain untuk masuk dan memiliki koloni di Indonesia, karena banyak kerajaan masih berkedudukan secara de facto kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu rencana itu ditunda hingga pemerintah dapat menguasai secara de facto wilayah kerajaan itu. Itulah sebabnya setelah pemerintah mengusahakan perusahaan pelayaran yang dapat menggantikan peran pelaut dan saudagar dari Sulawesi Selatan dengan membangun *Koninklijk Paketvaart Maatschappij* (KPM) pada 1891 dan melaksanakan ekspedisi militer Sulawesi Selatan pada 1905, baru pemerintah mengumumkan pembatalan kedudukan pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan bebas dan menjadikan pelabuhan wajib pajak pada 1906.

Kedudukan Makassar sebagai pusat perdagangan dialihkan ke pusat perdagangan di Jawa. Untuk melayani kegiatan perdagangan ke Kalimantan dipusatkan di Semarang dan untuk kawasan timur dibebankan kepada otoritas Pelabuhan Surabaya. Sejak itu segala kegiatan ekspor dan impor harus melalui Pelabuhan Surabaya, dan Makassar diberi hadiah hanya sebagai pintu gerbang, tempat berlalunya kegiatan perdagangan ke kawasan timur Indonesia maupun ke negara asing lainnya. Selain itu untuk tidak merisaukan diberikan hadiah status kotamadya (*staatsgemeente*) pada April 1906, bersama empat kota lainnya yaitu: Batavia, Semarang, Surabaya, dan Medan.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda itu tampak lebih mengutamakan kota pelabuhan di Jawa untuk tumbuh menjadi bandar niaga terpenting, dan bergiat menjadinya kota pelabuhan di luar Jawa sebagai penyanggah kemajuan bandar niaga itu termasuk Makassar, Banjarmasin, Ternate, Banda, Amboina, Menado dan Kema. Kota Makassar dalam perkembangan kemudian lebih difungsikan menjadi kota administrasi pemerintahan.

Kedudukan kota Makassar ini kembali mengalami perubahan nama pada tahun 1972, hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Speelman pada tahun 1669. Perbedaannya hanyalah pada luas areal kota. Jika Speelman merancang dengan memperkecil luas areal kota dan menempatkan administrasi kolonialnya pada Benteng Jungpandang (Fort Rotterdam) maka pada periode 1972 perubahan nama Makassar menjadi Ujungpandang itu didalihkan pada peluasan areal wilayah kota setelah memasukan beberapa bagian wilayah dari Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Perubahan nama itu juga didalihkan bahwa penduduk dari luar Makassar atau dari daerah-daerah yang datang ke Makassar selalu menyatakan ke Jungpandang. Tidak disadari bahwa kehendak ke Jungpandang itu berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan kolonial yang berpusat di Benteng Jungpandang, bukan pada kota yang telah dipulihkan namanya kembali menjadi Makassar sejak 1731. Masih terdapat lagi sejumlah argumentasi yang ditampilkan

oleh pendukung perubahan nama kita itu, seperti misalnya bahwa kota Makassar yang dibangun itu dahulunya merupakan areal hutan pohon pandan, ataupun menyatakan bahwa nama itu diberikan oleh saudagar asing.

Pada sisi lain muncul pula sejumlah pemikiran yang menentang perubahan nama itu karena memandang nama itu lebih dikenal di dunia internasional daripada nama Ujungpandang. Pendapat ini pada dirinya terkandung anggapan bahwa perubahan nama itu secara sengaja untuk memudahkan ketenaran Makassar sebagai tempat yang pernah menjadi bandar transito internasional yang terkenal di kepulauan ini dan bahkan di Asia Tenggara. Selain itu juga ada yang memberikan alasan bahwa Ujungpandang itu hanya suatu areal kecil yang menjadi tempat dibangunnya Benteng Jungpandang, sementara penyebutan Makassar itu menunjukkan pada pusat perdagangan yang sejak awal wilayahnya luas mulai dari Sungai Bira di bagian utara hingga Sungai Jeneberang di bagian selatan. Bahkan nama Makassar itu telah mengukir sejarah kegemilangan yang mengagumkan. Oleh karena itu terus bergiat untuk dapat kembali memulihkan nama itu pada kota yang telah diperluas dan diberi nama Ujungpandang.

Sejarah kegemilangan Makassar itu diungkapkan oleh Anthony Reid dari hasil penelitiannya yang dipublikasikan dalam jurnal *RIMA* pada tahun 1983 dengan judul "The Rise of Makassar". Artikel ini menambah rangsangan bagi kelompok yang menghendaki nama Makassar dipulihkan. Suatu peluang tampak tertangkap oleh mereka ketika BJ Habibie menjadi Presiden RI. Pemerintah Kotamadya Makassar memprakarsai sebuah seminar untuk membicarakan kembali perubahan nama Ujungpandang kembali ke Makassar di Makassar Golden Hotel (MGH). Pada seminar itu hadir juga H.M. Daeng Patompo, tokoh perintis dan pengubah nama Makassar menjadi Ujungpandang. Pada kesempatan itu ia juga mengajukan pernyataan mendukung pengubahan nama Ujungpandang kembali menjadi Kota Makassar, setelah menjelaskan secara singkat mengapa ia melakukan perubahan itu, yang konon atas desakan pemerintah pusat. Seminar itu akhirnya berhasil mencapai kesepakatan untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat agar memulihkan nama Makassar dengan mengubah keputusan terdahulu yang menggantikan nama Makassar menjadi Ujungpandang. Hasil keputusan seminar itu akhirnya diusung oleh tokoh-tokoh pendukung nama Makassar ke Jakarta.

Usulan untuk mengembalikan dan memulihkan nama Makassar itu mendapat persetujuan dari pemerintah sehingga akhirnya menjelang akhir tahun 1999, nama Makassar kembali bergema menggantikan nama Ujungpandang. Keputusan pemerintah itu memberikan suasana baru bagi kehidupan penduduk kota pada khususnya dan penduduk Sulawesi Selatan pada umumnya. Pemerintah kota bergiat merancang pengembangan kota ini untuk dapat menampilkan wajah yang mempesona dengan rancangan untuk menjadikan kota maritim, budaya, dan pendidikan disamping polesan pesona lain untuk menambah maraknya kegiatan kehidupan kota. Mudah-mudahan dalam perkembangannya ke depan, pemerintah berkenan mengubah kebijakan perdagangan maritim dan menjadikan Makassar menjadi salah satu sentra terpenting, di samping Jakarta, Semarang, dan Surabaya dalam kegiatan perdagangan maritim.

Tinjauan Akhir

Gambaran ringkas yang diungkapkan ini menunjukkan bahwa dalam proses sejarah kota ini pernah mengalami perubahan nama dua kali. Pertama, pada tahun 1669, Ketika Speelman ingin membangun Makassar menjadi pos pengaman kepentingan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Untuk maksud itu, wilayah kota diperkecil dan nama Makassar diubah menjadi Vlardinghen, agar dapat memudahkan kedudukan kota ini sebagai bandar transito internasional yang terpenting ketika itu. Karena kemajuan Makassar dipandang tidak melapangkan kebijakan monopoli perdagangan, konsep yang ketika itu tertuju pada keinginan untuk berdagang sendiri. Itulah sebabnya semua saudagar asing (Eropa dan Timur asing lainnya) diperintahkan untuk meninggalkan Makassar.

Perubahan nama kedua kalinya terjadi ketika H.M. Daeng Patompo menjadi Walikota Makassar. Perubahan ini didalihkan karena wilayah kota diperluas setelah memasukan bagian dari wilayah beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Pangkep. Perluasan wilayah itu tampaknya dipandang dapat membuka peluang bagi pengembangan kegiatan perdagangan di Makassar, sehingga pemerintah pusat mendorong Walikota Makassar untuk menggantikan nama Makassar yang dikenal sebagai bandar niaga yang pernah menyandang keberhasilan yang tiada bandingnya dalam dalam kegiatan perdagangan maritim dalam sejarah Indonesia itu menjadi Ujungpandang.

Sejarawan mencatat bahwa sebelum perubahan nama pertama terjadi, Makassar adalah satu-satunya pelabuhan transito internasional yang terpenting di wilayah Asia Tenggara. Anthony Reid berkesimpulan dari hasil studinya bahwa kemajuan perdagangan Makassar merupakan kisah keberhasilan yang tiada bandingnya dalam sejarah Indonesia. Ketenaran itu diredukan oleh kebijakan Speelman, namun kemudian nama itu kembali dimatereikan ketika mulai dibuka kembali menjadi pelabuhan niaga bagi saudagar Tiongkok. Pada waktu semakin maraknya kegiatan perdagangan pada abad XIX, Makassar dijadikan salah satu pelabuhan bebas pada 1 Januari 1847. Kebijakan itu memberikan peluang Makassar tampil menjadi pelabuhan saingan terpenting dari kemajuan Singapura, sehingga memaksa saudagar Inggris dan Tionghoa di Singapura mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Makassar. Oleh karena kemajuan dan keberhasilan Makassar itu dipandang tidak melapangkan Batavia, Semarang, dan Surabaya berkembang maka pemerintah kolonial membatalkan kedudukan itu pada 1906.

Pada era kemerdekaan, kota Makassar kembali mengalami perubahan nama menjadi Ujungpandang pada tahun 1972. Setelah 27 tahun kemudian kembali mengembankan nama Makassar. Mudah-mudahan nama Makassar yang berindikasi bagi kemajuan kegiatan perdagangan itu akan kembali bergema atas keinginan baik pemerintah untuk menjadikan kota pelabuhan ini bandar internasional, yang bukan hanya diberikan peluang bagi kapal-kapal asing boleh mengunjungi pelabuhan ini, tetapi juga boleh melakukan kegiatan impor dan ekspor langsung dengan dunia perdagangan internasional dan menjadi pelabuhan transito internasional, makna predikat nama Makassar yang tampak menunjukan pada kegiatan perdagangan dapat kembali meraih kegemilangannya.

***Penulis adalah pengajar pada Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin***

FUNGSI PELABUHAN dan PELAYARAN di INDONESIA*

Wahyono Bimarso

Pendahuluan

Indonesia adalah satu dari Negara Maritim terbesar di dunia karena memiliki Selat Malaka, dan terdiri dari 17,508 Pulau, 54,716 Km garis pantai merupakan terpanjang kedua setelah Kanada. Disamping itu juga terletak di antara dua benua Australia dan Asia. Hal itulah sehingga pelabuhan dan pelayaran sangat penting harus menjadi perhatian serius bagi kita. Indonesia juga disebut sebagai Negara Kepulauan karena dua hal yaitu secara:



- *Geo-Ekonomi*, memiliki potensi sumberdaya ekonomi yang bersifat dapat diperbaharui (perikanan), tidak dapat diperbaharui (pertambangan), dan jasa-jasa lingkungan (pariwisata, bahari, dan industri kelautan serta perdagangan antar negara maupun antar pulau).
- *Geo-Idiologis*, dengan orientasi kebijakan pembangunan kelautan: Indonesia memiliki dasar idiologi pembangunan berbasis laut dan tidak terpisah dengan daratan.
- *Politik-Idiologi*. Kelautan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari idiologi negara, doktrin Wawasan Nusantara, pilihan model pembangunan yang tepat, sehingga idiologi pembangunan kelautan Indonesia diharapkan lebih memperkuat nilai-nilai nasionalisme, wawasan kebangsaan, dan mempersatu seluruh komponen bangsa yang heterogen.

* Makalah Seminar Hari Nusantara "Membangkitkan Wawasan Budaya Melalui Peningkatan Peran SDM dan Iptek" yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Denpasar, Bali, pada Rabu, 28 November 2012.

Kebijakan Nasional dan Kondisi Negara Kepulauan Indonesia Saat ini

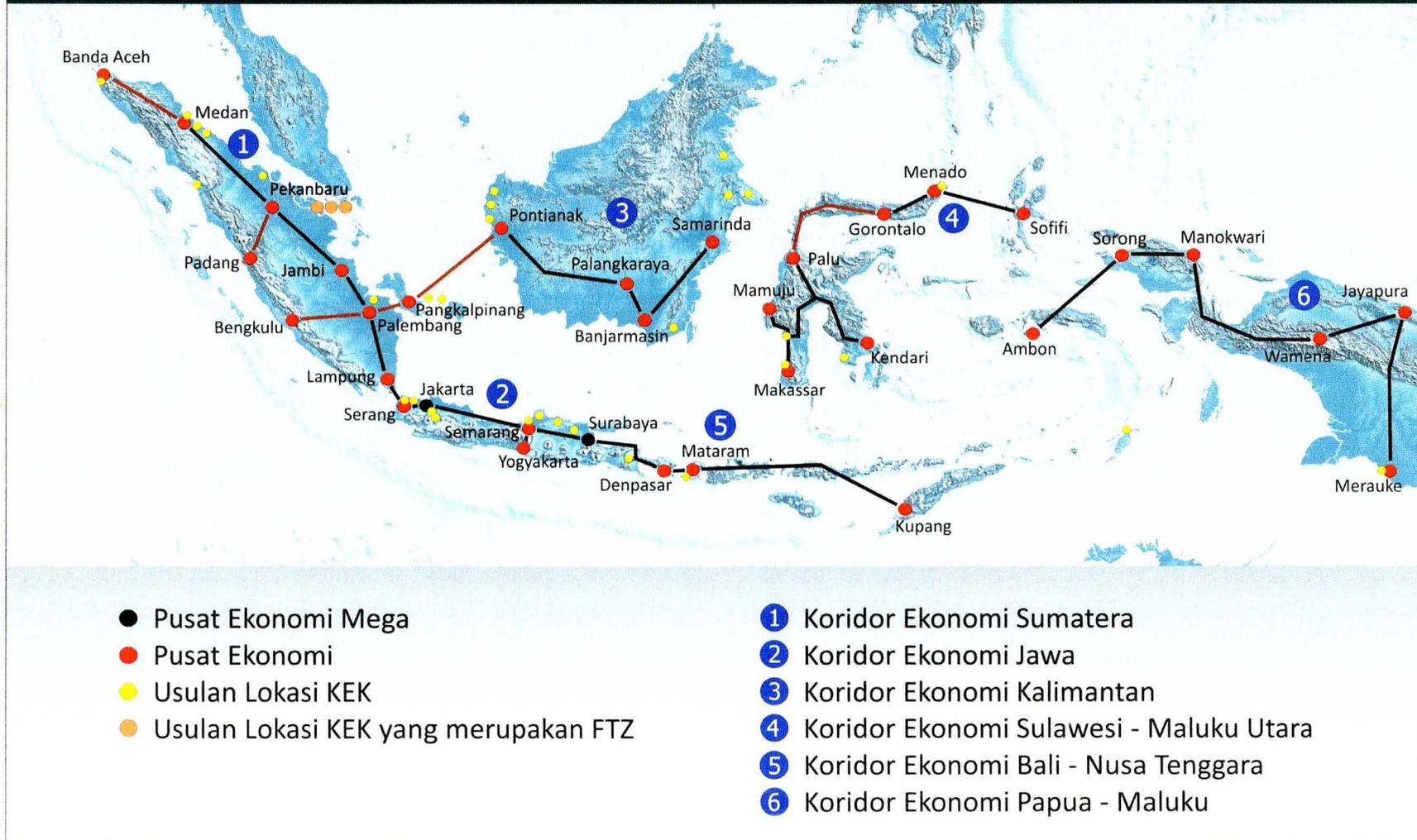
Di dalam pembangunan kemaritiman ada banyak hal yang terjadi sekarang, yaitu adanya Program Pemerintah. *Masterplan* Koridor Ekonomi belum menonjolkan kemaritiman sebagai prioritas karena masih berbasis pada eksploitasi sumberdaya alam. Padahal, dari segi kebijakan, seharusnya kita juga mempertimbangkan kompetisi antar pelabuhan di dunia dan armada pelayaran yang tangguh dan kuat.



Gambar 1. Kebijakan Pemerintah di Bidang Maritim

Dari segi transportasi dan logistik Indonesia merupakan negara dengan ongkos logistik termahal di dunia karena adanya ongkos biaya tinggi di Pelabuhan, keselamatan dan keamanan yang belum terjamin, serta organisasi yang belum terkoordinir dengan baik. Masalah berikutnya di Indonesia, masih terjadi ketimpangan antara Indonesia barat dan timur berupa skala ekonomi. Di samping terlihat kebijakan di bidang kemaritiman selama ini (Gambar 1) dan tentang koridor ekonomi negara kita (Gambar 2).

Economic Corridor Priority



Gambar 2. Economic Corridor Priority of Indonesia

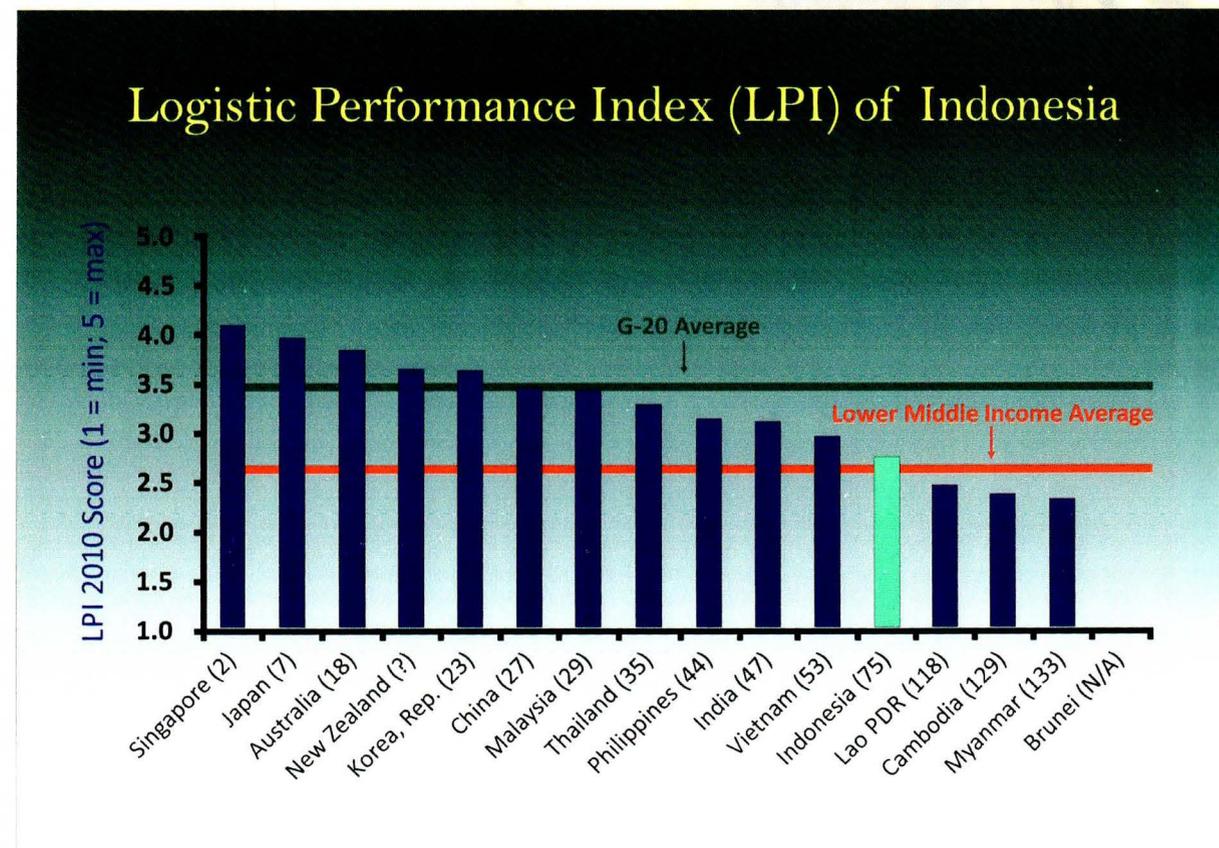
Kondisi Transportasi Logistik di Indonesia

Logistik dan Transportasi

Perkembangan industri logistik tumbuh 14,2% menjadi US\$ 153.540.000.000 pada tahun 2012, karena pertumbuhan ekonomi yang kuat didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tinggi. Hal ini didorong oleh relokasi dan arus yang kuat modal yang diharapkan dapat mendorong kegiatan manufaktur di Indonesia dan meningkatkan permintaan logistik, rumah tangga perdagangan dan bagi Indonesia diharapkan untuk melihat pertumbuhan yang kuat sebesar 32,5% mencapai US\$ 514.200.000.000 pada tahun 2012.

Pertumbuhan investasi langsung asing (FDI) diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2012 dengan perkiraan nilai US\$ 21.500.000.000. Realisasi FDI di sektor transportasi dan penyimpanan mencapai US \$ 2,2 miliar pada September 2011, yang memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap FDI, setelah sektor pertambangan.

Transportasi Indonesia dan industri logistik diperkirakan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (2011-2016) dari 14,7% mencapai US\$ 266.300.000.000 pada tahun 2016. Terhambatnya perkembangan infrastruktur akan memperlambat pertumbuhan jika hambatan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Gambar 3 ini memperlihatkan *Logistic Performance Index Indonesia* yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain di dunia, Indonesia masih menempati ranking 75 dunia.



Gambar 3. Logistic Performance Index of Indonesia

Pergerakan Barang di Indonesia

Perkembangan volume kargo laut keseluruhan meningkat 5,8% menjadi 943.100.000 ton pada 2012 dibandingkan dengan 891.500.000 ton pada tahun 2011. Industri pengiriman dipengaruhi oleh kelebihan kapasitas dan tingkat rendah di Trans-Pasifik dan Asia-Eropa rute jarak jauh. Namun, diharapkan untuk mempertahankan pertumbuhan yang stabil didorong oleh permintaan dari perdagangan intra-ASEAN.

Operator kapal Indonesia yang mendominasi pasar lokal sejak pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan transportasi domestik untuk menggunakan kapal milik lokal. Namun, impor dan pengiriman ekspor masih didominasi oleh kapal asing. Volume kargo dengan kereta api akan meningkat menjadi 20,4 juta ton pada 2012 dibandingkan dengan 19,7 juta pada tahun 2011. Barang diangkut oleh kereta api Jawa sebagian besar terdiri dari minyak bahan bakar, pupuk, semen, batubara dan kontainer. Lalu lintas Sumatera selatan dan barat dominan adalah batubara, dan Sumatera Utara lalu lintas utama adalah minyak sawit mentah. Volume kargo melalui udara tumbuh 5,7% menjadi 920.000 ton pada 2012. Fasilitas dan ekspansi kapasitas bandara di Indonesia dapat meningkatkan pasar Indonesia kargo udara. Empat bandara utama di Indonesia, Soekarno-Hatta, Juanda, Ngurah Rai dan Polonia, dibuat untuk 47,2% dari *throughput* kargo udara total 2011. Soekarno-Hatta menyumbang sekitar 36% dari kargo total volume udara di Indonesia.

Trend Industri di Indonesia

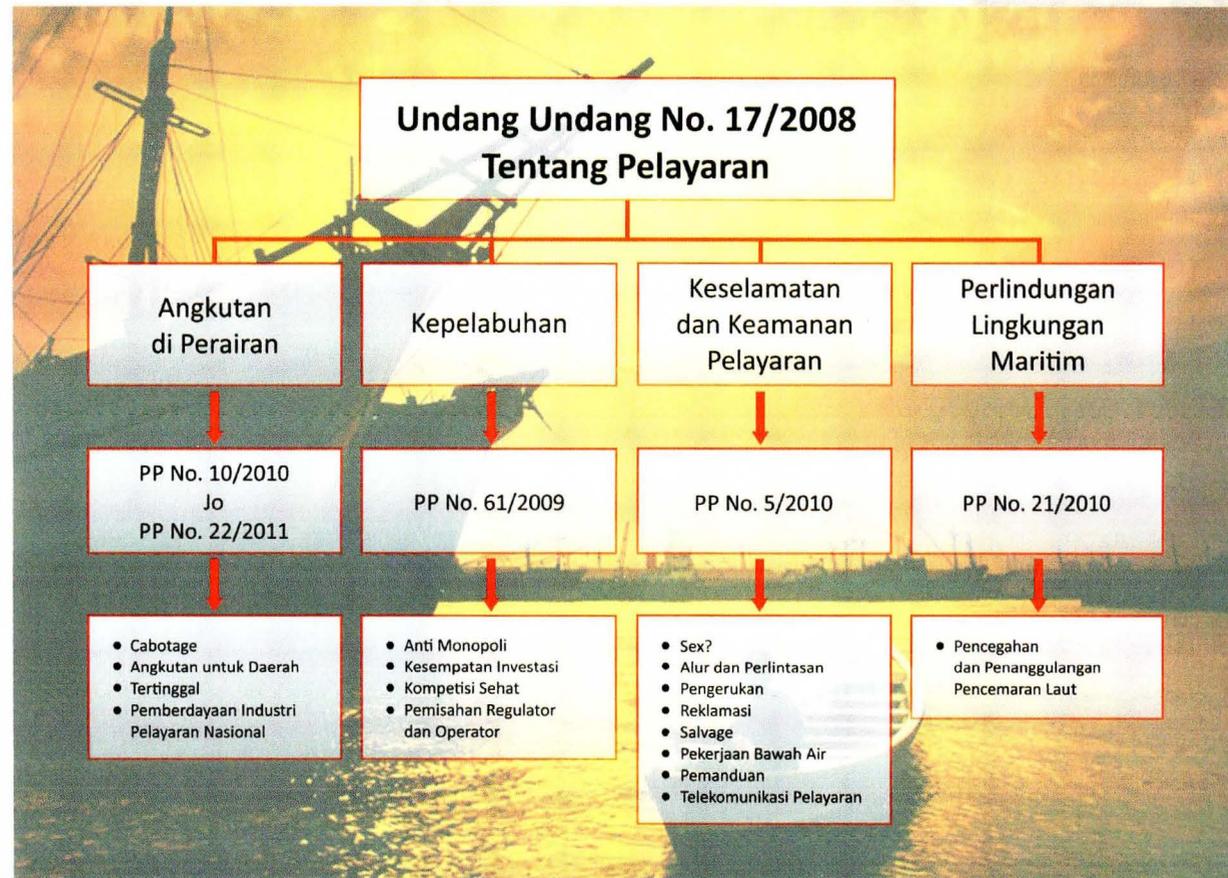
Kecenderungan yang lebih tinggi terhadap nilai tambah layanan dan itu adalah area pertumbuhan logistik industri di Indonesia pada tahun 2012. Logistik penyedia layanan perlu bekerja menuju layanan nilai tambah lebih, sementara memperkuat layanan menengah. Kualitas Service dan kehandalan adalah prioritas utama untuk pelanggan untuk dipertimbangkan ketika memilih jasa logistik. Transportasi dan pasar logistik Indonesia diharapkan untuk melihat percepatan pertumbuhan, dibantu oleh pertumbuhan ekonomi Asia. Komoditas ekspor utama Indonesia meliputi minyak dan gas, minyak kelapa sawit, batubara, peralatan, dan tekstil.

Dengan lebih dari 230 juta penduduk dan luas wilayah geografis, permintaan untuk distribusi ritel di seluruh negeri menawarkan pasar yang besar untuk sektor logistik. Disarankan bagi penyedia layanan logistik untuk memasuki pasar yang menguntungkan dengan menawarkan *end-to-end* distribusi layanan dari aliran material masuk untuk barang jadi pergudangan, manajemen persediaan, pemeriksaan, kembali penanganan dan pengiriman nasional. Service pasar adalah salah satu segmen yang paling cepat berkembang di Indonesia. Layanan bagian pengiriman telah menjadi sangat penting bagi produsen, terutama di mesin, otomotif dan elektronik industri, logistik internasional penyedia layanan memiliki komitmen untuk memperluas penawaran layanan mereka di layanan bagian logistik.

Kondisi Pelabuhan dan Angkutan Laut/Pelayaran di Indonesia

Undang Undang Pelayaran No. 17/2008

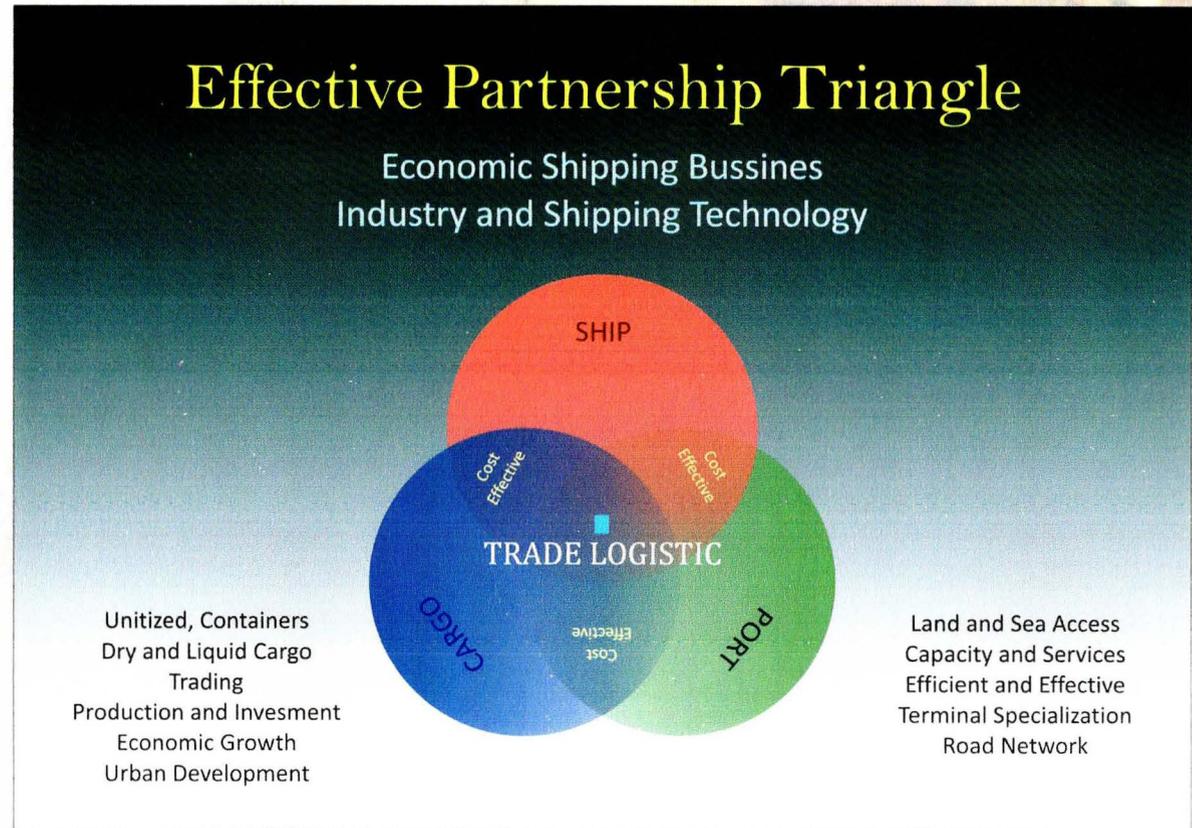
Pemerintah telah menerbitkan Undang Undang 17/2008 tentang Pelayaran yang pada intinya terdiri dari 4 (empat) bagian utama, yaitu tentang Angkutan di Perairan, Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, dan Perlindungan Lingkungan Maritim seperti Gambar 4 di bawah ini:



Gambar 4. Undang Undang Pelayaran No. 17/2008

Kepelabuhanan

Pengertian Pelabuhan: Pelabuhan tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat giat pemerintahan dan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan pelayaran, kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Pelabuhan juga tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan kapal dan barang seperti yang terlihat pada Gambar 5 berikut:



Gambar 5. Hubungan yang tidak terpisah antara kegiatan kapal barang dan pelabuhan

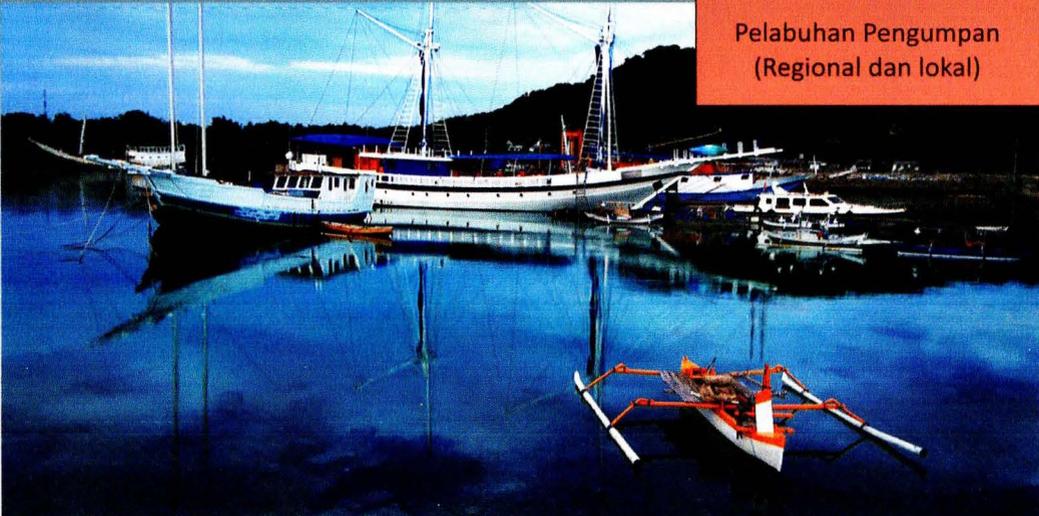
Indonesia banyak memiliki banyak pelabuhan dan di samping itu memiliki peran, fungsi dan hirarki sesuai undang undang, terlihat pada Gambar 6 berikut:

Main Port in Indonesia



Gambar 6. Pelabuhan Utama di Indonesia

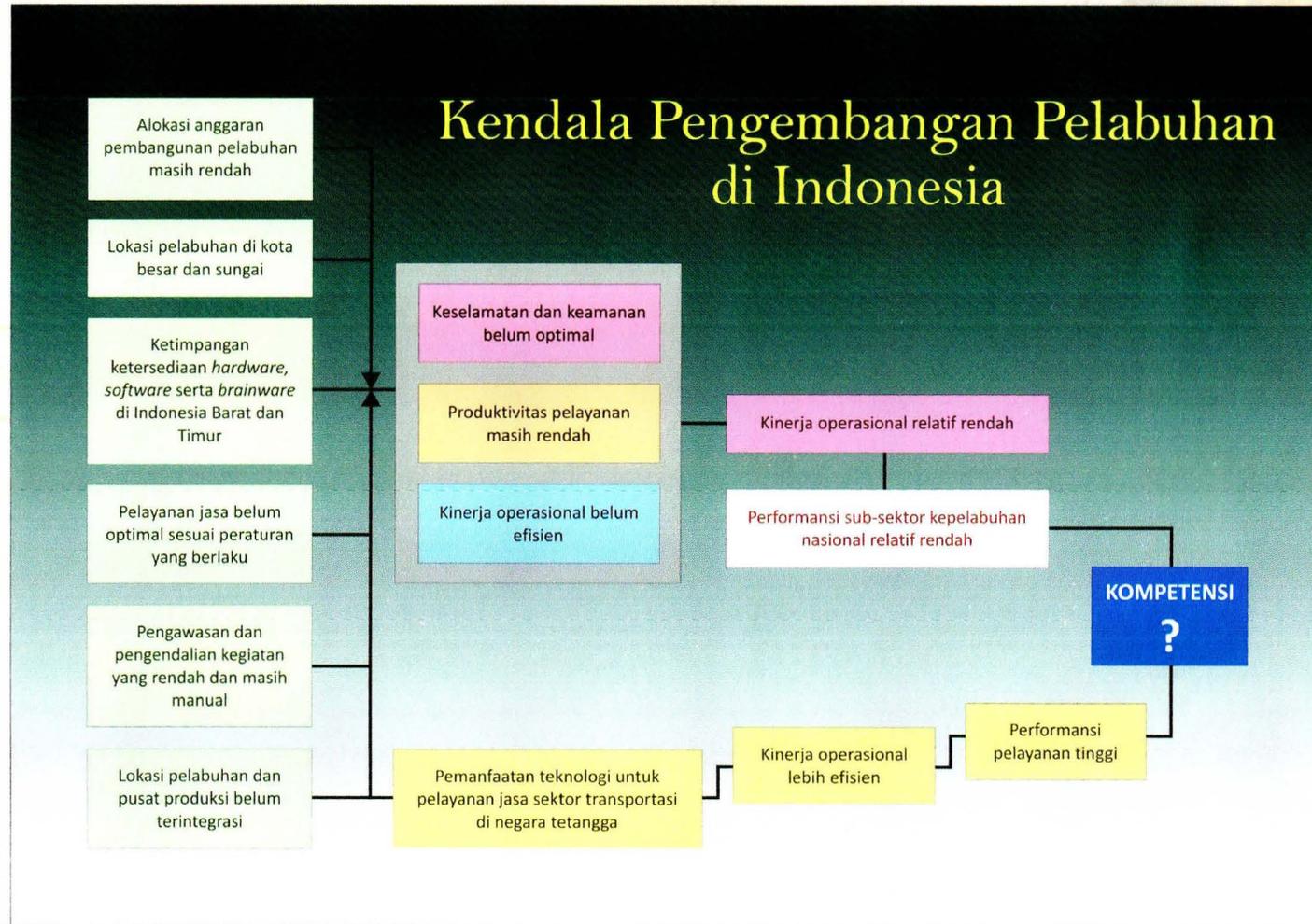
Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan

PERAN	FUNGSI	JENIS	HIERARKI
<p>Simpul dalam jaringan sesuai hierarki</p> <p>Pintu gerbang perekonomian</p> <p>Tempat kegiatan ALH Moda</p> <p>Penunjang kegiatan industri dan Perdagangan</p> <p>Tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan</p> <p>Mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara</p>	<p>Merupakan tempat kegiatan pemerintahan dan perusahaan</p>	<p>Pelabuhan Laut</p> <p>Pelabuhan Sungai dan Danau</p>	<p>Pelabuhan Utama (Hubungan internasional dan internasional)</p> <p>Pelabuhan Pengumpul (Nasional)</p> <p>Pelabuhan Pengumpan (Regional dan lokal)</p>
			

Gambar 7. Peran, Fungsi, Jenis dan Hierarki Pelabuhan

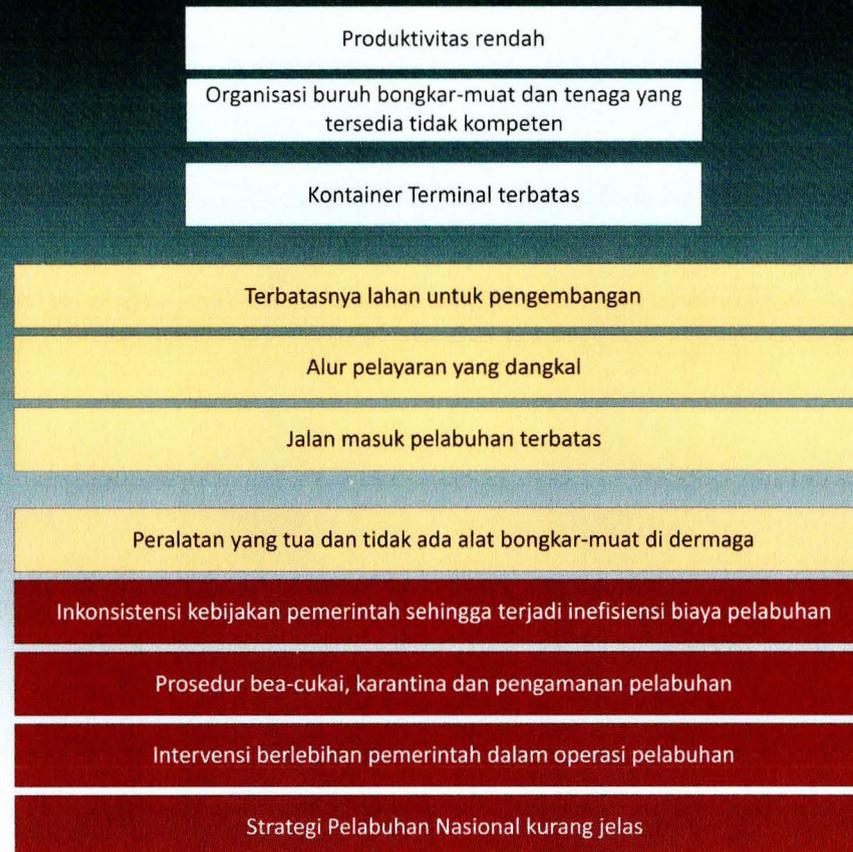
Masalah Serta Kendala Perkembangan dan Pengoperasian Pelabuhan di Indonesia

Banyak kendala dalam pengembangan pelabuhan di Indonesia, antara lain mulai dari alokasi anggaran, lokasi pelabuhan, pelayanan jasa sampai dengan pengoperasiannya, seperti pada Gambar 8 di bawah ini. Demikian pula masalah pelabuhan Indonesia seperti pada Gambar 9 selanjutnya.



Gambar 8. Kendala Pengembangan Pelabuhan Indonesia

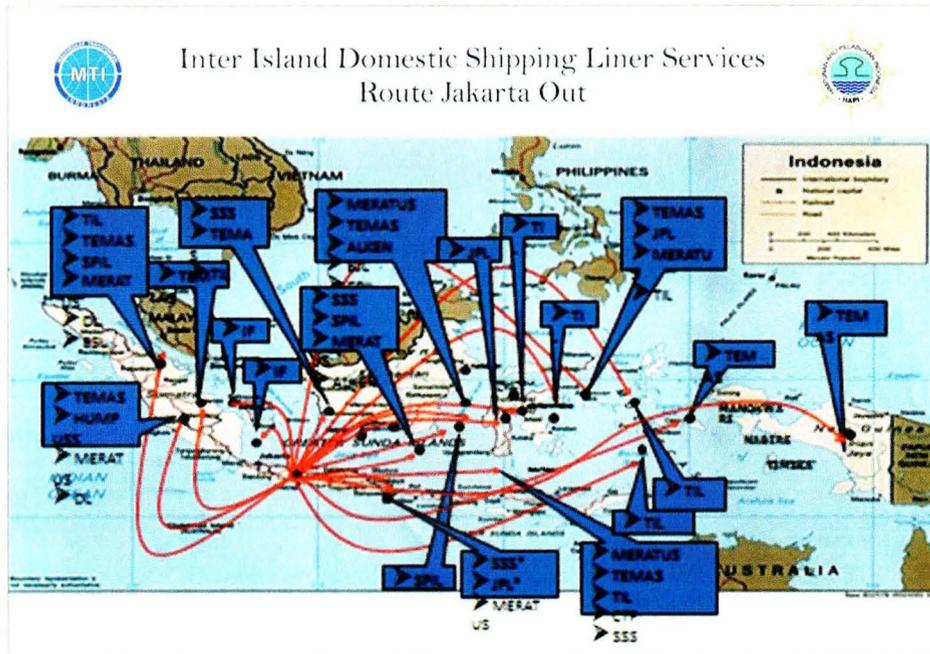
Masalah Pelabuhan di Indonesia



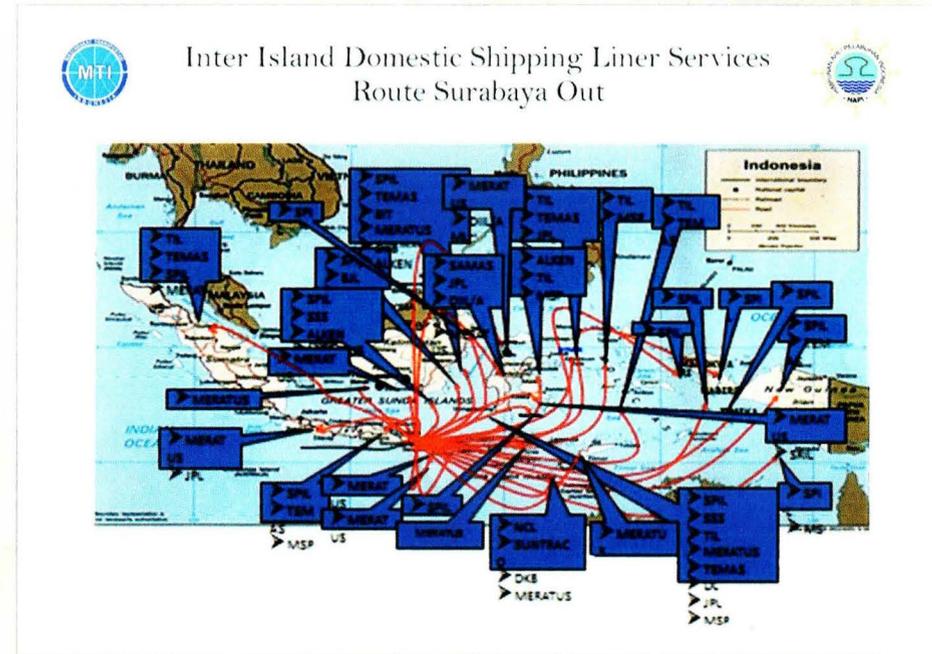
Gambar 9. Masalah Pelabuhan di Indonesia

Transportasi Laut di Indonesia

Transportasi barang di pelabuhan Indonesia masih didominasi dua pelabuhan utama yaitu Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak, Surabaya, seperti pada kedua gambar berikut. Hal ini disebabkan karena dominasi bisnis dan industri ada di dua lokasi tersebut. Untuk angkutan perintis terlihat pada gambar selanjutnya.



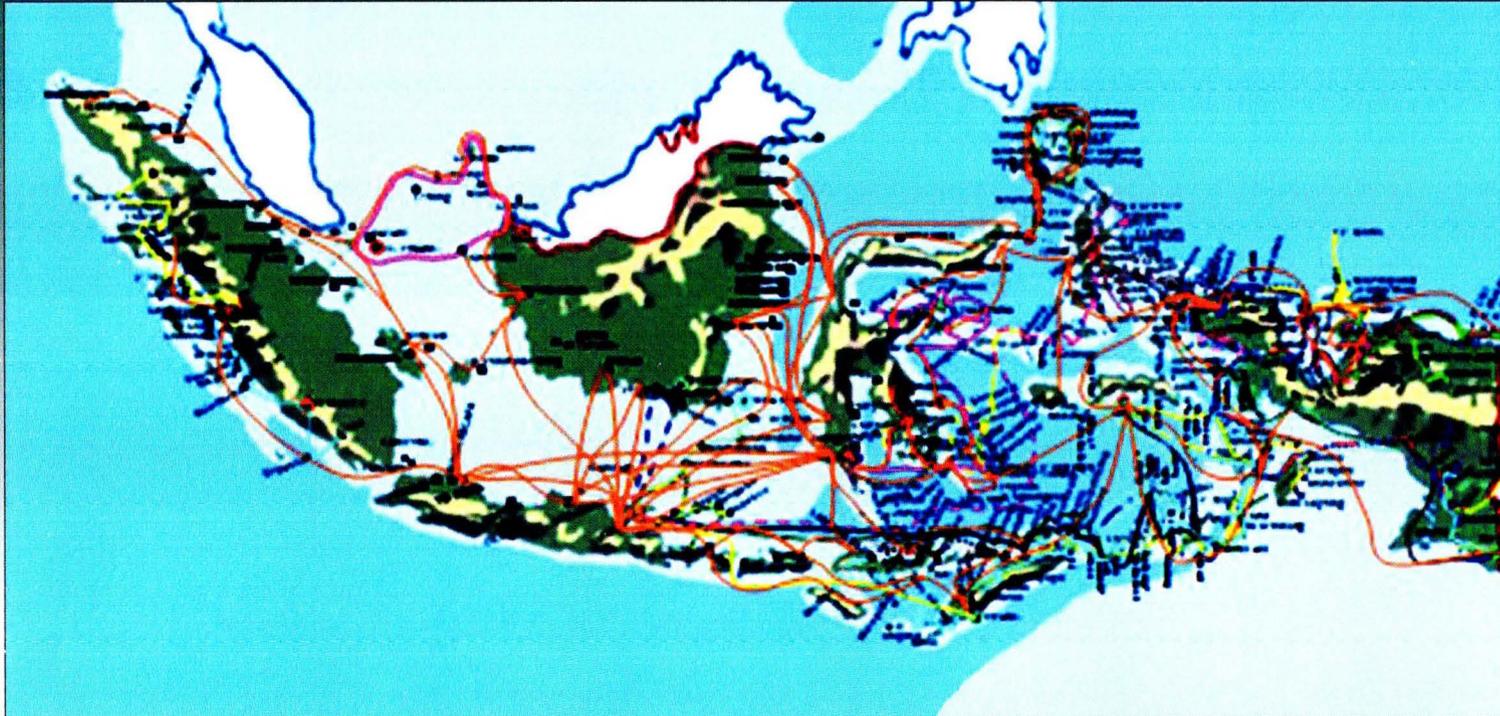
Gambar 10. Route Jakarta Out



Gambar 11. Route Surabaya Out

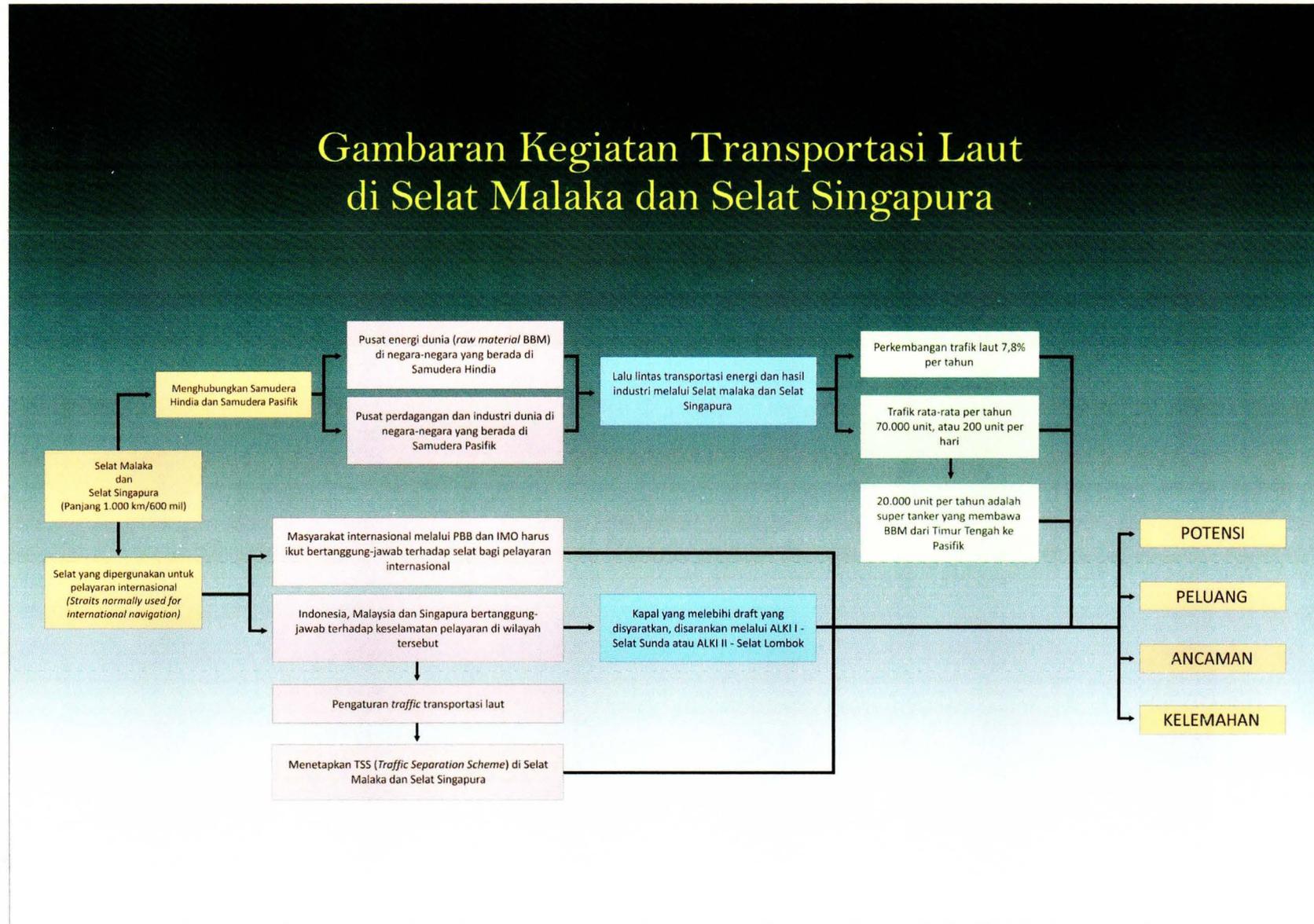
Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. AT. 55/26/11/DJPL-09
Tanggal 15 Desember 2009



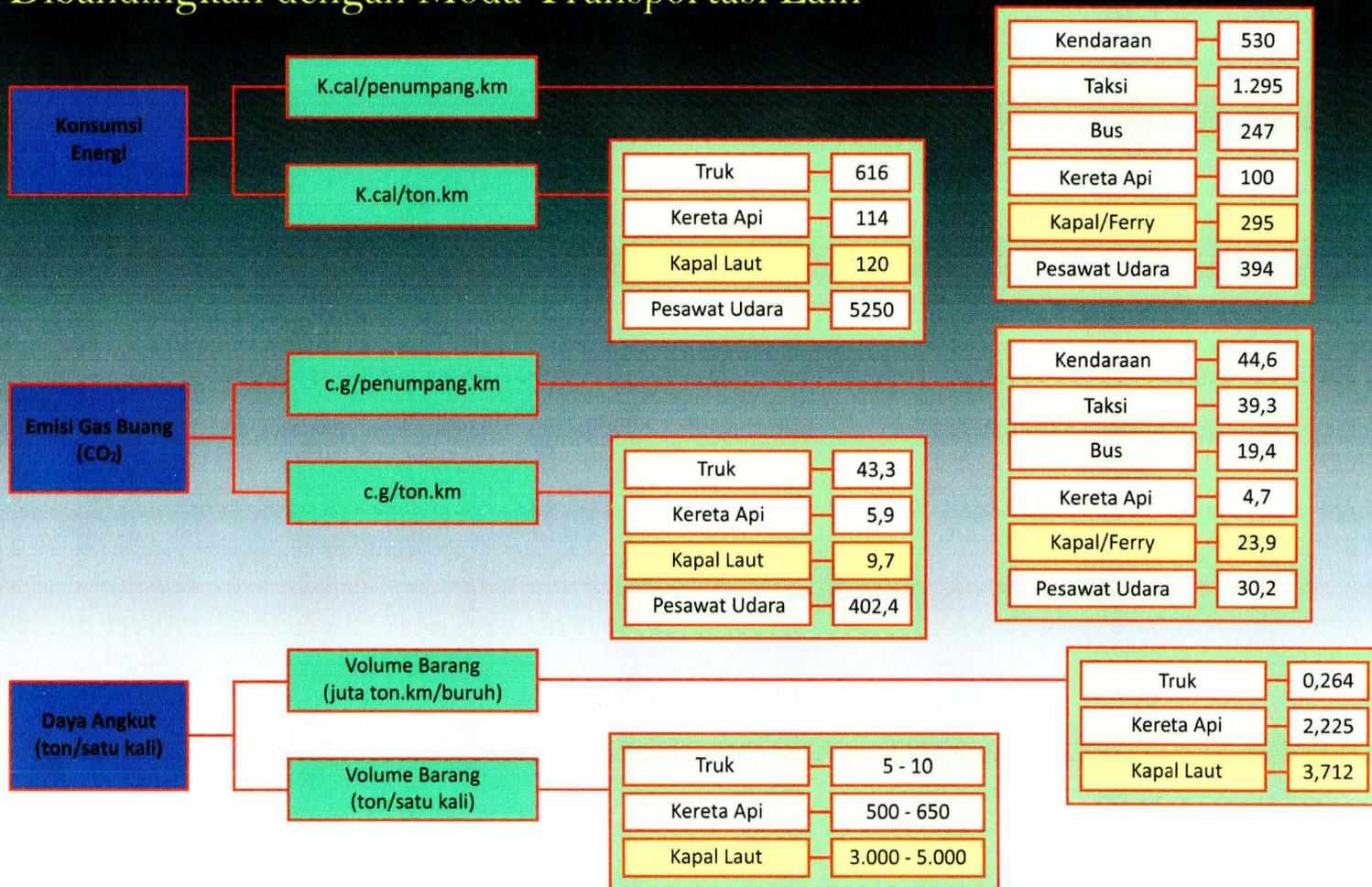
Gambar 12. Jaringan Trayek Angkutan Laut Perintis

Gambaran Kegiatan Transportasi Laut di Selat Malaka dan Selat Singapura



Gambar 13. Gambaran Kegiatan Transportasi Laut di Selat Malaka dan Selat Singapura

Karakteristik Moda Transportasi Laut Dibandingkan dengan Moda Transportasi Lain



Gambar 14. Karakteristik Moda Transportasi Laut Dibandingkan dengan Moda Transportasi Lain

Pada gambar-gambar di atas terlihat bahwa masih banyak masalah, antara lain dominasi asing dan kesulitan pengembangan armada kapal. Kesimpulan sementara adalah harus banyak tindakan drastis yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah bangsa Indonesia.

Kesimpulan, Saran dan Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

Hal mendasar yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah:

- Merubah *masterplan* koridor ekonomi dengan memasukan unsur laut.
- Membangkitkan berbagai sektor maritim yang mampu memberikan lapangan pekerjaan.
- Menciptakan *competitive advantage* atas dasar *comparative advantage* (sumberdaya maritim) yang dimiliki bangsa melalui penerapan iptek dan manajemen profesional.
- Meningkatkan armada kapal nasional dengan memberikan kemudahan investasi melalui kredit perbangkan dengan bunga pinjaman lunak.
- Mengembangkan *hub port* internasional
- Pemerataan pembangunan investasi dan infrastruktur dengan memperhatikan Indonesia bagian timur.

Hal mendasar yang harus dilakukan oleh operator Pelabuhan Indonesia adalah:

- Mengembangkan infrastruktur pelabuhan di Indonesia secara masif di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan, Batam, Banjarmasin, Balikpapan, Bitung, Sorong dll.
- Melakukan ekspansi bisnis dengan operator pelayaran utama seperti *Maersk Line*.
- Meningkatkan produktivitas bongkar muat dan menurunkan waktu kapal di pelabuhan dan menghilangkan segala hambatan di pelabuhan.
- Stop korupsi dan biaya tinggi di pelabuhan.
- Merubah sistem pengamanan dan keselamatan pelabuhan di satu tangan.

Menuju Pengembangan Indonesia ke Depan

- Penyedia layanan logistik di Indonesia harus bergerak menuju menawarkan solusi logistik khusus untuk industri tertentu seperti ritel, konstruksi, bagian pelayanan dan pertambangan dibandingkan dengan layanan logistik saat ini.
- Jaringan pusat industri harus dikembangkan di pinggiran Jakarta untuk peningkatan akses ke Pelabuhan Priok sebagai akibat menghasilkan waktu yang lebih lama, pengiriman terlambat dan rantai pasokan tidak efisien.
- Mengintegrasikan hubungan transportasi pelabuhan laut, bandara, terminal dan pusat distribusi dengan jaringan transportasi dan mengembangkan infrastruktur logistik untuk distribusi yang efisien.
- Memperkuat kemampuan sumber daya manusia dengan personil logistik profesional.

Penulis adalah Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia dan Sekretaris Transportasi Laut Forum Masyarakat Transportasi Indonesia



PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA BERBASIS MARITIM*

*Peranan Pendidikan dalam Pemanfaatan
Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Berkelanjutan*

Sahala Hutabarat

Tujuh puluh satu persen planet bumi diselubungi oleh air dan 29% adalah daratan. Apabila bumi kita dilihat dari pesawat ruang angkasa, maka akan tampak sebagai sebuah planet berwarna biru yang amat indah dipandang di antara planet lain di jagad raya ini. Hal ini disebabkan oleh adanya kandungan air yang lebih dominan dibandingkan dengan daratan.

Negara Indonesia yang kita cintai bersama juga diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa satu wilayah yang lebih dari 70% terdiri dari air dan terletak di sepanjang garis khatulistiwa. Akibatnya negara kita mempunyai potensi dan kekayaan laut yang sangat melimpah. Tetapi sayangnya pengetahuan tentang laut dan segala isinya di negara kita masih terbatas. Hal tersebut dapat diketahui dari belum adanya kurikulum yang mempelajari ilmu kelautan dan perikanan di tingkat pendidikan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas serta masih terbatasnya lembaga pendidikan tinggi yang mengkhususkan dalam mempelajari ilmu tersebut. Untuk itu dalam rangka memperingati Hari Nusantara XIII tahun 2012 di Mataram, Lombok, perlu dilakukan pentingnya sosialisasi **Pengembangan Sumberdaya Manusia Berbasis Maritim** atau dalam hal ini lebih di perjelas dengan pentingnya *Pendidikan dalam Rangka Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Berkelanjutan*.



* Makalah yang dipresentasikan dalam Seminar Hari Nusantara dengan tema "Pelebagaan Budaya Bahari" yang diselenggarakan di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 13 Desember 2012.

Manfaat Laut Bagi Kesejahteraan Manusia

Laut bermanfaat bagi manusia pada awalnya sebagai sumber pangan, media transportasi yang kemudian berkembang sebagai sumber mineral, bahan baku industri, bahan tambang, dan pertahanan keamanan yang sudah memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat ini laut mulai dimanfaatkan sebagai sumber air tawar, sumber energi (pasang surut, gelombang, OTEC), tempat pemukiman atau bahkan sebagai tempat limbah. Guna mendukung terlaksananya semua kegiatan atau aktifitas pemanfaatan laut dengan segala isinya, maka rahasia yang ada di dalamnya berupa kondisi wilayah dan sifat karakteristik sumberdaya alam ini haruslah diketahui terlebih dahulu.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan (*archipelagic state*), yang perairannya didominasi oleh perairan laut. dan guna memperdayakan luasnya wilayah ini secara optimal dan lestari, maka dibutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang handal, tanggap, bertanggungjawab dan terampil. Hal ini dapat dilaksanakan bilamana manusia atau masyarakat baik yang berkecimpung di lingkungan ini maupun yang menanganinya mempunyai suatu persepsi pandangan dan sikap hidup yang sama terhadap arti dan pentingnya lautan bagi pembangunan, kelangsungan hidup negara dan sebesar-besarnya dipersembahkan bagi kesejahteraan rakyat.

Di samping tersedianya SDM tersebut diatas juga dibutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta manajemen profesional yang memadai. Banyak contoh negara yang sukses dalam membangun perekonomiannya dengan mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di pesisir. Misalnya Islandia yang merupakan negara maju dan makmur karena sektor kelautan dan perikananannya, yang saat ini memiliki GNP/kapita mencapai US\$ 26 ribu/tahun. Hal ini bisa dilihat dari besarnya sumbangan sektor perikanan terhadap GDP yang mencapai 65%. Selain itu 70% ekspor barang dan jasa berasal dari sektor perikanan. Begitu pula Norwegia, yang saat ini memiliki GNP/kapita sebesar US\$ 30 ribu/tahun, ternyata memiliki kinerja sektor kelautan dan perikanan yang baik. Saat ini sumbangan sektor perikanan terhadap GDP mencapai 25% dan ekspor ikan salmon mencapai US\$ 2 milyar/tahun.

Sementara itu di Asia, Thailand dengan panjang garis pantai 2600 km dan luas tambak 80 ribu hektar mampu memproduksi udang sebanyak 340 ribu ton dan memiliki nilai ekspor perikanan sebesar US\$ 4,2 milyar pada tahun 2000. Sedangkan Indonesia, dengan garis pantai yang lebih panjang dan potensi areal tambak yang lebih besar saat ini sedang berusaha untuk mengoptimalkan luas lahannya. Filipina yang memiliki 7.200 pulau sudah mampu mengekspor rumput laut sebesar US\$ 700 juta, sementara Indonesia hanya mampu memperoleh devisa dari sektor ini US\$ 45 juta, padahal 60% *raw material* rumput laut Filipina tersebut berasal atau diimpor dari Indonesia. Begitu pula dengan sektor kelautan dan perikanan Tiongkok, nilai produksi perikananannya mencapai US\$ 34 milyar.

Dengan melihat kinerja sektor kelautan dan perikanan di beberapa negara tersebut, sudah seharusnya muncul sikap optimis tentang peran sektor ini dalam pembangunan ekonomi nasional di masa kini dan akan datang. Melalui pemberdayaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dan didukung oleh SDM yang berkualitas diharapkan akan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan perekonomian nasional.

Arti Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

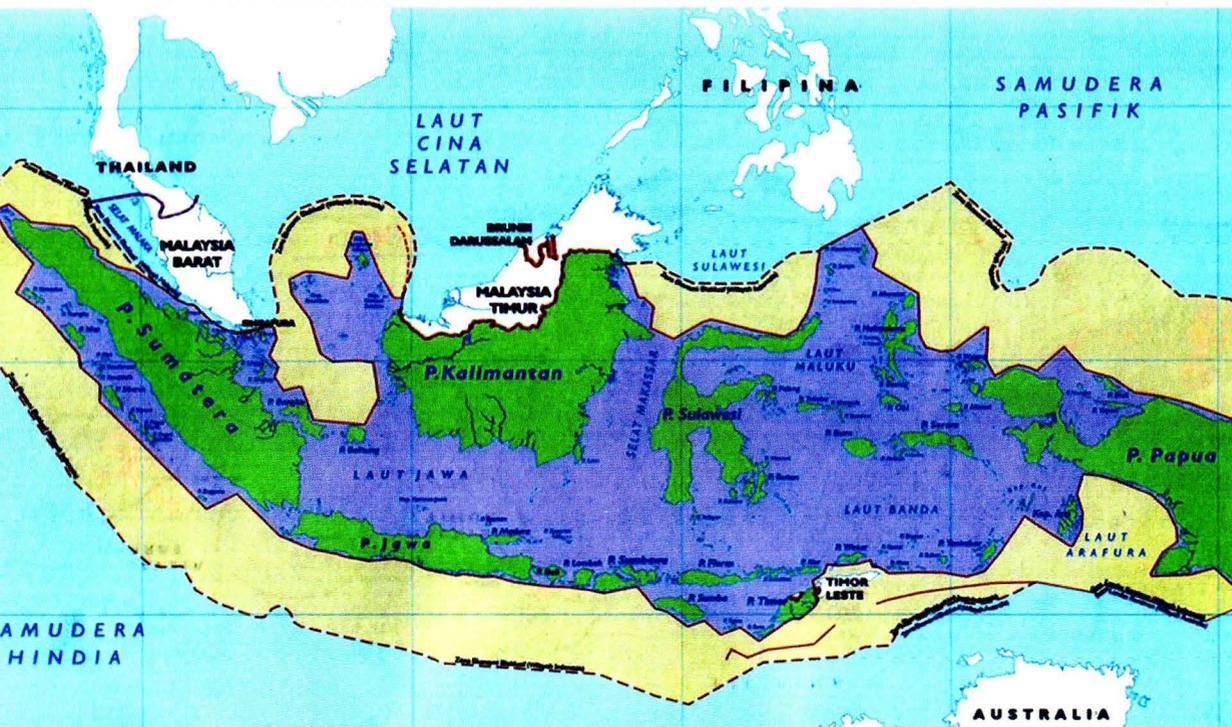
Untuk memberikan pengertian yang sama, maka diperlukan batasan pengertian tentang arti dari Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan merupakan suatu usaha guna meningkatkan pemberdayaan sumberdaya alam laut baik yang bersifat hayati maupun non-hayati secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya. Pemberdayaan yang dimaksud disini adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh sumberdaya alam laut secara ekonomi akan menguntungkan baik bagi pelaku maupun pemangku proses produksi. Pelaku produksi dapat bersifat perorangan maupun pemerintah, pemangku produksi dapat pula bersifat perorangan maupun perusahaan. Dengan demikian dari kedua unsur produksi akan terjadi peningkatan pendapatan yang juga memberikan dampak bagi peningkatan perolehan devisa bagi negara yang akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat luas. Dan yang terpenting dengan meningkatnya hasil produksi serta pendapatan akan meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam laut tersebut. Apabila hal tersebut terus dilakukan tanpa memperhitungkan dampaknya, maka kelestarian dari sumberdaya alam ini akan menurun dan akhirnya hancur total. Padahal yang diinginkan dari pemberdayaan potensi laut adalah memanfaatkan secara optimal tetapi tetap menjaga daya dukung serta kelestarian sumberdaya alam ini. Dengan demikian pemanfaatan sumberdaya alam ini tetap menguntungkan secara ekonomi untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Hal tersebut dapat dilaksanakan sepanjang masyarakat pelaku dari kegiatan ini mempunyai suatu visi dan misi yang sama. Ini dapat dicapai melalui pendidikan yang disesuaikan dengan latar belakang masing-masing.

Melalui pendidikan dan pembekalan pendidikan diharapkan masyarakat dapat meningkatkan sikap kepedulian dan wawasan pengetahuan tentang sumberdaya alam lautan kepada manusia atau kelompok masyarakat yang diharapkan nantinya mereka akan dapat lebih mengenal, memahami, menyadari, menghayati dan akhirnya mencintai kekayaan lautan Indonesia milik kita bersama berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan yang utuh. Kekayaan yang berasal dari lautan tersebut merupakan modal yang sangat potensial dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional dimasa datang, mengingat sumberdaya alam yang berasal dari daratan makin menipis. Hal tersebut tentunya dapat tercapai bilamana didukung oleh masyarakat yang mempunyai pandangan yang sama tentang pentingnya arti sumberdaya kelautan ini. Dengan demikian diharapkan, kita semua dapat lebih meningkatkan pemberdayaan potensi kelautan melalui

pengembangan dan pengelolaan sumberdaya alam laut guna membantu bidang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dimana hal ini dapat diperoleh dengan memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat melalui suatu pendidikan baik yang bersifat formal ataupun non-formal.

Potensi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia 2/3 dari wilayahnya didominasi oleh perairan laut. Dimana secara lengkap meliputi luas laut sebesar 5,8 juta km² yang terdiri dari laut teritorial (0,8 juta km²), laut Nusantara (2,3 juta km²) dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (2,7 juta km²). Dengan jumlah pulau sekitar 17.499 dan garis pantai sepanjang 95.181 km tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar tetapi juga menyimpan kekayaan sumberdaya laut, baik secara kuantitas maupun diversitas.



Sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik jenis maupun potensinya. Pada dasarnya sumberdaya pesisir dan laut terbagi atas empat kelompok yaitu: Sumberdaya dapat pulih (*renewable resources*) yang terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (*mariculture*) serta industri bioteknologi. Sumberdaya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*) yang meliputi mineral, bahan tambang/galian, pasir laut, minyak bumi dan gas. Energi kelautan yang terdiri dari OTEC, pasang surut, gelombang, dan sebagainya. Jasa-jasa lingkungan kelautan (*environmental services*) yang meliputi pariwisata dan perhubungan laut seperti pariwisata bahari, industri maritim, industri bioteknologi kelautan, jasa kelautan dan pulau-pulau kecil

Sektor Perikanan

Dengan luas laut 5,8 juta km², Indonesia sesungguhnya memiliki potensi sumberdaya perikanan laut yang cukup besar baik dari kuantitas maupun keragamannya. Namun ketersediaan atau cadangan ikan secara alami di perairan merupakan salah satu faktor pembatas dalam peningkatan produktivitas usaha dalam usaha penangkapan.

Berdasarkan penyebaran daerah penangkapan ikan, potensi produksi perikanan tangkap di perairan laut Indonesia dibagi berdasarkan 11 wilayah pengelolaan perikanan. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh data tentang potensi lestari (*Maximum Sustainable Yield, MSY*) sumberdaya ikan laut Indonesia yang diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Potensi tersebut terdiri dari ikan pelagis besar sebesar 1,65 juta ton, ikan pelagis kecil sebesar 3,6 juta ton, ikan demersal sebesar 1,36 juta ton, ikan karang sebesar 145 ribu ton, udang paneid sebesar 94,8 ribu ton, lobster sebesar 4,8 ribu ton dan cumi-cumi sebesar 28,25 ribu ton. Sedangkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80 persen dari potensi lestari atau sekitar 5,12 juta ton per tahun.

Untuk kegiatan budidaya tambak baru mencapai produksi sebesar 430.017 ton atau sekitar 24 persen dari potensi lahan yang tersedia (apabila setiap hektar lahan menghasilkan produksi 2 ton) dengan nilai produksi sebesar Rp 21,5 triliun (Statistik Perikanan Budidaya, 2009).

Industri Bioteknologi Kelautan

Secara garis besar industri bioteknologi kelautan yang dapat dikembangkan dengan memanfaatkan keragaman hayati perairan adalah: produksi bahan alami dari laut, pengendalian pencemaran di wilayah pesisir dan lautan, pengendalian "*biofouling*", perbaikan sistem akuakultur. Organisme laut yang meliputi mikroba dan *phytoplankton*, *blue-green algae (cyanobacteria)*, *green algae*, *brown algae*, *red algae*, *sponges*, *coelenterates*, *bryozoans*, *mollusks*, *tunicates*, *echinoderm* merupakan sumber bahan aktif dan bahan kimia yang sangat potensial.



Dari biota laut tersebut dapat dihasilkan berbagai bahan alami yang bermanfaat antara lain untuk industri farmasi (seperti anti tumor, anti kanker, antibiotik, antiinflamatory), bidang pertanian (fungisida, pestisida, *growth Stimulator*), industri kosmetik dan makanan (seperti zat pewarna alami, biopolosakarida). Selanjutnya dari biota laut juga dapat dihasilkan protein serta bahan diet sebagai sumber makanan sehat (asam lemak tak jenuh omega-3), vitamin, asam amino, dan berbagai jenis gula rendah kalori.

Besarnya potensi ekonomi produk-produk hasil perikanan laut dengan nilai tambah hingga ini dapat dilihat dari keberhasilan yang diraih Amerika Serikat, yang potensi keanekaragaman hayatinya jauh lebih rendah dibandingkan Indonesia. Pada tahun 1994, Amerika Serikat berhasil meraih devisa senilai US\$ 4 miliar dari industri bioteknologinya, termasuk produk-produk makanan sehat (*healthy food*). Padahal, bahan dasarnya banyak yang bersal dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pariwisata Bahari

Beberapa kawasan konservasi perairan memiliki keanekaragaman tinggi dan spesifik sehingga dapat dijadikan sebagai tujuan wisata bahari; memiliki jumlah objek wisata terbesar di dunia; Objek wisata bahari memiliki keunggulan komparatif (bentuk kepulauan, keanekaragaman hayati, keindahan alam, budaya dan kesenian rakyat, biaya hidup rendah). Potensi wisata bahari senilai US\$ 2, milyar/tahun (Sumber: Depbudpar,2008).

Pertambangan dan Energi

Menurut data geologi, diketahui bahwa Indonesia memiliki 60 cekungan potensi yang mengandung minyak dan gas bumi. Dari 60 cekungan tersebut, 40 cekungan terdapat dilepas pantai, 14 cekungan berada di daerah transisi daratan dan lautan (pesisir) dan hanya 6 cekungan berada di daratan. Sementara itu berdasarkan hasil inventarisasi riset eksplorasi sumberdaya mineral dan migas di kawasan pesisir dan perairan Indonesia pada tahun 2000, menggambarkan bahwa pemanfaatnya baru 14 cekungan yang telah berproduksi, 9 cekungan telah diteliti secara intensif, sudah dibor dengan penemuan, 15 cekungan sudah dibor tanpa penemuan, sedangkan 22 cekungan belum dieksplorasi. Dan dari 60 cekungan tersebut diperkirakan dapat menghasilkan 84,48 miliar barel cadangan dan 4,6 miliar barel berupa kekayaan yang belum dimanfaatkan.

Pasir Laut

Meskipun produktifitas ekosistem pantai pasir tidak begitu tinggi, namun keberadaannya sangat vital bagi berbagai jenis fauna laut. Berbagai *crustacea* membutuhkan ekosistem pantai pesisir sebagai tempat bertelur dan menetas. Berbagai reptilia seperti penyu juga memerlukan pantai pasir untuk meletakkan telurnya. Dengan demikian ekosistem pantai pasir merupakan komponen vital bagi siklus hidup berbagai fauna laut. Hal tersebut menjadi landasan untuk mengendalikan kegiatan penambangan pasir laut, agar kegiatan yang telah berjalan tidak merusak lingkungan.

Transportasi Laut

Pembangunan transportasi laut merupakan perwujudan dari konsep Wawasan Nusāntara yang diarahkan untuk menunjang usaha penyatuan wilayah kelautan Indonesia yang luas. Tujuan pembangunan transportasi laut termasuk angkutan laut bagi bangsa Indonesia adalah untuk mewujudkan angkutan laut sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta sebagai penyedia lapangan kerja dan penghasil devisa negara.

Berdasarkan data yang ada, hampir 80% lebih proses perpindahan barang dan jasa antar pulau menggunakan jasa perhubungan laut. Sektor kegiatan ini mempengaruhi dalam mempercepat pergerakan ekonomi ke suatu wilayah, oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan dan pembinaan dalam penyelenggaraan perhubungan laut secara teratur dan periodik untuk mendukung terselenggaranya perhubungan laut yang professional dalam melayani jasa transportasi laut. Menurut Kamaluddin (2002), secara kuantitatif belum ada penelitian yang mendalam soal kontribusi transportasi laut dalam pendapatan devisa negara. Namun dapat dibayangkan bagaimana kejadiannya apabila jasa transportasi laut tidak berjalan atau terhenti, berapa banyak kerugian materiil maupun imateriil yang akan diderita baik oleh perorangan, swasta, pengusaha, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun lembaga pemerintah.

Industri Maritim

Industri maritim merupakan salah satu industri strategis yang sangat potensial dalam menjawab tantangan-tantangan masa depan dan memberi nilai tambah yang cukup tinggi untuk produk-produk transportasi yang dapat menghasilkan tambahan devisa ekspor. Dalam masa 10 tahun terakhir, ratusan kapal telah dibangun oleh galangan kapal nasional yang meliputi kapal niaga, kapal untuk tujuan ter-

tentu, kapal ikan dan kapal perang. Aktivitas galangan kapal untuk pasar domestik, seperti kapal barang, kapal tanker, penumpang, patroli dan kapal penangkap ikan. Industri perkapalan dan komponennya.

Bangunan Kelautan

Bangunan pelabuhan merupakan salah satu unsur yang terdapat pada sektor bangunan kelautan. Bangunan pelabuhan ini merupakan sarana penunjang yang telah memberikan kontribusi secara nyata dalam pendapatan devisa negara. Sektor bangunan kelautan meliputi bangunan pelabuhan, dermaga, gudang, hotel, restoran dan bangunan lainnya yang ada di wilayah pesisir dan lautan. Pelabuhan negara dikelola oleh suatu BUMN yang bergerak di bidang perhubungan laut. BUMN yang memiliki kerja di pelabuhan terdiri dari PT. Pelindo I, PT. Pelindo II, PT. Pelindo III, dan PT. Pelindo IV. Perolehan pendapatan negara secara langsung berasal dari jasa bongkar muat petikemas yang bersandar di pelabuhan dan pendapatan tak langsung diperoleh dari pelayanan ekspor yang diberikan di unit pelabuhan dalam mempermudah dan mempercepat kegiatan tersebut.

Pulau-Pulau Kecil

Pemberdayaan pulau – pulau kecil untuk kepentingan ekonomi seperti *marine culture*, *eco-tourism* dan konservasi adalah sangat penting. Kawasan pulau – pulau kecil menyediakan sumberdaya alam yang produktif baik sebagai sumber pangan dari kekayaan ekosistemnya ekosistem mangrove, ekosistem lamun dan terumbu karang beserta biota yang hidup di dalamnya, media komunikasi, kawasan rekreasi, pariwisata, konservasi dan jenis pemanfaatan lainnya. Oleh karena itu kawasan pulau-pulau kecil menjadi tumpuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Sebagai contoh, hampir semua pulau-pulau kecil di Indonesia sangat berasosiasi dengan terumbu karang sementara habitat ini merupakan tempat bergantung komoditas perikanan ekonomis penting seperti kerapu, napoleon, tridacna dan lain-lain. Indonesia merupakan pemasok ikan hidup terbesar ke Hongkong dan komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas spesifik pulau-pulau kecil. Seiring dengan terwujudnya otonomi daerah, maka kebijakan kelautan dan perikanan akan lebih dipusatkan perannya pada perluasan akses daerah dalam mencari sumber pembiayaan atau investor untuk mengembangkan pulau-pulau tersebut. Pengembangan pulau-pulau kecil juga harus dipayungi dengan peraturan-peraturan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum, sehingga menciptakan iklim usaha yang dapat memberikan rasa ketenangan dan kenyamanan bagi para investor dalam mengembangkan usahanya. Kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa potensi laut tersebut layak untuk ditingkatkan pemberdayaannya. Kemudian sejauh mana sumberdaya tersebut telah dikembangkan?

Tantangan dan Kendala dalam Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Dalam rangka pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia secara berkelanjutan, kita membutuhkan berbagai prasyarat, lebih-lebih pada saat ini kita dihadapkan pada kondisi krisis dan lingkungan strategis baru berupa globalisasi dan otonomi daerah. Kondisi tersebut merupakan realitas obyektif yang sulit terelakkan. Tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia kecuali meningkatkan daya saing bangsa dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) yang didukung SDM yang unggul, manajemen profesional, dan IPTEK.

Lautan akan menjadi begitu penting artinya bagi pembangunan nasional suatu negara kepulauan, seperti Indonesia. Pembangunan ini mencakup di bidang ekonomi, teknologi atas dan bawah air, perhubungan, perikanan/bahan pangan, lingkungan disamping bidang hankam, sosial budaya, dan hubungan politik dengan dunia luar. Guna menghadapi tantangan tersebut dan dalam menghadapi era globalisasi persaingan bebas (AFTA dan APEC), khususnya di bidang kelautan dan perikanan sudah selayaknya dipersiapkan seawal mungkin SDM Indonesia yang handal dan terampil melalui pendidikan dan pendalaman penelitian di bidang tersebut.

SDM di bidang kelautan khususnya di sektor-sektor tersebut di atas secara umum masih lemah, dipandang dari segi latar belakang pendidikan dan pengetahuan sehingga akan sangat sulit untuk dapat mengenal, memahami, apalagi menyadari amat berpotensi sektor ini. Di masa mendatang hal tersebut harus segera ditanggulangi dengan cara memberikan pendidikan yang memadai kepada lapisan masyarakat sesuai dengan jenjang pendidikan dan latar belakang yang dimiliki. Dengan demikian diharapkan mereka akan mempunyai persepsi yang sama tentang pentingnya arti kelautan bagi bangsa Indonesia dimasa mendatang dan akhirnya diharapkan semua lapisan masyarakat Indonesia secara utuh menyadari dan mencintai akan kelautan yang kita miliki untuk dimanfaatkan dan dipelihara bersama-sama guna kesejahteraan masyarakat dalam mencapai cita-cita menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila seperti yang tertuang didalam UUD' 45 pasal 33.

Peranan SDM dan IPTEK dalam Menunjang Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan

Pengembangan dan penyiapan SDM kiranya merupakan awal dan prasyarat untuk mengembangkan IPTEK dan aplikasinya dalam pembangunan nasional. Tanpa pola pemikiran seperti ini maka segala macam kesenjangan, hambatan dan kesemrawutan akan banyak dihadapi dalam proses pembangunan. Pembinaan dan pengembangan SDM untuk pembangunan nasional ini perlu diarahkan pada komponen-komponen program dan kelembagaan yang diperlukan, sehingga *"Link and Match"* dapat terjamin. Dengan demikian strategi

penyiapan SDM perlu dirancang bertolak dari tujuan pembangunan, yang akan memerlukan pelaku-pelaku pembangunan dengan jenis dan strata yang spesifik.

Ada beberapa bangsa yang miskin sumberdaya alam, tapi memiliki daya saing yang kuat dan relatif survive dalam menghadapi globalisasi. Jepang, Korea Selatan dan Singapura misalnya, adalah negara-negara maju namun SDA yang dimilikinya sangat terbatas. Menyadari keterbatasannya itu, negara-negara tersebut bertumpu pada kekuatan SDM. Kita masih ingat ketika Jepang kalah dalam PD II dan semua infrastruktur negara tersebut hancur karena dijatuhi bom atom. Namun berkat kerja keras rakyat dan keunggulan SDM-nya, Jepang mampu bangkit menjadi sebuah kekuatan ekonomi dan teknologi. Begitu pula halnya dengan Korea Selatan. Menyadari keterbatasan SDA-nya, negara tersebut terus berusaha menyadarkan rakyatnya bahwa SDM yang berkualitas adalah basis bagi proses pembangunan ekonomi. Di beberapa perusahaan Korea, terpampang motto kerja yang sangat menggugah: *"resources is limited, but creativity is unlimited"*.

Bagi Indonesia yang memiliki SDA melimpah, kekuatan SDM dan IPTEK menjadi sangat penting untuk memperkuat keunggulan komparatif bangsa yang ada. SDM merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumberdaya alam hanyalah faktor produksi yang pada dasarnya bersifat pasif. Manusia yang didukung dengan IPTEK, merupakan agen-agen aktif yang akan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumberdaya-sumberdaya alam guna melaksanakan pembangunan nasional. SDM yang unggul dan IPTEK yang maju merupakan dua kekuatan yang akan menjadi kekuatan bangsa dalam dinamika kompetisi di era globalisasi ini.

Pendidikan merupakan suatu investasi modal dalam pembangunan sumberdaya manusia, pengembangan SDM tidak terlepas dari karakter dan budaya bangsa dan dalam jangka panjang karakter dan budaya bangsa ini akan ditentukan oleh kualitas SDM - nya. Strategi pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas pendidikan disertai dengan adanya partisipasi masyarakat secara luas akan dapat membantu meningkatkan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang mengarah pada keberlanjutan.

Pada tatanan teknis implementasi pengembangan sumberdaya manusia diarahkan sesuai dengan strategi pengembangan wilayah. Melalui pendekatan formal ataupun non formal sumberdaya masyarakat pesisir yang sebagian besar berlatar belakang kultur bahari secara bertahap diarahkan untuk mengenal beberapa alternatif aktivitas sosial ekonomi yang baru dan lebih produktif, tanpa meninggalkan kekayaan budaya yang ada (*social wisdom*) dengan memberikan pengenalan, pelatihan dan penyuluhan di berbagai peluang usaha. Dengan perkataan lain kemampuan SDM dipersiapkan dalam rangka pengembangan usaha yang di dasarkan atas pengetahuan yang ada pada tataran masyarakat atau dikenal dengan istilah *knowledge-based economy*.

Salah satu dari program pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP) untuk mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan adalah dengan program kemitraan bahari (*Sea Grant*), yaitu mengoptimalkan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui regional-regional yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi yang mempunyai program aksi kelautan dan perikanan. Prioritas dari program ini antara lain untuk mengembangkan pulau-pulau kecil melalui berbagai bentuk investasi; peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir, serta konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan. Hal ini diupayakan untuk dapat mendorong akselerasi pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mengatasi kelemahan kapasitas kelembagaan kelautan di daerah. Misalnya dengan menerapkan IPTEK agar masyarakat yang berada di pesisir atau pulau-pulau kecil dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan.

Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan. Faktor keberhasilan lain dalam pembangunan di bidang kelautan dan perikanan ke masa depan adalah kemampuan menguasai IPTEK. IPTEK merupakan basis dalam upaya meningkatkan produksi, pengembangan mutu produk, serta efisiensi produksi. Peran strategis IPTEK tersebut menuntut para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan untuk menguasai dan menerapkannya baik pada tahap produksi, pengolahan maupun pemasaran. Hal ini mengingat salah satu masalah di bidang kelautan khususnya pada sektor perikanan adalah terbatasnya penguasaan teknologi modern oleh para pelaku usaha baik pada rantai hulu maupun pada rantai hilir. Selama ini teknologi yang diterapkan oleh pelaku usaha di sektor perikanan (nelayan/petani ikan) adalah teknologi yang diperoleh secara turun menurun baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya. Keterbatasan penguasaan teknologi ini harus diatasi melalui inovasi teknologi serta diseminasi secara tepat.

Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dan dunia swasta dalam mengembangkan kegiatan ekonomi sektor prioritas dalam bidang pesisir dan kelautan. Tentu kerjasama tersebut lebih terfokus pada upaya peningkatan kualitas teknologi. Disinilah pemerintah bersama lembaga riset berperan dalam menciptakan teknologi baru serta menyiapkan kelembagaan pendidikan yang kondusif bagi peningkatan penguasaan IPTEK (baik yang bersifat formal maupun non formal) sehingga akan muncul SDM di bidang kelautan yang berkualitas dan siap diterima pasar. Dan, dunia swasta dapat mendayagunakan potensi SDM tersebut untuk kepentingan kelangsungan usaha dan jelas bahwa maraknya usaha perekonomian akan mendorong tumbuhnya ekonomi nasional.

Pengembangan IPTEK dan manajemen profesional harus dilakukan pada setiap rantai usaha dan di setiap sektor prioritas bidang kelautan dan perikanan, sehingga segenap produk dan jasa kelautan dan perikanan Indonesia menghasilkan nilai tambah dan berdaya saing tinggi. Pengembangan dan penerapan IPTEK serta manajemen profesional ini harus ditunjang oleh ketersediaan SDM yang memadai. Oleh karena itu, sistem pendidikan, penelitian, pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan juga harus direvitalisasi dan disesuaikan dengan tuntutan pembangunan serta perkembangan jaman.

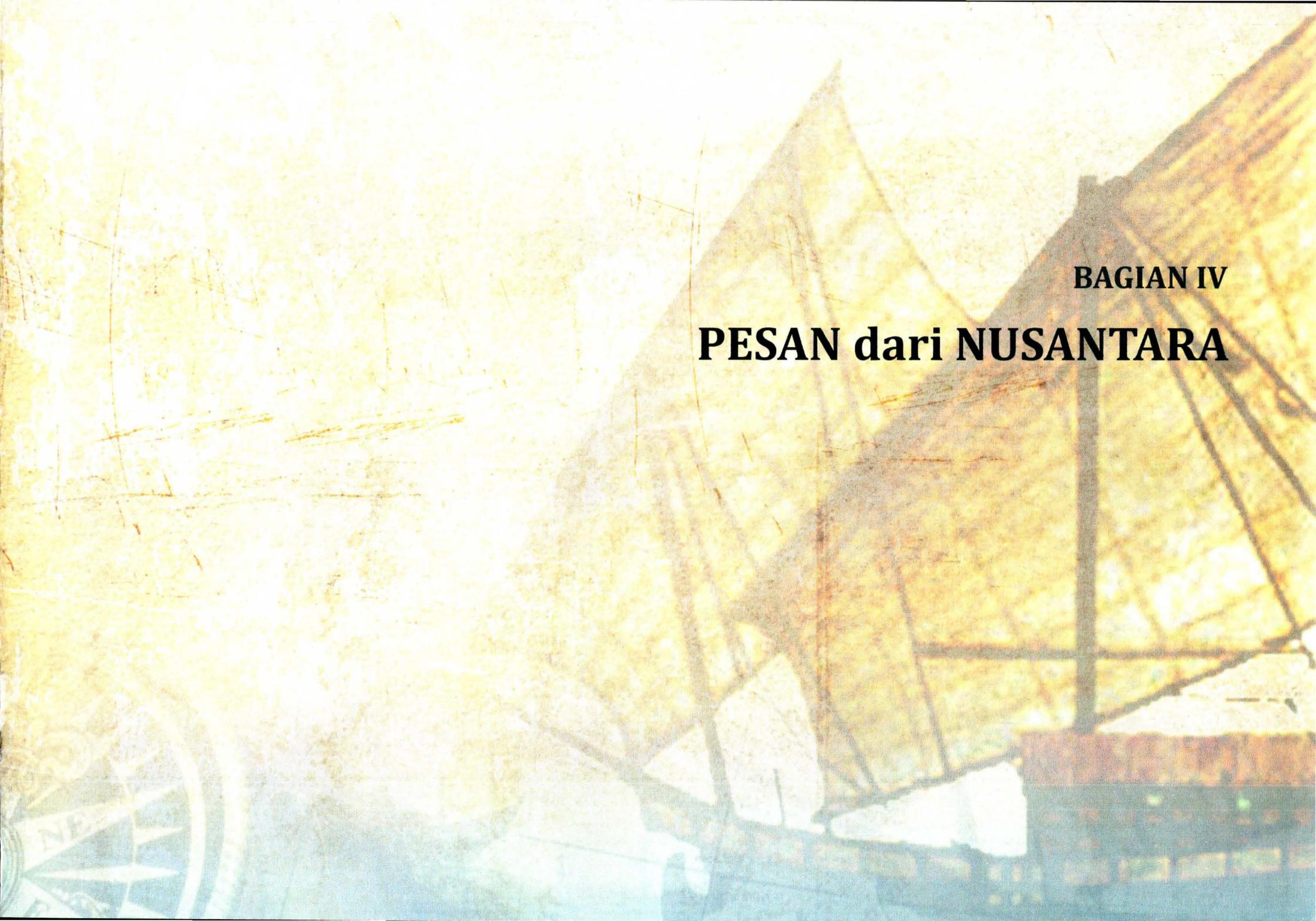
Dalam konteks pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan, sebagai salah satu tujuan dari pembangunan nasional, maka ada dua prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh IPTEK kelautan dan perikanan. *Pertama*, jenis IPTEK apapun yang hendak dikembangkan, hendaklah harus IPTEK yang berwawasan lingkungan. Persyaratan ini penting sehubungan dengan era globalisasi dan perdagangan bebas (AFTA, APEC, dan WTO), dimana setiap jenis produk kelautan yang dihasilkan harus memiliki daya saing yang tinggi baik pada pasar dalam negeri maupun pasar dunia. *Kedua*, adalah masyarakat kelautan dan perikanan sebagai pengguna IPTEK hendaknya diberikan keleluasaan akses untuk memanfaatkan/menggunakan IPTEK tersebut.

Penutup

Guna tercapainya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, maka diperlukan suatu usaha pemberian pengertian dan pengetahuan kelautan kepada seluruh masyarakat melalui suatu pendidikan. Baik melalui pendidikan formal, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (D1, D2, D3, S1) dan pendidikan non-formal (latihan, kursus, simulasi dan lainnya). Program pendidikan ini melalui proses psikologis manusia yakni *kognitif*, *afektif* dan *psikomotorik*. *Kognitif* berkenaan dengan proses pengetahuan dan pengertian, *afektif* berkenaan dengan nilai dan sikap serta *psikomotorik* berkenaan dengan gerakan atau aktifitas fisik.

Dalam rangka mendukung tercapainya prasyarat tersebut, maka KKP telah mengupayakan tiga program yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi dan *stakeholder* terkait lainnya. Tiga program tersebut adalah (i) Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan pendayagunaan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan, (ii) *Marine and Coastal Resources Management Project* (MCRMP), yang akan membantu daerah dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data sumberdaya kelautan di wilayah pesisir secara terpadu dan guna menjembatani keberadaan UU sektor yang telah ada dan berjalan selama ini dengan perencanaan pembangunan pesisir dan laut daerah serta (iii) melakukan terobosan dengan memberikan fasilitas pendidikan kepada masyarakat pesisir melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan setempat.

***Penulis adalah Guru Besar Oseanografi, Universitas Diponegoro,
dan Dewan Pembina Institut Maritim***



BAGIAN IV

PESAN dari NUSANTARA



nelayan lamalera berburu pari
lemafa penombak satu mata
bangsa indonesia bangsa bahari
kekuatan laut tumpuan kita



Pesan dari Nusantara

Tigaribulimaratus tahun yang lampau terjadi perpindahan manusia para penutur rumpun bahasa Austronesia. Mereka berpindah dari tempat asalnya di daratan Tiongkok menyeberang ke Pulau Taiwan. Dari tempat asalnya mereka membawa kepandaian bercocoktanam di ladang. Perjalanan/pelayaran menuju pulau menjadikan mereka mempunyai sedikit pengalaman di laut dengan menyeberangi selat. Di Taiwan mereka mengembangkan teknik-teknik bercocok-tanam.

Entah karena sebab apa, dari Taiwan kemudian mereka berpindah lagi ke arah selatan, ke Kepulauan Filipina pada sekitar 3000 tahun Sebelum Masehi. Selanjutnya perpindahan ini terus berlanjut sampai ke Nusāntara. Sebagian ke arah Kalimantan, dan sebagian lagi ke arah Sulawesi. Mereka yang ke arah Kalimantan terus menyerang lagi ke Sumatera, kembali ke daratan Asia melalui Semenanjung Tanah Melayu, sebagian lagi menyeberang ke Jawa, dan ada pula yang melanjutkan penyeberangannya hingga ke Madagaskar. Sebagian yang ke arah Sulawesi, mereka melanjutkan penyeberangannya ke Halmahera, pantai utara Irian, dan terus ke timur hingga ke Pulau Paskah. Ada juga yang ke selatan hingga ke Selandia Baru. Mereka ini, baik yang menyebar ke arah barat sampai Madagaskar, ke arah timur sampai Pulau Paskah, dan selatan sampai ke Selandia Baru berasal dari ras Melanesid.

Para penutur rumpun bahasa Austronesia yang berkembang di Nusāntara pada sekitar 1500 Sebelum Masehi, telah matang mempunyai kepandaian bercocok-tanam dan pelayaran. Dalam bentuk sukubangsa, mereka yang mempunyai dua kepandaian ini menjadi sukubangsa Melayu. Sukubangsa inilah yang menempati 75% wilayah Nusāntara dengan berbagai bentuknya seperti sukubangsa Aceh, Batak,

Palembang, Jawa, Dayak, Bali, Lombok, Bugis, Makassar dan Ternate. Latar belakang budaya yang mengacu kepada lingkungan alam tempatnya hidup juga berbeda-beda. Bagi yang tinggal di pedalaman bermatapencaharian sebagai petani (kelompok masyarakat agraris), sedangkan yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil hidup sebagai nelayan (kelompok masyarakat bahari).

Sementara itu di sebelah timur Nusāntara di pulau-pulau Papua, Ambon, Seram, Banda, Aru, Flores, dan Sumba telah ada penduduk yang berasal dari ras Papuid dengan ciri rambut keriting dan kulit gelap. Mereka juga hidup sebagai nelayan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hidup sebagai petani di ladang di daerah pedalaman. Teknik mengolah lahan yang mereka kerjakan adalah teknik berladang. Teknik persawahan dengan pengairan irigasi tidak mereka lakukan/kembangkan. Di Flores para anggota sukubangsa yang tinggal di pulau ini telah mengenal sistem bercocok-tanam yang dikaitkan dengan cuaca/curah hujan yang tidak menentu (daerah *erratic rainfall*). Karena itulah jenis tanaman yang ditanam tidak berlangsung lama, yaitu tiga bulan. Tanaman jagunglah yang paling tepat, dan cara menanamnya pun berselang-seling. Apabila di satu kawasan sedang ditanami jagung, di kawasan lain ditanami dengan jenis tanaman pangan yang lain. Itulah cara mereka melakukan ketahanan pangan.

Masyarakat nelayan yang tinggal di kawasan Flores (Lamalera, Pulau Lembata) secara tidak langsung mengenal cara konservasi alam, yaitu ketika melakukan perburuan ikan paus. Perburuan ikan paus dan ikan-ikan besar lain hanya dilakukan pada musim tertentu. Biasanya pada bulan Juni hingga Oktober, dan ikan yang boleh diburu tidak sembarangan. Ikan yang dapat diburu antarlain ikan yang sudah dewasa dan tidak sedang bunting (khusus untuk ikan paus). Hasil perburuan diperuntukkan bagi janda-janda, yatim piatu, orang miskin, dan terakhir barulah diberikan pada seluruh masyarakat Lembata. Konservasi semacam ini tentu tidak mustahil dilakukan juga pada kelompok masyarakat nelayan di tempat lain. Hanya saja caranya berbeda dengan yang ada di Lembata.

Penduduk Indonesia yang berasal dari ras Melanesid dan Papuid ini mengelola sumberdaya alam yang terkandung di bumi (darat dan air) Nusāntara. Pada masa sejarah peradaban manusia di Nusāntara, sumberdaya alam ini menjadi dayatarik bagi bangsa-bangsa lain untuk datang. Semula mereka datang untuk berniaga, pada akhirnya mereka membuat koloni (menjajah) Nusāntara. Penduduk lokal dipaksa untuk berniaga dengan para penjajah. Pada kala itu, sekuat-kuatnya pemerintah kerajaan lokal pada akhirnya jatuh juga. Hal ini disebabkan karena politik adu-domba yang dijalankan oleh penjajah. Sebagai contoh misalnya Kerajaan Gowa-Tallo atau Kerajaan Makassar.

Kerajaan Gowa-Tallo yang inti pemerintahannya di wilayah Sulawesi Selatan sebagian besar rakyatnya berasal dari sukubangsa Makassar dan Bugis. Mereka dikenal sebagai pelaut-pelaut ulung yang sudah melayari sebagian besar wilayah Nusāntara, bahkan keluar dari

Nusāntara. Salah satu pulau di Nusāntara yang mempunyai komunitas-komunitas Bugis adalah Pulau Lombok. Mereka tinggal di daerah pesisirnya dengan aktivitas sebagai saudagar dan nelayan. Di beberapa lokasi di Pulau Lombok mereka membangun pelabuhan-pelabuhan di mana komunitas mereka berada. Pada waktu pemerintahan kolonial Belanda kedudukan orang-orang Bugis-Makassar sudah demikian kuat. Mereka telah menguasai sebagian besar wilayah Nusāntara. Dalam bidang hukum pelayaran dan perdagangan, Kerajaan Gowa-Tallo atau Kerajaan Makassar telah mengenal semacam undang-undang pelayaran dan perdagangan yang dikenal dengan nama *Amanna Gappa* (Tobing 1961). Hal inilah yang membuat Belanda berusaha menaklukkan Makassar dengan cara apapun. Salah satu di antaranya adalah dengan jalan adu-domba dengan Aru Pallaka, dan usaha ini berhasil yang pada akhirnya dikeluarkan Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Dalam perjanjian ini, antara lain berisi pembatasan pelayaran dan perdagangan bagi kapal-kapal Makassar. Orang asing, kecuali Belanda, tidak boleh berdagang di Makassar.

Kembali ke masa jauh sebelum orang-orang Bugis-Makassar “mendominasi” perairan Nusāntara, ketika di Sumatera terdapat Kadātuan Śrīwijaya (abad ke-7-12 Masehi). Pada waktu itu Nusāntara dikuasai oleh sukubangsa yang mahir berperang di air dan di darat. Sebuah berita Tionghoa dari abad ke-12 menyebutkan: “Rakyatnya pandai berperang di laut dan di darat. Apabila berperang dengan kerajaan lain mereka dengan mudah akan memobilisasikan diri dan mengangkat seorang panglima perangnya.....” (Groeneveldt 1960, 63). Berdasarkan berita Tionghoa ini, Lopian menduga bahwa yang dimaksud dengan Berita Tionghoa itu mungkin saja Suku Laut, suatu sukubangsa yang benar-benar orang yang hidup di laut (1979, 99). Kelompok Suku Laut ini hidup mengelompok di suatu tempat di muara-muara sungai dan perairan dangkal. Mereka hidup di perahu-perahu dan rumah-rumah yang dibangun di atas tiang yang tinggi di perairan dangkal. Pada saat ini komunitas sukubangsa ini sudah menyebar di seluruh penjuru Nusāntara, seperti di sekitar perairan Selat Melaka, Selat Karimata, kepulauan di Sulawesi Tenggara, dan Kepulauan Nusa Tenggara Timur.

Suku Laut atau kadang disebut Suku Bajau atau Suku Bajo, sering dikatakan sebagai sukubangsa yang nomaden. Karena itulah seringkali mereka disebut dengan istilah *gipsi laut* atau pengembara di laut. Secara alami mereka sangat mahir di laut. Pengetahuan kebahariannya terbentuk karena lingkungan alam tempatnya mereka tinggal. Sebagai sukubangsa yang mempunyai kemahiran di laut dan hidup di sebuah Negara kepulauan, sangat disayangkan sumberdaya mereka tidak atau belum dimanfaatkan dengan baik. Jangankan memanfaatkan mereka dengan mempekerjakan mereka sesuai dengan keahliannya, menyekolahkan mereka sebagai bagian dari kewajiban negara tidak dilakukan. Banyak anak-anak dan remaja Suku Bajo yang belum sekolah, apalagi sampai mengenyam bangku universitas. Berkaca dari Kadātuan Śrīwijaya yang memanfaatkan Suku Laut sebagai kekuatan angkatan lautnya, sungguh tepat kiranya Angkatan Laut Republik Indonesia memanfaatkan keberadaan Sukubangsa Bajo sebagai bagian dari kekuatan laut. Biar bagaimanapun kemahiran mereka di laut jauh lebih unggul daripada saudaranya Sukubangsa Minangkabau atau sukubangsa lain yang hidup di pedalaman di kaki dan lereng gunung pada tanah-tanah yang subur.

Mengenai jaringan pelayaran dan perdagangan barter atau tunai, orang-orang yang hidup di Nusāntara sudah lama melakukannya. Jaringan pelayaran di Nusāntara telah dirintis oleh manusia-manusia prasejarah, mungkin sekali dalam rangka perdagangan rempah-rempah. Data arkeologis tentang penyebaran nekara-nekara perunggu dari daratan Asia Tenggara, Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Bali, Kepulauan Sunda Kecil hingga Kepulauan Kei di Maluku Tenggara, merupakan suatu bukti tentang adanya lalu-lintas perdagangan rempah-rempah (Rouffaer 1900). Pada millennium pertama tarikh Masehi, rempah-rempah di dunia diduga hanya dihasilkan di bumi Maluku, seperti cengkeh hanya di Ternate dan pala/bunga pala hanya di Banda. Selanjutnya Rouffaer menemukan bukti tertulis dari Eropa yang menyatakan bahwa rempah-rempah hanya dihasilkan di Maluku.

Melalui komoditi cengkeh dan pala tersebut, dapat ditelusuri jalur-jalur pelayaran dan perdagangan sampai seberapa jauh hubungan Maluku dengan Tiongkok, India, Timur Tengah, bahkan Eropa. Sebuah sumber tertulis Romawi dari Plinius Major (tahun 75 Masehi) menyebutkan *garyophyllon* (nama tumbuhan yang hanya dapat tumbuh di hutan sakti India).¹² Dari keterangan sumber tersebut, Rouffaer menduga bahwa yang dimaksud dengan *garyophyllon* adalah cengkeh, dan telah dikenal di benua Eropa pada awal abad Masehi (Rouffaer 1905, 363-364). Namun, jauh sebelum itu pada sebuah ekskavasi arkeologis di Situs Terqa (Mesopotamia, Syria) ditemukan sebuah jambangan yang penuh berisi cengkeh. Jambangan ini ditemukan pada sebuah ruangan dapur rumah sederhana yang berasal dari sekitar tahun 1700 SM. Sebuah sumber Tiongkok menginformasikan bahwa salah seorang Kaisar Dinasti Han (abad ke-3 SM) mengharuskan para petinggi kekaisaran untuk mengulum cengkeh ketika menghadap.

Sumber Eropa lainnya menyebutkan bahwa St. Silvester, seorang Uskup Roma (314-335 Masehi) menerima hadiah 150 pon cengkeh. Sumber lain menyebutkan bahwa pada tahun 547 *Cosmos Indicopleustis* mencatat di antara barang-barang dagangannya terdapat rempah-rempah yang didatangkan dari Tiongkok dan Srilanka. Dalam hal ini, Tiongkok dan Srilanka berfungsi sebagai tempat transit komoditi rempah dari Maluku sebelum dipasarkan lebih lanjut.

Informasi dari sumber-sumber tadi menimbulkan pertanyaan. Sebuah komoditi yang "hanya" dihasilkan dari satu tempat, yaitu Maluku, tetapi ada di tempat lain yang letaknya jauh dari sumbernya. Pertanyaannya, siapa yang membawa komoditi tersebut, apakah mereka yang datang mengambil, atau orang dari Maluku yang membawanya. Atau dibawa secara berantai dari Maluku, India (Srilanka), kemudian Eropa. Kemudian bagaimana dengan bentuk alat angkutnya?

¹²Orang Tionghoa rupanya sudah mengetahui bahwa cengkeh hanya dapat diperoleh dari Maluku, "hanya satu tempat di laut selatan yang memproduksi cengkeh ...". (Groeneveldt 1960).

Sumber-sumber tertulis tentang hasil dari Maluku tersebut, mengindikasikan bahwa bukan pembeli yang datang ke Maluku, melainkan orang-orang dari Maluku (Nusāntara) yang datang. Kalau pembeli yang datang, biasanya diceriterakan juga tempat yang didatangi itu. Sebuah deskripsi “menyesatkan” yang ditulis oleh penulis Arab terkenal Ibnu Battūtā (1350 Masehi) menyatakan: “cengkeh yang diperdagangkan adalah batang pohonnya, buahnya disebut pala, dan bunganya dinamakan fuli (Ferrand 1913). Ini berarti, Ibnu Battūtā tidak tahu bagaimana bentuk pohon cengkeh dan bagaimana bentuk pohon pala.

Dalam konteks kekinian dimana kita harus belajar dari sejarah (bukan belajar sejarah) tidak sepatutnya bangsa ini mengalami kemajuan yang lamban. Bangsa ini memiliki segalanya baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang sebetulnya sangat berpotensi untuk dapat mengelola sumberdaya alam yang terkandung di bumi Nusāntara. Sebagaimana halnya dengan sumberdaya alam, pelabuhan-pelabuhan tradisional yang telah dibangun secara “alami” oleh Bangsa Bahari ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ini artinya, amanat yang terkandung di dalam UUD 1945 belum dilaksanakan sepenuhnya.

“Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Demikian bunyi pembukaan UUD 1945. Inilah dasar hukum yang dipakai untuk mengatur masalah kelautan pemerintah Republik Indonesia sebagai konsekuensi sebagai negara yang wilayahnya mencapai 1,9 juta mil² dan terdiri dari 17.508 pulau. Di dalamnya berdiam 770 sukubangsa dengan corak budaya sendiri, serta 19 daerah hukum adat dan 726 bahasa.

Pada awal kemerdekaannya, pengaturan batas-batas teritorial Republik Indonesia masih mengacu pada *Territorialle Zee en Maritime Kringen-Ordonantie 1939 (TZMKO 1939)*, yang dalam Pasal 1, ayat 1 ditetapkan bahwa batas-batas laut teritorial adalah selebar 3 mil dari pantai. Tentu saja pasal ini tidak sesuai bagi sebuah negara kepulauan, karena dalam sebuah negara kepulauan semua pulau serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Republik Indonesia yang pada waktu itu berada di bawah Kabinet Djoeanda, mengeluarkan sebuah pernyataan ketentuan mengenai wilayah perairan Indonesia, yang dikenal dengan nama Deklarasi Djoeanda 1957. Isinya adalah:

“Segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari-

pada Negara Republik Indonesia. Lalu-lintas yang damai diperairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/menggangu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia”.

Dalam pernyataan itu terkandung suatu konsepsi Nusāntara, yang melahirkan konsekuensi bagi pemerintah dan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan serta mempertahankannya hingga mendapat pengakuan internasional.

Dicermati dari sisi kesukubangsaan dan budaya, keberadaan laut bebas di antara pulau-pulau di Negara Republik Indonesia sangatlah janggal. Bagaimana pun penduduk antara satu pulau dengan pulau lainnya masih satu bangsa. Bagaimana mungkin sebuah negara yang berdaulat dipisah-pisahkan oleh laut bebas sebagai pembatasnya. Sejak awal kedatangan manusia di bumi Nusāntara ini, pulau-pulau besar seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian telah dihuni manusia. Bahkan pulau-pulau kecil seperti Nusatenggara (dahulu disebut Kepulauan Sunda Kecil) juga telah dihuni. Beberapa penelitian arkeologi di Flores menemukan sisa-sisa kehidupan dari 80.000 tahun yang lalu.

Wawasan Nusāntara melihat negara kita bukan sebagai wilayah yang hanya terdiri dari pulau-pulau, melainkan sebagai sebuah negara kepulauan (*archipelagic states*), termasuk laut di antaranya (laut pedalaman). Dari pandangan ini dapat ditegaskan bahwa laut merupakan pemersatu, bukan sebagai pemisah. Sejarah bangsa ini telah membuktikan bahwa sejak awal aktivitas bangsa ini berada di laut. Sejarah Nusāntara bukanlah sejarah yang hanya membicarakan masa lampau pulau demi pulau, akan tetapi meliputi seluruh wilayah kepulauan.¹³

Limapuluhlima tahun sudah Indonesia mendeklarasikan diri sebagai Negara Kepulauan dan tigapuluh tahun sudah Indonesia “dilindungi” secara hukum oleh dunia internasional (*UNCLOS 1982*) sebagai *Archipelagic State*. Namun dalam kurun waktu tersebut kita telah kehilangan Pulau Sipadan, Ligitan, dan Timor Timur, serta Pulau Ambalat yang masih disengketakan dengan Malaysia. Masih ada 12 pulau lagi di “tepi” Indonesia yang masih disengketakan dengan negara tetangga, yaitu Pulau Bondo, Pulau Sekatung, Pulau Nipa, Pulau Berhala, Pulau Marore, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Batek, Pulau Dana, Pulau Fani, dan Pulau Bras. Belum lagi berapa banyak kekayaan laut kita dicuri mulai dari ikan, pasir laut, sampai dengan hasil-hasil tambang yang dicuri dan dilarikan ke luar negeri.

Wawasan Nusāntara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan

¹³ Lopian, A.B., 1992, “Sejarah Nusantara Sejarah Bahari”, Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan guru besar luar biasa Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tanggal 4 Maret 1992.

negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Inilah cara pandang bangsa Indonesia dalam memandang tanah air tempat kelahirannya yang akhir-akhir ini sudah mulai dilupakan oleh anak-anak bangsa. Memang kita tidak boleh lupa daratan, tetapi kita juga tidak boleh lupa laut. Sejarah bangsa ini sesungguhnya dimulai dari laut. Segala aktivitas kehidupan bangsa ini sejak awal penyebaran penghuni Nusāntara terjadi di laut.

*Pura babbaraksompeku --pura tangkisik gulikku--
Ulebbirenggi telling na tualie*

*Apabila layar sudah terkembang,
lebih baik mati tenggelam daripada kembali berlabuh*

DAFTAR PUSTAKA

- Acheson, James M. "Anthropology of Fishing". Barnard J. Siegel, Alan R. Beals dan Stephen A. Tyler (eds). *Annual Review of Anthropology* 10 (1981):275-316.
- Akamichi, Tomoya, & Dedi A. Supriadi. 1996. Marine Resource Use in the Bajo of North Sulawesi an Maluku Indonesia. *Seri Ethnological Studies* No.42 .
- Andaya, Leonard Y. *The Heritage of Arung Palakka. A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*. VKI no.91. The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.
- Andaya, Barbara W. & Leonard Y. Andaya. 1982. *A History of Malaysia*. London: The MacMillan Press Ltd.
- Andi Ima Kesuma. *Migrasi dan Orang Bugis: Penelusuran Kehidupan Opu Daeng Rilakka pada Abad ke XVIII di Johor*. Yogyakarta: Ombak, 2004.
- Andi Zainal, A. *Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar*. Bandung: Alumni, 1983.
- Ardhana, I Ketut. *Balinese Puri in Historical Perspective: The Role of Puri Satria and Puri Pamacutan in Social and Political Changes in Badung, South Bali, 1906-1950*. MA Thesis, Southeast Asian Centre, Faculty of Asian Studies, The Australian National University, 1993.
- Ardhana, I Ketut. "Masyarakat Multibudaya: Konsep Perbincangan, Wacana, Analisis, Temuan." *Dinamika Kebudayaan* III, 1 (2000):
- Ardhana, I Ketut. *Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial, 1915-1950*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ardhana, I Ketut. "Tourism and Community Security in Bali: A Social and Cultural Perspective". Makalah dipresentasikan pada *Conference and General Assembly of IFSSO, "Social Science Perspectives on Human Security"*, diselenggarakan oleh ... di Lyceum of the Philippines University (LPU), Batangas City, The Philippines, 8—11 November 2011.
- Ardhana, I Ketut. "Pandangan Lokal versus Barat tentang Puputan Badung: Ekspansi Imperialisme Modern Belanda dalam Konteks Bali". Makalah dipresentasikan pada *Seminar on "Puputan Badung"*, diselenggarakan oleh ... di Monumen Perjuangan Rakyat Bali (Banjra Sandhi) Denpasar pada 3 November 2011.
- Ardhana, I Ketut, et al. *Masyarakat Multikultural Bali: Tinjauan Sejarah, Migrasi, dan Integrasi*. Denpasar: Pustaka Larasan dan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana, 2011.
- Ardika, I Wayan. "Bukti-bukti Arkeologi Terbentuknya Akar Multikulturalisme." *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik* (eds. I Wayan Ardika dan Darma Putra). Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press, 2004.

- Armando Cortesão. *The Suma Oriental of Tomé Pires. An Account of the East, from Red Sea to Japan, written in Malacca and India in 1512-1515*. 2 vols. Translated from Portuguese MS in the Bibliothèque de la Chambre des Députés, Paris, and edited by Armando Cortesão. London: Hakluyt Society, 1944.
- Barnes, R.H. *Sea Hunters of Indonesia*. Oxford: Clarendon Press, 1996.
- Barth, F. *Ethnic-groups and Boundaries*. Boston: Little Brown, 1969.
- Beckering, J. D. H. "De bevolking van de Timor Groep." *De Volken van Nederlandsch Indië* (ed. J. C. van Eerde). Amsterdam: Uitgevers Maatschappij, Elsevier, 1920. 128-147.
- Bellwood, Peter. 1985. *Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Bohannan, Paul dan Mark Glazer. *High Point in Anthropology*. New York: Alfred A. Knopf, Inc., 1988.
- Brandes, J.L.A. "Oud-Javaansche Oorkonden". *VBG VIII* (1913): 134-136.
- Budiwanti E. *Islam Sasak: Wetu Telu Versus Waktu Lima*. Yogyakarta: LKiS & IKAPI, 2000.
- Callenfels, P.V. van Stein. "De inscriptie van Soekaboemi". *MKAW-L 78*, Seri B No. 4 (1934):
- de Casparis, J.G. *Inscripties uit de Çailendra-tijd. Prasasti Indonesia I*. Bandung: NV Masa Baru, 1950.
- de Casparis, J.G. "Srivijaya and Malayu". *SPAFA Final Report: Consultative Workshop on Archaeological and Environmental Studies on Srivijaya*. Bangkok: SPAFA Coordinating Unit, 1985.
- de Casparis, J.G. "An Ancient Garden in West Sumatera". *Kalpataru 9* (1990):40-50.
- Christie, Jan Wisseman. "Negara, Mandala, and Despotic State: Images of Early Java". David Marr and A.C. Milner. *Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries*. Singapore: Research School of Pacific Studies, 1986.
- Damais, L.-Ch. "Epigrafische aantekeningen, I, Lokapala-Kayuwangi", *TBG 83* (1949): 1-26
- Diantari, Ni Putu. *Gerakan Pembaharuan Hindu: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Intelektual Hindu di Bali Tahun 1925-1958*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana, 1990.
- Eriksen, T. Hylland. *Ethnicity Nationalism; Anthropological Perspective*. London: Pluto Press, 1993.
- Erkelens, B. "Geschiedenis van het Rijk Gowa". *VBG 50* (1897):
- van Erp, Th. "Voorstellingen van vaartuigen op de reliefs van den Boroboedoer", *Nederlandsch Indië Oud en Nieuw*, 8^{ste} jg (1923-1924):227-255.
- Esser. "Aantekeningen over Soemba". *TNI*, I (1877):
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books Inc., 1973.
- Goris, R. "De inscriptie van Koeboeran Tjandi". *TBG 70* (1930):157-170.

- Gust, Heike. *Der Balinesische Hinduismus in Geschichte und Gegenwart*. Master thesis. Universität Passau, kota, negara, 1994.
- Harris, Z. "Bajo, Suku yang Tinggal Terapung di Perairan Pantai Timur Kendari". *Sinar Harapan* 18 Februari 1980.
- Heine-Geldern, Robert von. *Conceptions of States and Kinship in Southeast Asia*. Ithaca-New York: Southeast Asia Program Department of Asian Studies, 1956.
- Hirth, Friederich dan W.W. Rockhill (eds.). *Chau Ju-Kua*. His Work on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries entitled Chu-fan-chi. Amsterdam: Oriental Press, 1966.
- Horridge, G.A. *The lashed lug boat of the Eastern Archipelago*. Maritime Monographs 54. London: National Maritime Museum, 1982.
- Hutabarat, S. *Peran Universitas Diponegoro dalam Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (Dalam Bidang Kelautan)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1955.
- Hutabarat, S. "Departemen Perikanan dan Kelautan". *Harian Suara Merdeka*. 28 Oktober 1999.
- Hutabarat, S. *Produktivitas Perairan dan Plankton. Telaah tentang Ilmu Perikanan dan Kelautan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- Hutabarat, S. dan Evans. *Pengantar Oseanografi*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Ishak. "Suku Laut Terpaksa Berteduh Selama Musim Barat". *Kompas*, 14 Februari 1980.
- Jasper, J. E. "Het Eiland Soembawa en Zijn Bevolking". *TBG* 34 (1908):60-147.
- Kapita, Oemboe Hina. *Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya*. Waingapu: Panitia Penerbit Naskah-naskah Kebudayaan Daerah Sumba-Dewan Penata Layanan Gereja Kristen Sumba Waingapu, 1976.
- Koestoro, Lucas Partanda. "Tinggalan Perahu di Sumatera Selatan: Perahu Sriwijaya?". *Sriwijaya dalam Perspektif Arkeologi dan Sejarah*. Palembang: Pemerintah Daerah Tk. I Provinsi Sumatera Selatan, 1993. C1-1-10.
- Kottak, Conrad Phillip. *Anthropology: The Exploration of Human Diversity*. New York: McGraw-Hill Inc., 1991.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Lampe, Muni, dkk. *Menggali Kelembagaan Lokal dan Wawasan Budaya Bahari yang Menunjang bagi Penguatan Integritas Bangsa dan Harmoni Sosial di Indonesia*. Laporan Penelitian Strategi Nasional, Dikti Kementerian Pendidikan Nasional RI, 2010.
- Lansing, J. Stephen. "The Indianization of Bali". *Journal of Asian Studies* XIV (1983):
- Lopian, A.B. *Sejarah Nusantara Sejarah Bahari*. Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar Luar Biasa Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tanggal 4 Maret 1992.
- Lopian, A.B. *Peta Pelayaran Nusantara Dari Masa Ke Masa*. Makalah disampaikan dalam Musyawarah Kerja Nasional Sejarah XIII, di Makassar, 9-12 Juli 1996.

- Lopian, A.B. *Research on Bajau Communities: Maritime People in Southeast Asia*. Widyakarya Nasional Antropologi dan Pembangunan. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Dirjen Kebudayaan Depdikbud, 1997.
- Lopian, A.B. "Ternate sekitar abad ke-16: Menurut catatan Antonio Galvao, Kapitan di Ternate (1536-1539)". *Ternate Bandar Jalur Sutra* (ed. Ade Kamaluddin, dkk.). Jakarta: LinTaS, 2001. 39-54.
- Leslie, Charles. *Anthropology of Folk Religion*. Vintage Books, Alfred A Knopf and Random House Inc., 1960.
- Leur, J.C. van. *Indonesian Trade and Society. Essays in Asian Social and Economic History*. Bandung: Sumur Bandung, 1960.
- Liebner, H. H. "Tradisi Kebaharian di Sulawesi Selatan: Tinjauan Sejarah Perkapalan dan Pelayaran". *Kontinuitas & Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan* (eds. Dias Pradadimara & Muslimin A.R. Effendi). Yogyakarta: Ombak, 2004.
- Manguin, P.Y. "Perahu Karam di Situs Bukit Jakas, Propinsi Riau". *10 Tahun Kerjasama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslitarken) dan Ecole Française d'Extreme-Orient (EFEO)*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1987. 43-64
- Maunati, Yekti. *Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Mohr, E.C.J. "the Relation between Soil and Population Density in the Netherlands Indies". (penyunting P. Honig dan F. Verdoorn). 1945. 254-262
- Mohr, E.C.J. *Tentang Tanah di Indonesia*. (diterjemahkan oleh R. Sodo Adisewojo). Bandung s'Gravenhage: NV Penerbitan W. van Hoeve, t.t.
- Muhsipuddin. *Kilas Balik 100 Tahun Pendidikan di Lombok Timur*. Lotim: Referensi Kab. Lombok Timur, 2004.
- Needham, Rodney. "Soemba and the Slave Trade". Working Paper No. 11. Oxford: Oxford University, 1983.
- Nik Hassan Shuhaimi (ed.). *Early History* (The Encyclopedia of Malaysia Vol. IV). Singapore: Archipelago Press, 1999.
- Noorduyn, J. "De Handelrelatie van het Makassarsche Rijks volgen de Notitie van Cornelis Speelman uit 1670". *Nederlandsche Historische Bronnen* 3 (1983): 99-123.
- Reid, Anthony. "The Rise of Makassar". *RIMA XVII* (1983):117-160.
- Pelras, C. *The Bugis*. Oxford: Blackwell, 1996.
- Poelinggomang, Edwards. *Makassar Abad XIX. Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Robert Zacot, François. *Orang Bajo Suku Pengembara Laut: Pengalaman Seorang Antropolog*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Rudiansjah, Tony. *Kekuasaan, Sejarah, dan Tindakan; Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sar Desai. D.R. *Southeast Asia*. Los Angeles: University of California, 1997.
- Schrool, J.W. *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton*. Jakarta: Penerbit Djambatan-KITLV, 2003.

- Setyobudi, W. "Kehidupan Suku Laut (Ameng Sewang)". Seri *Masyarakat Terasing di Indonesia* No. 2. Jakarta: Direktorat Bina Masyarakat Terasing Departemen Sosial, 1987.
- Southon, M. *The Navel of the Perahu: Meaning and Values in the Maritime Trading Economy of Butonese Vilage*. Canberra: Dept. of Anthropology Australian National University, 1995.
- Sopher, David E. *The Sea Nomads: A Study of Maritime Boat People of Southeast Asia*. Singapore: The National Museum, 1971.
- Stapel, F.W. *Het Bongaais Verdrag*. Disertasi. Rijks Universiteit Leiden, 1922.
- Stutterheim, W.F. "Een belangrijke oorkonde uit de Kedoe". *TBG* 67 (1927):172-216.
- Suparlan, Parsudi. *Hubungan Antar Sukubangsa*. Jakarta: YPKIK, 2004.
- Sutherland, H.A. "Eastern Emporium and Company Town: Trade and Society in the Eighteenth Century Makassar". *Brides of the Sea. Port Cities of Asia from 16th-20th Centuries* (ed. Frank Broeze). Kensington: New South Wales University Press, 1989. 97-128.
- Sutjipto Wirjosuparto. "Apa sebabnya daerah Kadiri dan daerah sekitarnya tampil ke muka dalam sedjarah?". *Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional Pertama* 5, D (1958): 72.
- Tahara, Tasrifin. *Reproduksi Stereotipe dan Resistensi Orang Katobengke dalam Struktur Masyarakat Buton*. Disertasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 2010.
- Tanudirjo, D.A. *Islands in between. Prehistory of Northeastern Indonesian Archipelago*. Ph.D. dissertatio. The Australian National University, Canberra, 2001.
- Tanudirjo, D.A. "Budaya Bahari Penutur Austronesia". Makalah disajikan dalam *Diskusi Pra-Simposium Internasional tentang Austronesia dan Pra-Kongres IAAI X*, di LIPI Jakarta, 21 Juni 2005.
- Tsing, Anna Lowenhaupt. *In The Realm of the Diamond Queen, Marginality in an Out the Way Place*. Princeton University Press, 1993.
- Vickers, Adrian. *Peradaban Pesisir Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara*. Denpasar: Pustaka Larasan dan Udayana University Press, 2009.
- Villiers, John (ed.). "Sudostasien voor de Kolonialzeit". *Fischer Weltgeschichte*, 18. Paris: Fischer Bucherei, K.G., 1993.
- Vollenhoven, C. van. *Het Adatrecht van Nederlandsch Indië*. Leiden: Boekhandel en Drukkerij. Voorheen E. J. Brill, 1931.
- Wielenga, D. K. *Marapoe: Een Verhaal uit Somba*. Kampen: J. H. Kok N.V., 1932.
- Wolhoff, G.J. dan Abdurrahim. T. *Sedjarah Goa*. Makassar: Jajasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, t.t..
- Wolters, O. W. *History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1982.
- Wong Lin Ken. "The Trade of Singapore, 1819-1859". *JMBRAS* XXXIII, 1 (1961):
- Woodward, Kathryn. *Identity and Difference*. London: Sage Publications, 1997.

- Zuhdi, Susanto. *Sejarah Buton yang Terabaikan, Labu Rope Labu Wana*. Jakarta, Rajawali Pres, 2010.
- Zuhdi, Susanto. "Budaya Maritim, Kearifan Lokal dan Diaspora Buton". Makalah yang dipresentasikan pada The 2nd ICSSIS 2010 (International Conference on Indonesian Studies) pada Agustus 2010 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok.

Dokumen

- *Garis-garis Besar Haluan Negara 1993-1998*. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/ 1993
- Hasil Rapat Kerja Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, 16 Juli 1994
- Naskah Konvensi Nasional Pengembangan Benua Maritim Indonesia untuk Mengaktualisasikan Wawasan Nusantara, 1996. Sekretaris Jendral Dewan Pertahanan Nasional dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta.
- Strategi Kelautan. 1988. *Pengembangan Kelautan dalam Prospektif Pembangunan Nasional*. (Peny. John Pieris), Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Year 2000. Challenge for Marine Science Training and Education Worldwide, 1988. UNESCO *Report in Marine Science*.

Website

- Anonim. 2010. "Migrasi Bugis: dari Pelaut Menjadi Raja". Diakses 29 November 2010. <http://www.tribunnews.com>.
- Anonim. 2012. "Pertahanan Bahasa Bajo di Lombok Tengah". Diakses 20 November. <http://www.ramaberbagi.blogspot.com/>.
- Anonim. 2012. "Kearifan Lokal Suku Bajo". Diakses 19 November. <http://www.unj-pariwisata.blogspot.com>.
- Anonim. 2012. "Sejarah Agama Islam Lombok". Diakses 19 November. <http://www.pesonaindonesia.com/>.
- <http://travel.okezone.com/read/2012/05/16/408/630796/pantang-bawa-pacar-ke-pura-tanah-lot>
- King Aden, "Asal Mula Selat Bali". <http://legendakita.wordpress.com/2007/11/08/asal-mula-selat-bali-manik-angkeran/>.





Perpus
Jend